



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,
  - b bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
  - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
  - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
  - 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 13 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122),
- 14 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3),

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018,
- 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3),
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6),
- 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5),
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1),
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3),
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9),
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12),
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 41)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN  
2018

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 4 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021
- 6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun

### Pasal 2

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018

### Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | PENDAHULUAN   |
| BAB II  | EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN YANG LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN |
| BAB III | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH   |
| BAB IV  | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018   |
| BAB V   | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018  |
| BAB VI  | PENUTUP   |

(2) Uraian mengenai Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Pasal 5

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Mei

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Di undangkan di Pemalang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

Wakil Bupati	Kasubid	Sejarah Badan	Kepala Badan	Sekda
#	g	g	g	g

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	1	
Daftar Tabel	vi	
Daftar Gambar	x	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.. .. .</b>	<b>I-1</b>
1 1	Latar Belakang	I-1
1 2	Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1 3	Hubungan Antar Dokumen	I-6
1 4	Kaidah Pelaksanaan	I-9
1 5	Sistematika Dokumen RKPD	I-9
1 6	Maksud dan Tujuan	I-10
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN . . . . .</b>	<b>II-1</b>
2 1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2 1 1	Aspek Geografi	II-1
2 1 2	Aspek Demografi	II-5
2 1 3	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-8
1	Pertumbuhan Ekonomi	II-8
2	Laju Inflasi	II-9
3	PDRB per Kapita	II-9
4	Indeks Gini	II-10
5	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	II-11
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-12
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II-16
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-16
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-17
2 1 4	Aspek Pelayanan Umum	II-18
1	Angka Kelulusan SD/MI	II-18
2	Angka Kelulusan SMP/MTS	II-18
3	Angka Melanjutkan SD/MI	II-19
4	Angka Melanjutkan SMP/MTs	II-19
5	Angka Kunjungan ke Perpustakaan	II-20
6	Usia Harapan Hidup	II-20
7	Angka Kematian Ibu	II-21
8	Angka Kematian Bayi	II-21
9	Angka Kematian Balita	II-22
10	Persentase Balita Gizi Buruk	II-22
11	Total Fertility Rate	II-23
12	Persentase PMKS yang Tertangani	II-23
13	Persentase Kepemilikan KTP	II-24
14	Persentase Anak Memiliki Akta Kelahiran	II-25
15	Produktivitas Padi	II-25
16	Produktivitas Jagung	II-25
17	Produktivitas Kedelai	II-26

#09

18	Produksi Komoditas Peternakan Utama	II-26
19	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	II-26
20	Ketersediaan Cadangan Pangan	II-26
21	Produksi Perikanan Tangkap	II-27
22	Produksi Perikanan Budidaya	II-28
23	Persentase Koperasi Sehat	II-28
24	Persentase Pertumbuhan IKM	II-28
25	Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	II-29
26	Peningkatan Wisatawan	II-29
27	Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Pelayanan Air Minum	II-29
28	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	II-29
29	Persentase RTLH	II-30
30	Cakupan Wilayah Kumuh	II-30
31	Persentase Usaha yang Memiliki Ketaatan terhadap Pencemaran Air dan Udara dari Sumber Tidak Bergerak	II-31
32	Persentase Penurunan Konflik Sosial	II-31
33	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	II-31
34	Rata-rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD Pelayanan Publik	II-32
35	Cakupan Pelayanan TI Bagi Masyarakat	II-32
36	Cakupan Kelompok Seni yang Aktif	II-33
37	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	II-36
38	Tingkat Keselarasan Antara Program RKPD dengan RPJMD	II-33
39	Nilai LkjIP	II-33
40	Persentase Prioritas Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD	II-34
2 1 5	Aspek Daya Saing Daerah	II-34
1	Nilai Investasi Penanaman Modal dalam Negeri	II-34
2	Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	II-35
3	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	II-35
4	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	II-36
5	Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik	II-36
2 1 6	Program Unggulan Kepala Daerah	II-36
2 2	Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021	II-37
2 2 1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-37
2 2 3	Aspek Pelayanan Umum	II-38
2 2 3	Aspek Daya Saing Daerah	II-41

2 3	Lingkungan Strategis	II-41
2 3 1	Internal	II-41
	A Kekuatan	II-41
	B Kelemahan	II-42
2 3 2	Eksternal	II-43
	A Peluang	II-43
	B Ancaman	II-43
2 4	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-44
2 5	Isu Strategis Pembangunan Daerah	II-45
	1 Pengurangan kemiskinan	II-45
	2 Pembangunan infrastruktur	II-45
	3 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	II-46
	4 Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	II-46
<b>BAB III</b>	<b>RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH . . . . .</b>	<b>III-1</b>
3 1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3 1 1	Kondisi Ekonomi Kabupaten Pemalang Tahun 2016	III-4
	a Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	III-4
	b Distribusi Persentase PDRB	III-7
	c Pertumbuhan Ekonomi	III-9
	d Inflasi	III-11
3 2 2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-13
3 2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-14
3 2 1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-15
3 2 2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-17
3 2 3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah . .	III-19
<b>BAB IV</b>	<b>PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 . . . . .</b>	<b>IV-1</b>
4 3	Visi Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021	IV-1
4 1	Keterkaitan Antara Visi Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang 2016-2021 dengan Visi Misi Pembangunan Nasional 2015-2019	IV-2
4 2	Keterkaitan Antara Visi Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang 2016-2021 dengan Visi Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	IV-5
4 2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-7
4 3	Prioritas Pembangunan Daerah	IV-3
4 3 1	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018	IV-12

# 8/3-



4 3 2	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	IV-21
4 3 3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2018	IV-24
4 3 4	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang Tahun 2018	IV-25

<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018 .. . . . . .</b>	<b>V-1</b>
5 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	V-1
1	Pendidikan	V-1
2	Kesehatan	V-2
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V-4
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	V-5
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	V-6
6	Sosial	V-6
5 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	V-7
1	Tenaga Kerja	V-7
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	V-8
3	Pangan	V-9
4	Pertanahan	V-9
5	Lingkungan Hidup	V-9
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V-10
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V-10
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	V-11
9	Perhubungan	V-12
10	Komunikasi dan Informatika	V-12
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	V-13
12	Penanaman Modal	V-13
13	Kepemudaan dan Olah Raga	V-14
14	Statistik	V-14
15	Persandian	V-14
16	Kebudayaan	V-14
17	Perpustakaan	V-15
18	Kearsipan	V-15
5 3	Urusan Pilihan	V-16
1	Kelautan dan Perikanan	V-16
2	Pariwisata	V-16
3	Pertanian	V-17
4	Perdagangan	V-18
5	Perindustrian	V-18
6	Transmigrasi	V-19
5 4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	V-19
1	Perencanaan	V-19
2	Keuangan	V-20

# 96

3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	V-21
4	Penelitian dan Pengembangan	V-21
5	Sekretariat Daerah	V-22
6	Sekretariat DPRD	V-23
7	Pengawasan	V-24
8	Program Rutin PD Teknis	V-24
9	Program Rutin Kecamatan	V-25
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>VI-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2 1	Kecamatan menurut Luas Wilayah di Kabupaten Pemalang	II-1
Tabel 2 2	Jumlah Penduduk dan Kepadatan per Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2016	II-5
Tabel 2 3	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2016	II-6
Tabel 2 4	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kelompok Umur di Kabupaten Pemalang Tahun 2016	II-7
Tabel 2 5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-8
Tabel 2 6	Laju Inflasi Kabupaten Pemalang Tahun 2012- 2016	II-9
Tabel 2 7	PDRB per Kapita Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016 (Juta Rupiah)	II-10
Tabel 2 8	Indeks Gini Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-10
Tabel 2 9	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-11
Tabel 2 10	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang Tahun 2012- 2016	II-12
Tabel 2 11	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-13
Tabel 2 12	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-13
Tabel 2 13	Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-14
Tabel 2 14	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-15
Tabel 2 15	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Karesidenan Pekalongan Tahun 2012 – 2015	II-15
Tabel 2 16	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-16
Tabel 2 17	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-16
Tabel 2 18	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-17
Tabel 2 19	Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-18
Tabel 2 20	Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-18
Tabel 2 21	Angka Melanjutkan SD/MI Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-19

Tabel 2 22	Angka Melanjutkan SMP/MTs Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-19
Tabel 2 23	Angka Kunjungan ke Perpustakaan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-20
Tabel 2 24	Usia harapan hidup kabupaten Pemalang Tahun 2012- 2016	II-20
Tabel 2 25	Angka Kematian Ibu Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-21
Tabel 2 26	Angka Kematian Bayi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-21
Tabel 2 27	Angka Kematian Balita Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-22
Tabel 2 28	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-22
Tabel 2 29	Total Fertility Rate Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-23
Tabel 2 30	Persentase PMKS yang Tertangani Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-24
Tabel 2 31	Persentase Kepemilikan KTP Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-24
Tabel 2 32	Persentase Anak Memiliki Akta Kelahiran Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-25
Tabel 2 33	Produktivitas Padi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-25
Tabel 2 34	Produktivitas Jagung Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-25
Tabel 2 35	Produktivitas Kedelai Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-26
Tabel 2 36	Produksi Komoditas Peternakan Utama Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-26
Tabel 2 37	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-26
Tabel 2 38	Ketersediaan Cadangan Pangan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-27
Tabel 2 39	Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-27
Tabel 2 40	Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-28
Tabel 2 41	Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-28
Tabel 2 42	Persentase Pertumbuhan IKM Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-28
Tabel 2 43	Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-29

#90

Tabel 2 44	Peningkatan Wisatawan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-29
Tabel 2 45	Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Pelayanan Air Minum Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-29
Tabel 2 46	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-30
Tabel 2 47	Persentase RTLH Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-30
Tabel 2 48	Cakupan Wilayah Kumuh Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016	II-31
Tabel 2 49	Persentase Usaha yang Memiliki Ke taatan terhadap Pencemaran Air dan Udara dari Sumber Tidak Bergerak Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-31
Tabel 2 50	Persentase Penurunan Konflik Sosial Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-31
Tabel 2 51	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-32
Tabel 2 52	Rata-rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD Pelayanan Publik Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-32
Tabel 2 53	Cakupan Pelayanan TI Bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016	II-32
Tabel 2 54	Cakupan Kelompok Seni yang Aktif Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-33
Tabel 2 55	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-33
Tabel 2 56	Tingkat Keselarasan Antara Program RKPD dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016	II-33
Tabel 2 57	Nilai LkjIP Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016	II-33
Tabel 2 58	Persentase Prioritas Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-34
Tabel 2 59	Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016	II-34
Tabel 2 60	Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-35
Tabel 2 61	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-35
Tabel 2 62	Persentase Jembatan Kondisi Baik Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-36
Tabel 2 63	Persentase Saluran Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016	II-36
Tabel 2 64	Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-37
Tabel 2 65	Capaian Kinerja Aspek Pelayanan Umum	II-38

Tabel 2 66	Capaian Kinerja Aspek Daya Saing Daerah	II-41
Tabel 3 1	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	III-4
Tabel 3 2	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Kontans 2010 Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	III-5
Tabel 3 3	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	III-7
Tabel 3 4	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	III-8
Tabel 3 5	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pemalang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (%)	III-10
Tabel 3 6	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pemalang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (%)	III-10
Tabel 3 7	Laju Inflasi Kabupaten Pemalang Desember 2014 dan Desember 2015 menurut Kelompok Pengeluaran	III-13
Tabel 3 8	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pemalang	III-16
Tabel 3 9	Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Pemalang	III-18
Tabel 3 10	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Pemalang	III-19
Tabel 4 1	Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan	IV-7
Tabel 4 2	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang Tahun 2017	IV-29

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang	I-3
Gambar 1 2	Skema Hubungan Antar Dokumen	I-8
Gambar 2 1	Kecamatan menurut Luas Wilayah di Kabupaten Pemalang	II-2
Gambar 2 2	Kepadatan per Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2016	II-6
Gambar 2 3	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2016	II-7
Gambar 2 4	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kelompok Umur di Kabupaten Pemalang Tahun 2016	II-8
Gambar 2 5	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016	II-9
Gambar 2 6	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016	II-9
Gambar 2 7	Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016 (juta rupiah)	II-10
Gambar 2 8	Perkembangan Gini Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-11
Gambar 2 9	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-11
Gambar 2 10	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016	II-12
Gambar 2 11	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-13
Gambar 2 12	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2015	II-14
Gambar 2 13	Angka Harapan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-14
Gambar 2 14	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-15
Gambar 2 15	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2016	II-16
Gambar 2 16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-17
Gambar 2 17	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-17
Gambar 2 18	Perkembangan Angka Kelulusan SD/M1 Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-18

# 90

Gambar 2 19	Perkembangan Angka Kelulusan AMP/MTs Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-19
Gambar 2 20	Perkembangan Angka Melanjutkan SD/MI Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-19
Gambar 2 21	Perkembangan Angka Melanjutkan SMP/MTs Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-20
Gambar 2 22	Perkembangan Angka Kunjungan Ke Perpustakaan Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-20
Gambar 2 23	Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-21
Gambar 2 24	Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-22
Gambar 2 25	Perkembangan Persentasi Balita Gizi Buruk Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-23
Gambar 2 26	Perkembangan Persentase PMKS yang Tertanganı Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-24
Gambar 2 27	Perkembangan Persentase Kepemilikan KTP Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-25
Gambar 2 28	Perkembangan Ketersediaan Cadangan Pangan Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-27
Gambar 2 29	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-27
Gambar 2 30	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-28
Gambar 2 31	Perkembangan Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-30
Gambar 2 32	Perkembangan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-34
Gambar 2 33	Perkembangan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	II-35
Gambar 3 1	Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	III-6
Gambar 3 2	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Tahun 2015 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	III-9
Gambar 3 3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	III-11
Gambar 3 4	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016	III-12
Gambar 3 5	Laju Inflasi Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016	III-12
Gambar 3 6	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pemalang	III-17

# 9 7



Gambar 3 7	Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Pemalang	III-19
Gambar 3 8	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Pemalang	III-20
Gambar 4 1	Keterkaitan antara Visi Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dengan Visi Misi Pembangunan Nasional 2015-2019	IV-4
Gambar 4 2	Keterkaitan antara Visi Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dengan Visi Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	IV-6

\* 9/8

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR TAHUN 2017  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Dalam peraturan tersebut, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down* serta menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka tahapan penyusunan APBD

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) yang diselenggarakan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta nasional Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan

Salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah Forum Satuan Perangkat Daerah (Forum PD) Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial. Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dengan rancangan Rencana Kerja PD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor. Forum PD juga ditujukan sebagai arena untuk melakukan sinergisitas antara usulan kegiatan yang bersifat spasial dan usulan sektoral

Penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri

4 76

Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pada Pasal 67 mengamanatkan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melaksanakan program strategis nasional

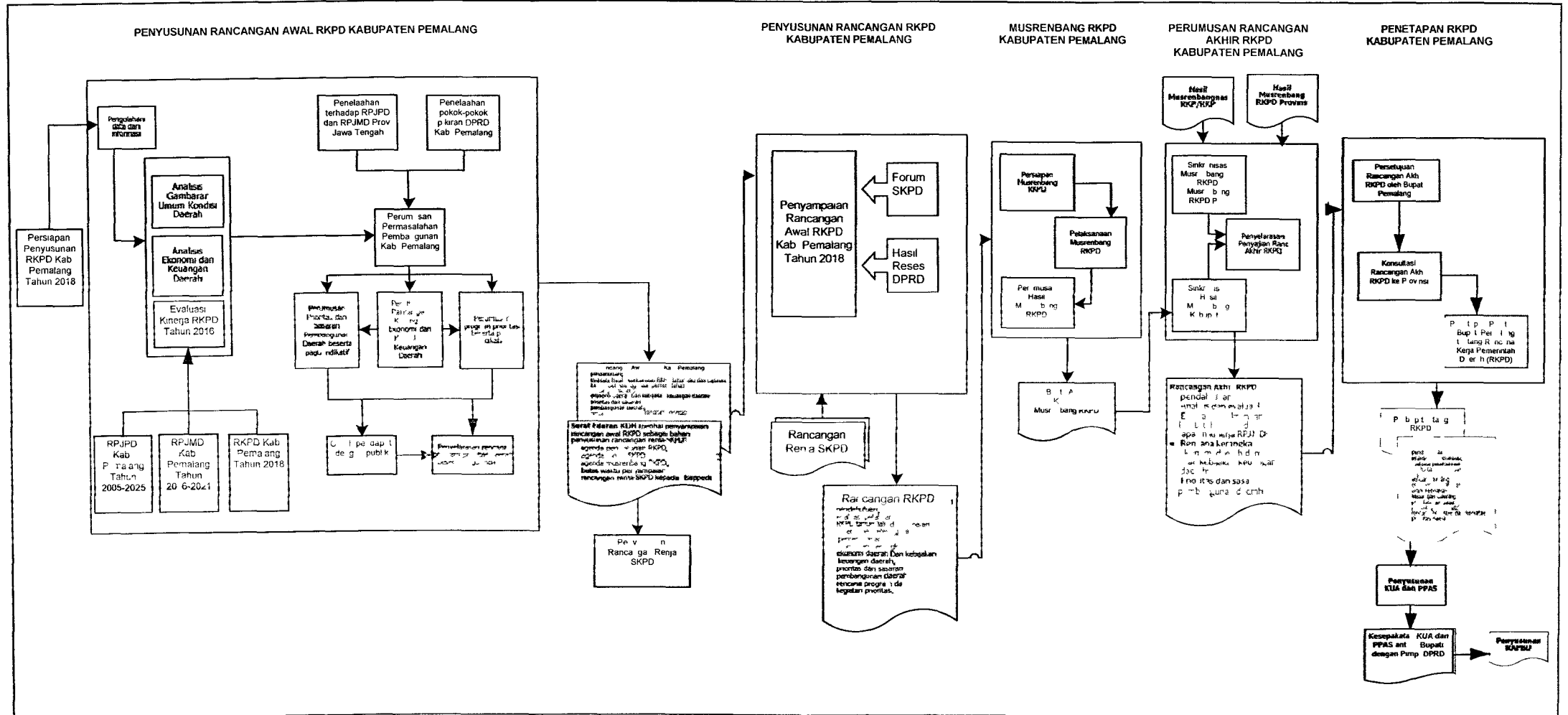
RKPD adalah rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan tahapan adalah sebagai berikut

- 1 Persiapan penyusunan RKPD  
Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
- 2 Penyusunan rancangan awal RKPD  
Meliputi 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan yaitu tahap perumusan rancangan awal RKPD dan tahap penyajian rancangan awal RKPD
- 3 Konsultasi Publik  
Pelaksanaan konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan Rancangan Awal RKPD
- 4 Penyusunan rancangan RKPD  
Pada tahapan ini meliputi kegiatan evaluasi rancangan awal RKP tahun rencana, verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD dan penyelarasan penyajian rancangan RKPD
- 5 Pelaksanaan musrenbang RKPD  
Merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD
- 6 Perumusan rancangan akhir RKPD  
Tahapan ini mencakup kegiatan evaluasi hasil Musrenbang Nasional RKP, sinkronisasi musrenbang RKPD dan penyelarasan rancangan akhir RKPD
- 7 Penetapan RKPD  
RKPD kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Adapun alur penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada gambar berikut

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang



# 98

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757),
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
- 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 13 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122),
- 14 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3),
- 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95),
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017,
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3),
- 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6),
- 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5),

- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1),
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3),
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9),
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12),
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13)

### 1.3 Hubungan antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak terlepas dari kerangka perencanaan pembangunan daerah provinsi dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan bagian dalam kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, serta berpedoman pada RKPD Provinsi untuk memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 mengamanatkan pencapaian Visi yaitu **Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**. Sementara itu visi pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005–2025 adalah **Jawa Tengah yang Mandiri, Maju,**

+ 30

**Sejahtera dan Lestari** Sedangkan visi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dalam RPJPD Kabupaten Pemalang 2005-2025 adalah **Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera** Secara umum amanat yang dikandung dalam visi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah maupun pembangunan Nasional merupakan wujud dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Pembukaan UUD tahun 1945

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 saat ini akan memasuki tahap ketiga periode tahun 2015-2019 dengan fokus pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat

Demikian pula dengan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 yang saat ini memasuki tahapan lima tahun ketiga (Tahun 2016 - 2020) dengan prioritas pembangunan daerah pada fokus

- 1 Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah,
- 2 Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah,
- 3 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur,
- 4 Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah,
- 5 Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat,
- 6 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum

Pokok-pokok pikiran di atas sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 yang dicapai melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah

Penyusunan RKPD juga berpedoman pada dokumen tata ruang yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah nasional, provinsi dan kabupaten Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah nasional, provinsi dan kabupaten

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang berada dalam koridor perencanaan teknis tata ruang yang termuat dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah berskala nasional, regional dan lokal Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional sebagaimana diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2008



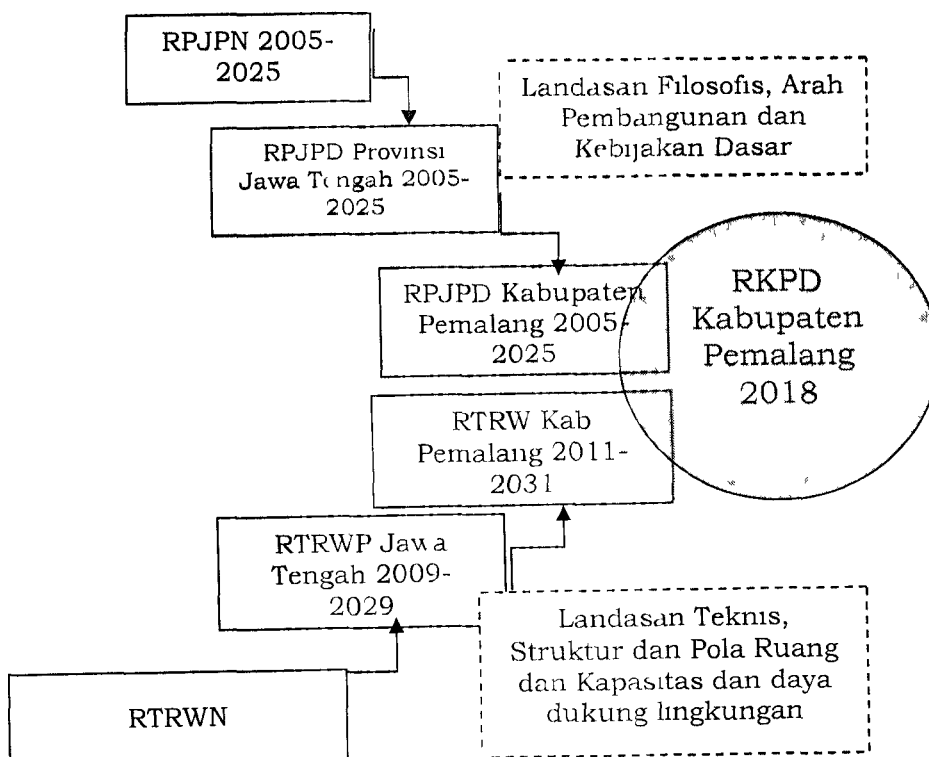
tentang RTRWN menempatkan Kabupaten Pemalang dalam kawasan yang mempunyai potensi pengembangan di bidang pertanian, industri, perikanan dan pertambangan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Kabupaten Pemalang masuk dalam wilayah Bregasmalang, yaitu Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Slawi (Kabupaten Tegal) dan Kabupaten Pemalang dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional Wilayah Kabupaten Pemalang secara teknis tata ruang Provinsi Jawa Tengah masuk dalam kawasan hutan produksi, hutan rakyat, peternakan, pertanian, perikanan tangkap dan budidaya, pertambangan mineral logam bukan logam, batuan dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, kawasan peruntukan industri serta kawasan pengembangan pariwisata C yang meliputi koridor Batang – Pekalongan – Pemalang – Tegal – Brebes

Sementara itu kebijakan tata ruang Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 antara lain menyebutkan bahwa

- 1 Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 27 513 Ha
- 2 Kawasan peruntukan hutan rakyat seluas 16 896 Ha
- 3 Kawasan peruntukan pertanian seluas 46 944 Ha
- 4 Kawasan peruntukan perkebunan seluas 15 713 Ha
- 5 Kawasan peruntukan perikanan tangkap hingga 12 (dua belas) mil dari garis pantai

**Gambar 1 2 Skema Hubungan Antar Dokumen**



499

#### **1 4 Kaidah Pelaksanaan**

- 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun dengan mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang yang terjadi, potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan
- 2 Mendasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 285 dan Permendagri Nomor 23 tahun 2013 pasal 11 ayat 1-3 berikut ketentuan dalam Lampiran I, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi
  - a Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah,
  - b Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,
  - c Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan,
  - d Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

#### **1 5 Sistematika Dokumen RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Antara lain memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, keterkaitan antar dokumen perencanaan, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD 2018

##### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan

# 90

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

### **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat, diuraikan dalam program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat

### **BAB VI PENUTUP**

Bab VI menjelaskan ulasan akhir tentang pentahapan, proses dan muatan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018

## **1 6 Maksud dan Tujuan**

Proses perencanaan membutuhkan kontinuitas untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan yang muaranya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa maksud penyusunan RKPD antara lain yaitu

- 1 Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional,
- 2 Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah,

- 3 Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018,
- 4 Mengarahkan proses penyusunan Renja dan RKA SKPD

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah

- 1 Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan pelaksanaan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah,
- 2 Untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah,
- 3 Untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah,
- 4 Sebagai acuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan LKPJ kepada DPRD,
- 5 Menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan,
- 6 Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah,
- 7 Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2 1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2 1 1 Aspek Geografi

Kabupaten Pemalang memiliki luas 1 115,30 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari lahan sawah seluas 383,51 Km<sup>2</sup> dan lahan bukan sawah seluas 731,79 Km<sup>2</sup> Wilayah Kabupaten Pemalang mencakup 14 kecamatan, 211 desa dan 11 kelurahan Berdasarkan posisi astronomis, Kabupaten Pemalang terletak pada koordinat 109° 17" 30" - 109° 40" 30" Bujur Timur dan 8° 52" 30" - 7° 20" 11' Lintang Selatan Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut

- a Sebelah Utara Laut Jawa
- b Sebelah Selatan Kabupaten Purbalingga
- c Sebelah Barat Kabupaten Tegal
- d Sebelah Timur Kabupaten Pekalongan

Luas wilayah tiap kecamatan seperti pada tabel dan gambar berikut

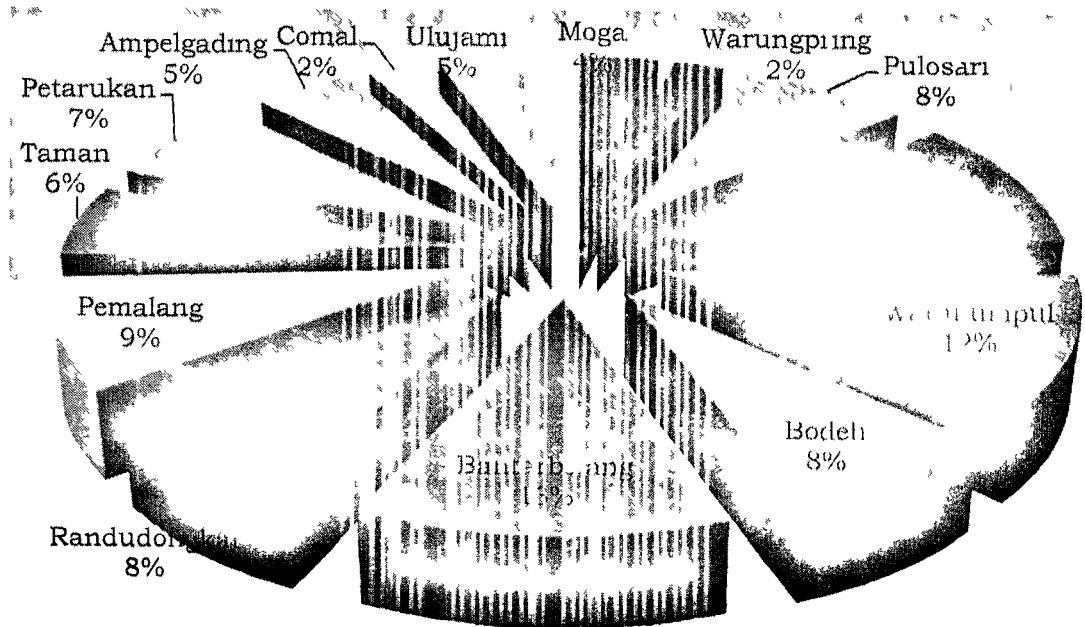
Tabel 2 1. Kecamatan menurut Luas Wilayah di Kabupaten Pemalang

Kecamatan	Luas Lahan (Km <sup>2</sup> )								Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah							
		Bangunan & Pekarangan	Tegalan / Kebun	Hutan Rakyat	Tambak / Kolam	Hutan Negara	Perkebunan	Lain-Lain	
Moga	13 99	8 34	7 50		-	4 48	1 89	5 20	41,40
Warungpring	11 49	5 33	3 15	3 00	-	0 88	0 65	1 81	26,31
Pulosari	2 39	10 47	42 17	1 90	-	28 91	-	1 68	87,52
Behk	25 60	18 65	31 28		0 02	43 72	1 32	3 94	124,54
Watukumpul	54 51	6 84	18 91	10 45	0 03	33 67	-	4 61	129,02
Bodeh	21 60	9 69	7 64	1 67	-	36 84	1 82	6 72	85,98
Bantarbo- lang	26 95	12 80	21 06		-	73 54	-	4 84	139,19
Randudong- kal	32 82	8 82	13 35		-	32 80	-	2 53	90,32
Pemalang	41 19	14 07	6 91		0 36	34 01	-	5 39	101,93
Taman	36 07	11 63	1 33	-	0 50	7 78	-	10 10	67,41
Petarukan	51 60	14 59	3 10		0 89		-	11 11	81,29
Ampelgading	26 05	8 33	2 23			1 30	-	15 39	53,30
Comal	11 15	10 80	1 02	-	-		-	3 58	26,54
Ulujami	21 73	10 46	7 65		14 06		3 15	3 49	60,55
<b>Jumlah</b>	<b>377 14</b>	<b>150 83</b>	<b>167 30</b>	<b>17 02</b>	<b>15 86</b>	<b>297 93</b>	<b>8 83</b>	<b>80 39</b>	<b>1 115,3 0</b>
				<b>738 16</b>					

Sumber Pemalang Dalam Angka 2015 BPS

# 9 8

**Gambar 2 1 Kecamatan menurut Luas Wilayah di Kabupaten Pemalang**



Sumber Pemalang Dalam Angka 2015, BPS

Menurut luas wilayah, lima kecamatan dengan wilayah terluas berturut-turut adalah Bantarbolang, Watukumpul, Belik, Pemalang dan Pulosari

Berdasarkan topografinya, Kabupaten Pemalang terdiri dari

- Daerah dataran pantai, yaitu daerah dengan ketinggian antara 1 – 5 meter di atas permukaan laut Daerah ini meliputi 18 desa dan 1 kelurahan terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Pemalang
- Daerah dataran rendah, yaitu daerah dengan ketinggian antara 6 – 15 meter di atas permukaan laut Daerah ini meliputi 98 desa dan 5 kelurahan terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Pemalang
- Daerah dataran tinggi, yaitu daerah dengan ketinggian antara 16 – 212 meter di atas permukaan laut Daerah ini meliputi 35 desa, terletak di bagian tengah dan selatan wilayah Kabupaten Pemalang
- Daerah pegunungan, terbagi menjadi dua yaitu
  - Daerah dengan ketinggian antara 213 – 924 meter di atas permukaan laut Daerah ini meliputi 55 desa, terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Pemalang
  - Daerah dengan ketinggian 925 meter di atas permukaan laut, terletak di bagian selatan meliputi 10 desa yang berbatsan dengan Kabupaten Purbalingga

Adapun jenis tanah di Kabupaten Pemalang antara lain adalah

- Tanah alluvial terutama terdapat di dataran rendah
- Tanah regosil terdiri dari batu-batuan pasir dan intermedier di daerah bukit sampai gunung
- Tanah lestasol terdiri dari batu bekuan pasir intermedier di daerah bukit sampai gunung

Temperatur di sekitar Kota Pemalang antara siang dan malam, maupun antara kemarau dan penghujan tidak banyak berbeda yaitu berkisar antara 30° C

# 90

Untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan kawasan lindung yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 Antara lain

a Kawasan hutan lindung

Distribusi peruntukan ruang bagi kawasan hutan lindung kurang lebih seluas 5 082 Ha, meliputi Kecamatan Bantarbolang (±53 Ha), Belik (±1 095 Ha), Moga (±195 Ha), Pulosari (±2 036 Ha) dan Watukumpul (±1 704 Ha)

b Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Berupa kawasan resapan air, dengan luas kurang lebih 6 609 Ha, meliputi Kecamatan Bantarbolang (±480 Ha), Belik (±2 669 Ha), Bodeh (±200 Ha), Moga (±327 Ha), Pulosari (±180 Ha), Randudongkal (±170 Ha), Warungpring (±70 Ha) dan Watukumpul (±2 514 Ha)

c Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas

- 1 Sempadan pantai, antara lain di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan dan Ulujami
- 2 Sempadan sungai, ada di semua kecamatan yang dilalui Sungai Waluh, Rambut dan Comal
- 3 Kawasan sekitar mata air, meliputi 7 (tujuh) kecamatan antara lain Kecamatan Randudongkal, Belik, Moga, Warungpring, Pulosari, Bantarbolang dan Pemalang

d Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, terdiri dari

- 1 Cagar alam, ada di 3 (tiga) kecamatan yaitu Bantarbolang, Moga dan Belik
- 2 Cagar budaya, antar lain di Kecamatan Pemalang, Randudongkal, Moga, Watukumpul, Belik dan Pulosari
- 3 Kawasan muara sungai (estuari), di 4 (empat) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Petarukan dan Ulujami
- 4 Kawasan pantai berhutan bakau, di Kecamatan Pemalang, Petarukan dan Ulujami

e Kawasan rawan bencana alam, terdiri dari

- 1 Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi, ada di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan dan Ulujami
- 2 Kawasan rawan banjir, di Kecamatan Comal, Pemalang, Petarukan, Ampelgading, Taman dan Ulujami
- 3 Kawasan rawan kekeringan di Kecamatan Pulosari dan Belik
- 4 Kawasan rawan angin topan, meliputi Kecamatan Belik, Watukumpul, Bodeh, Randudongkal, Bantarbolang, Ampelgading
- 5 Kawasan rawan tanah longsor, antara lain Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga, Randudongkal dan sepanjang alur DAS Comal
- 6 Kawasan rawan letusan gunung berapi, antara lain Kecamatan Pulosari dan Belik
- 7 Kawasan rawan bencana lainnya, yaitu kawasan rawan petir dan kawasan rawan kebakaran yang tersebar di semua kecamatan

\* 9/8

- f Kawasan lindung geologi  
Terdiri dari kawasan imbunan air yang meliputi kawasan resapan air tanah pada
  - 1 CAT Pekalongan – Pemalang Dan
  - 2 CAT Lebaksiu
- g Kawasan lindung lainnya, yang terdiri dari kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan dan perairan, yang tersebar di semua kecamatan

Kabupaten Pemalang kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara terencana dan terarah, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia. Kawasan budidaya meliputi

- a Kawasan peruntukan hutan produksi, kurang lebih seluas 27 513 Ha terdapat di 11 kecamatan antara lain Ampelgading, Bantarbolang, Belik, Bodeh, Moga, Pemalang, Pulosari, Randudongkal, Taman, Warungpring dan Watukumpul
- b Kawasan peruntukan hutan rakyat, dengan luas kurang lebih 18 473 Ha tersebar di hampir semua kecamatan kecuali Kecamatan Petarukan
- c Kawasan peruntukan pertanian, terdiri dari
  - 1 Kawasan tanaman pangan, yang meliputi
    - Kawasan sawah irigasi, seluas kurang lebih 30 299 Ha tersebar di hampir semua kecamatan kecuali Kecamatan Pulosari
    - Kawasan sawah bukan irigasi, kurang lebih seluas 7 316 Ha ada di 8 (delapan) kecamatan yaitu Belik, Bodeh, Moga, Pulosari, Randudongkal, Ulujami, Warungpring dan Watukumpul
  - 2 Kawasan hortikultura, dengan luas kurang lebih 9 329 Ha, tersebar di hampir semua kecamatan kecuali Kecamatan Comal
- d Kawasan peruntukan perkebunan, dengan luas area kurang lebih 15 713 Ha, terdiri dari
  - 1 Kawasan perkebunan rakyat, seluas kurang lebih 13 850 Ha, tersebar di semua kecamatan
  - 2 Kawasan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan, dengan luas area kurang lebih 1 863 Ha, tersebar di 8 (delapan) kecamatan antara lain Petarukan, Ulujami, Randudongkal, Moga, Belik, Bodeh, Ampelgading dan Pulosari
- e Kawasan peruntukan perikanan, meliputi perikanan tangkap, budidaya tambak, budidaya air tawar serta pengolahan perikanan tersebar di 12 kecamatan, kecuali Kecamatan Warungpring dan Pulosari
- f Kawasan peruntukan pertambangan, antara lain pasir-batu (sirtu) dan tanah urug, tanah liat, batu gamping, batu sabak, kaolin, tras, diorit, andesit, marmer, oker serta kalsit. Kawasan pertambangan tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan antara lain Pemalang, Petarukan, Bodeh, Ampelgading, Randudongkal, Watukumpul, Warungpring, Belik dan Pulosari
- g Kawasan peruntukan industri, meliputi industri besar (manufaktur dan pergudangan), industri menengah dan industri kecil/mikro (pengolahan hasil pertanian, industri batik, konveksi, kerajinan kreatif, makanan dan pertambangan). Peruntukan kawasan industri kurang lebih seluas 664 Ha, tersebar di 8 (delapan) kecamatan,



- antara lain Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, Ulujamu, Belik, Randudongkal dan Moga
- h Kawasan peruntukan pariwisata, baik pariwisata alam, budaya maupun buatan tersebar di 11 (sebelas) kecamatan antara lain Pemalang, Petarukan, Ulujamu, Bantarbolang, Randudongkal, Belik, Moga, Watukumpul, Pulosari, Taman dan Ulujamu
  - i Kawasan peruntukan permukiman, terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan Untuk kawasan permukiman perkotaan ada pada hampir semua kecamatan kecuali Kecamatan Taman
  - j Kawasan peruntukan lainnya, terdiri atas kawasan peternakan, agropolitan, ruang terbuka hijau perkotaan, kawasan pesisir serta kawasan pertahanan dan keamanan Hampir semua kawasan tersebut merata ada di semua kecamatan Kecuali kawasan pesisir yang hanya ada di 4 (empat) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Petarukan dan Ulujamu

### 2 1 2. Aspek Demografi

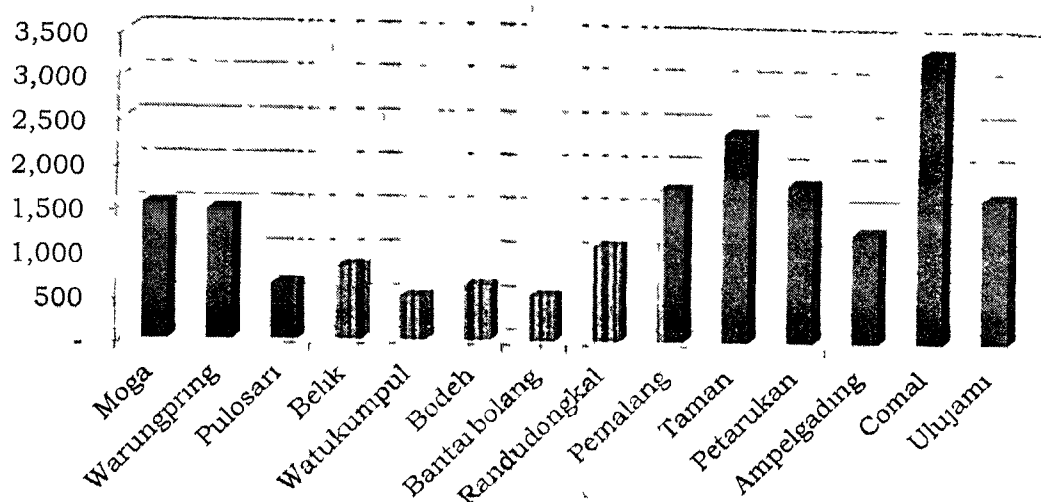
Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tercatat sebesar 1 292 573 jiwa Kecamatan Pemalang sebagai ibu kota kabupaten memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 177 602 atau sekitar 13,74 persen dari total penduduk Kabupaten Pemalang Kecamatan Comal memiliki kepadatan tertinggi yaitu sebesar 3 346 per Km<sup>2</sup> yang artinya setiap 1 Km<sup>2</sup> didiami oleh sekitar 3 346 orang, diikuti oleh Kecamatan Taman dan Petarukan

**Tabel 2 2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan per Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2016**

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan per Km <sup>2</sup>
1 Moga	41,41	63 476	1 533
2 Warungpring	26,31	38 846	1 476
3 Pulosari	87,52	55 855	638
4 Belik	124,54	104 452	839
5 Watukumpul	129,02	64 772	502
6 Bodeh	85,98	54 503	634
7 Bantarbolang	139,19	71 856	516
8 Randudongkal	90,32	97 430	1 079
9 Pemalang	101,93	177 602	1 742
10 Taman	67,41	161 742	2 399
11 Petarukan	81,29	146 760	1 805
12 Ampelgading	53,30	66 468	1 247
13 Comal	26,54	88 804	3 346
14 Ulujamu	60 55	100 006	1 652
<b>Jumlah</b>	<b>1 115,30</b>	<b>1 292 573</b>	<b>1 159</b>

Sumber Indikator Penting Pembangunan Daerah kabupaten Pemalang 2016, BPS

**Gambar 2.2** Kepadatan per Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2016



**Tabel 2.3** Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2016

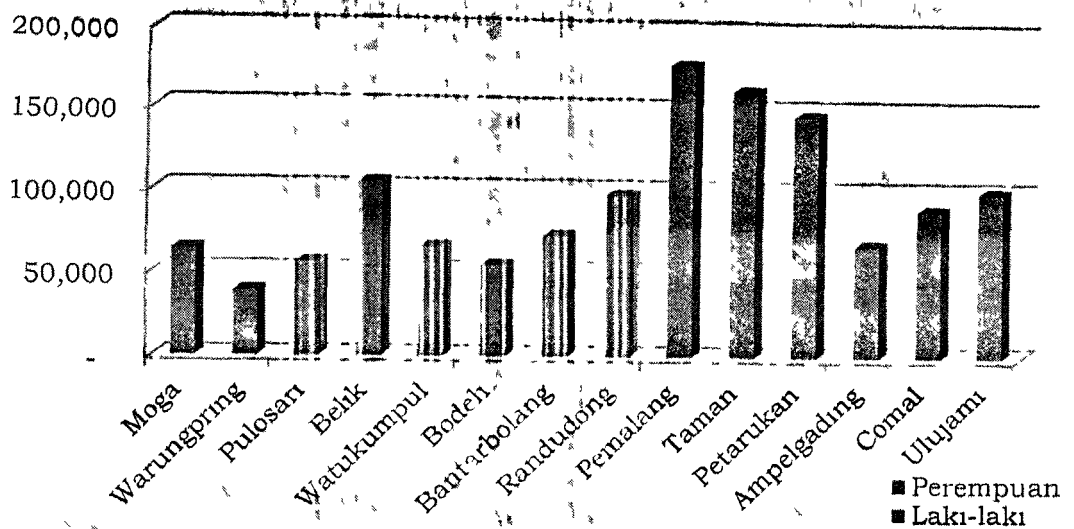
Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin	Angka Ketergantungan (Dependency Ratio)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1 Moga	31 501	31 975	63 476	98,52	59,97
2 Warungpring	19 175	19 671	38 846	97,48	57,44
3 Pulosari	27 703	28 152	55 855	98,41	50,95
4 Belik	52 415	52 037	104 452	100,73	53,75
5 Watukumpul	32 222	32 551	64 772	98,99	56,23
6 Bodeh	27 103	27 400	54 503	98,92	52,81
7 Bantarbolang	34 626	37 229	71 856	93,01	52,83
8 Randudongkal	47 504	49 927	97 430	95,15	50 07
9 Pemalang	87 907	89 695	177 602	98,01	46,84
10 Taman	80 234	81 508	161 742	98,44	50,04
11 Petarukan	72 663	74 098	146 760	98,06	50,90
12 Ampelgading	32 717	33 751	66 468	96,94	51,08
13 Comal	44 170	44 633	88 804	98,96	47,09
14 Ulujamu	49 856	50 150	100 006	99,41	52,18
<b>Jumlah</b>	<b>639 797</b>	<b>652 776</b>	<b>1 292 573</b>	<b>98,01</b>	<b>51,28</b>

Sumber: Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang 2016, BPS

Secara rata-rata, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki, dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,01. Hal ini dimaknai bahwa terdapat 98 penduduk laki-laki tiap 100 penduduk perempuan.

Handwritten marks: a star symbol and some illegible scribbles.

**Gambar 2 3 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2016**



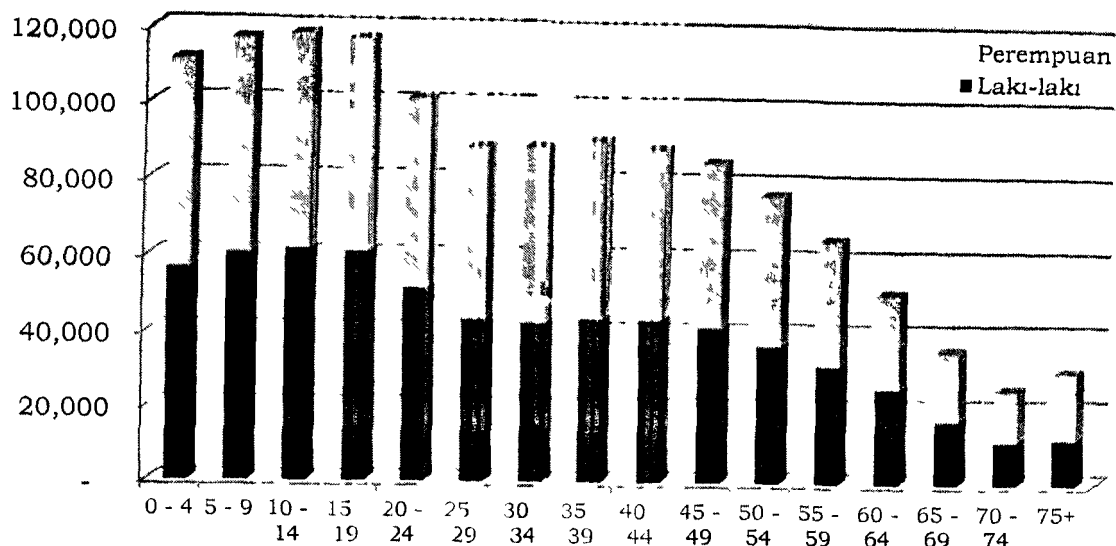
**Tabel 2 4 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kelompok Umur di Kabupaten Pemalang Tahun 2016**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	56 510	54 845	111 355
5 - 9	60 461	56 581	117 042
10 - 14	61 723	56 859	118 582
15 - 19	61 065	56 260	117 325
20 - 24	51 334	50 060	101 394
25 - 29	43 378	45 348	88 726
30 - 34	42 403	46 546	88 949
35 - 39	43 547	47 151	80 698
40 - 44	43 435	45 265	88 700
45 - 49	41 465	43 915	85 380
50 - 54	36 746	40 224	76 970
55 - 59	31 727	33 620	65 347
60 - 64	25 518	25 440	50 958
65 - 79	17 051	18 588	35 639
70 - 74	11 361	13 944	25 305
75+	12 073	18 130	30 203
<b>Jumlah</b>	<b>639 797</b>	<b>652 776</b>	<b>1 292 573</b>

Sumber Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang 2016, BPS

9  
8

**Gambar 2.4. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kelompok Umur di Kabupaten Pemalang Tahun 2016**



Berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 10 – 14 tahun berjumlah terbanyak yaitu 118 582 atau sekitar 9,38% dari total jumlah penduduk Kabupaten Pemalang. Didukung oleh kelompok umur 5 – 9 tahun, 15 - 19 tahun dan 5 – 9 tahun.

**2 1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan pada 9 (sembilan) indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB per Kapita, Indeks Gini, persentase penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka. Perkembangan realisasi capaian indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi, biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016*
Pertumbuhan Ekonomi	5,32	5,57	5,53	5,50	

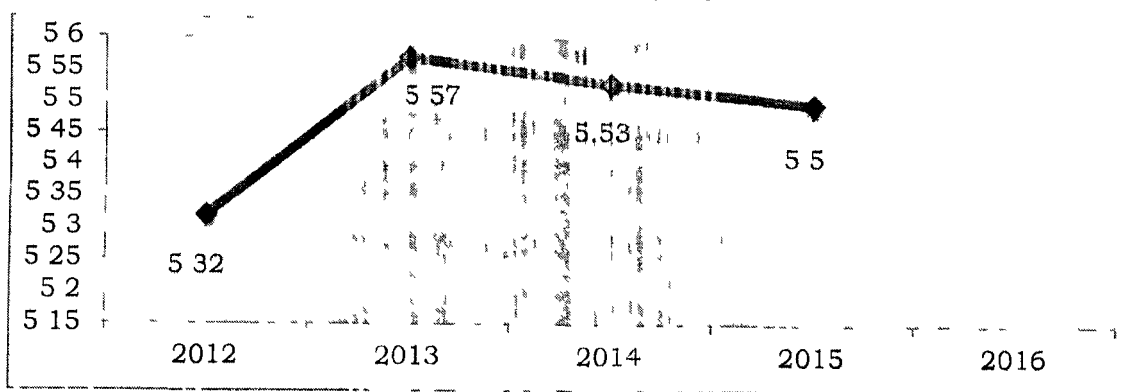
Sumber: LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017  
\* = data belum tersedia

9

0

4

**Gambar 2 5. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016**



## 2 Laju Inflasi

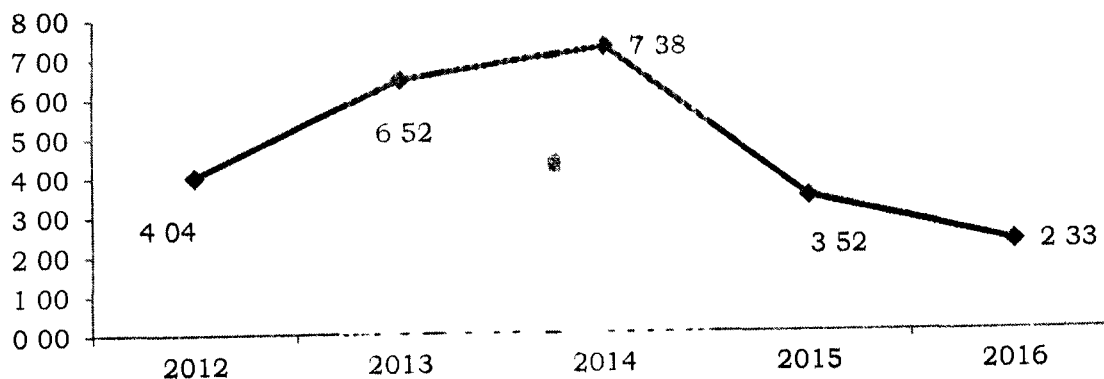
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Berikut adalah laju inflasi Kabupaten Pemalang selama tahun 2012-2016

**Tabel 2 6. Laju Inflasi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Laju Inflasi	4,04	6,52	7,38	3,52	2,33

Sumber: Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, BPS, 2016

**Gambar 2 6 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



## 3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita dihitung dari seluruh nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah dibagi jumlah penduduk daerah tersebut. PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, PDRB per kapita Kabupaten Pemalang menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seperti terlihat pada Gambar 2 7 di bawah ini. Hal ini menggambarkan

9  
8

bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang semakin meningkat

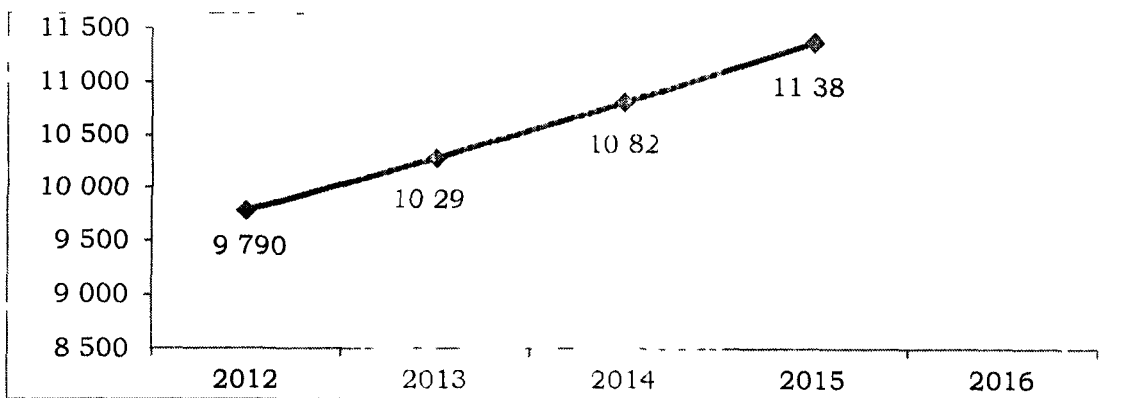
**Tabel 2 7 PDRB per Kapita Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016 (Juta Rupiah)**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016*
PDRB per Kapita	9,79	10,29	10,82	11,38	

Sumber Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, BPS, 2016

\* = data belum tersedia

**Gambar 2 7 Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016 (juta rupiah)**



#### 4 Indeks Gini

Distribusi pendapatan (*income distribution*) merupakan salah satu indikator penting perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi daerah yang baik tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. Distribusi pendapatan yang relatif baik ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antar golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu menyolok dalam perekonomian daerah yang bersangkutan.

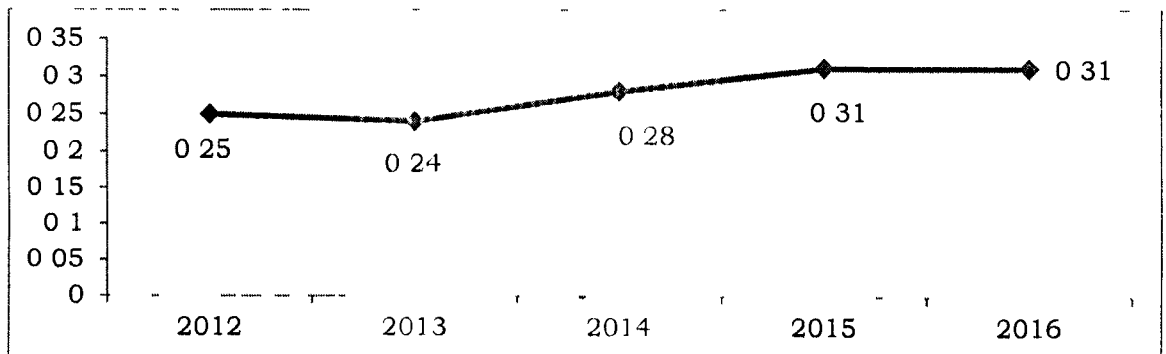
Interpretasi bila angka yang diperoleh mendekati angka nol, maka distribusi pendapatan dikatakan sangat merata. Sedangkan bila angka mendekati satu maka sangat timpang.

**Tabel 2.8. Indeks Gini Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Gini	0,25	0,24	0,28	0,31	0,31

Sumber Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang BPS, 2016

**Gambar 2.8. Perkembangan Gini Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



**5 Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan**

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) Konsep ini merupakan metode resmi yang digunakan oleh pemerintah untuk menghitung kemiskinan Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin

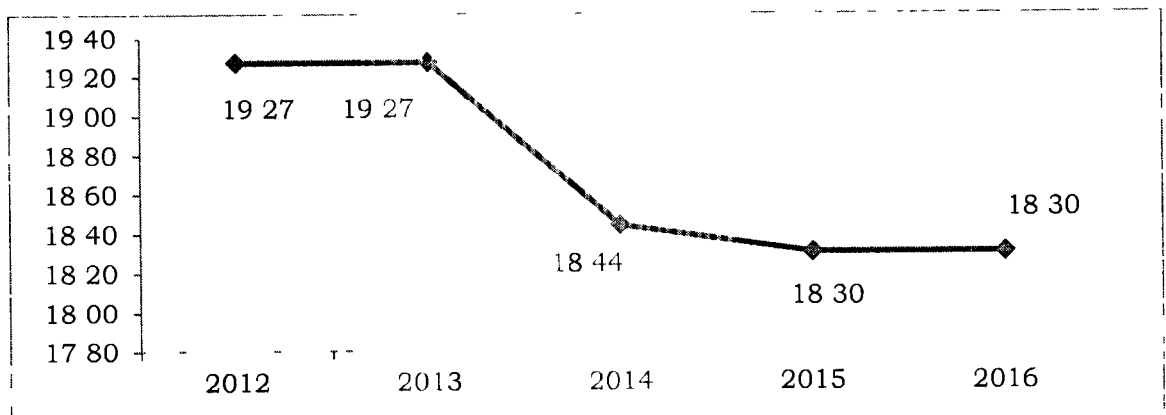
Dalam kurun waktu 2012-2016, persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Pemalang cenderung turun

**Tabel 2.9 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Penduduk Miskin	19,27	19,27	18,44	18,30	18,30

Sumber Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, BPS, 2016

**Gambar 2.9 Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



\* 9/8

## 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choices of people). Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme-UNDP*)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

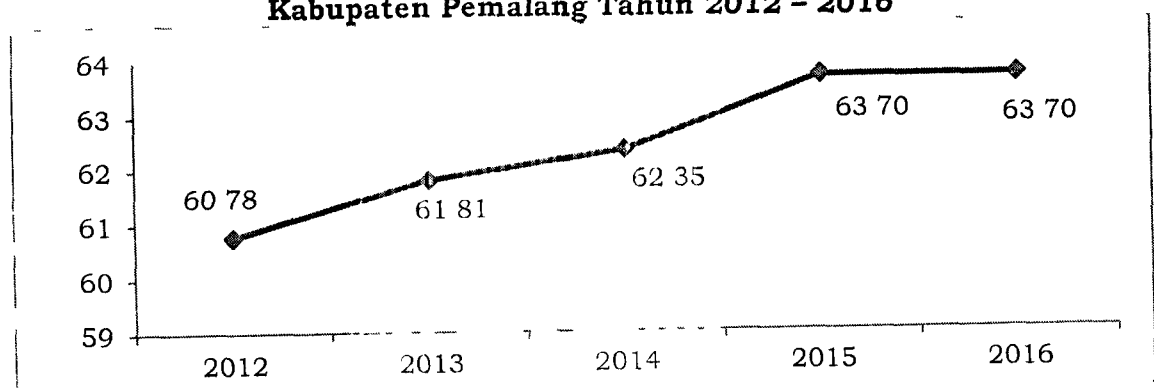
**Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Pembangunan Manusia	60,78	61,81	62,35	63,70	63,70

Sumber: Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, BPS, 2016

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Pemalang selama lima tahun terakhir adalah

**Gambar 2.10 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



Adapun perkembangan capaian masing-masing indikator komposit IPM Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut indikator kompositnya sebagai berikut

# 30



**a. Rata-Rata Lama Sekolah - Mean Years of Schooling**

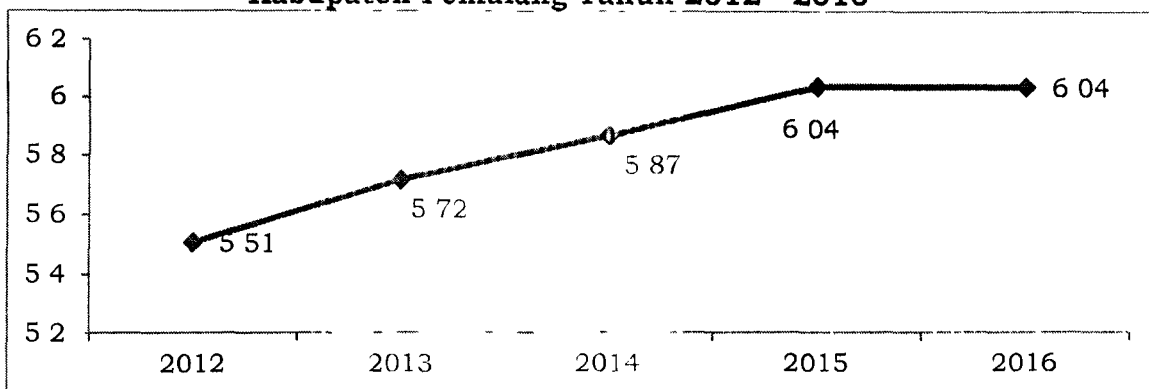
RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun ke atas proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan UNDP.

**Tabel 2.11 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rata-rata Lama Sekolah	5,51	5,72	5,87	6,04	6,04

Sumber: Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang BPS, 2016

**Gambar 2.11 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



**b. Harapan Lama Sekolah - Expected Years of Schooling**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

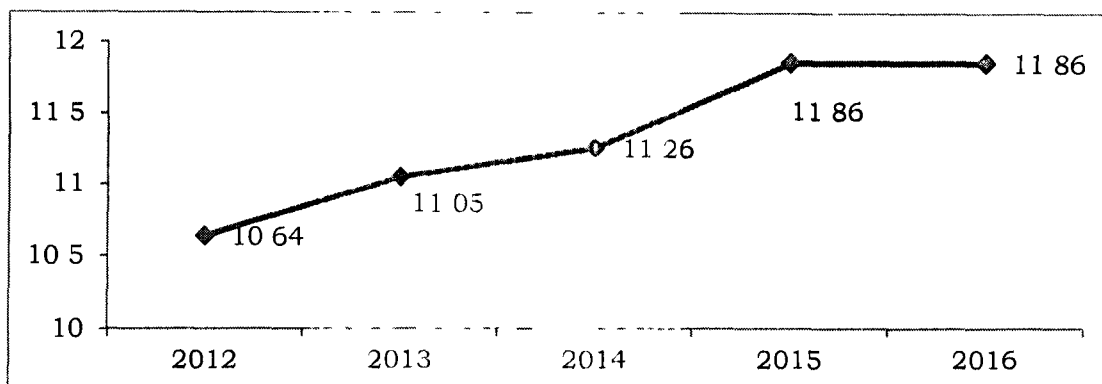
**Tabel 2.12 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Harapan Lama Sekolah	10,64	11,05	11,26	11,86	11,86

Sumber: Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang BPS, 2016

**Gambar 2.12 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2015**

# 970



**c. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) - Life Expectancy**

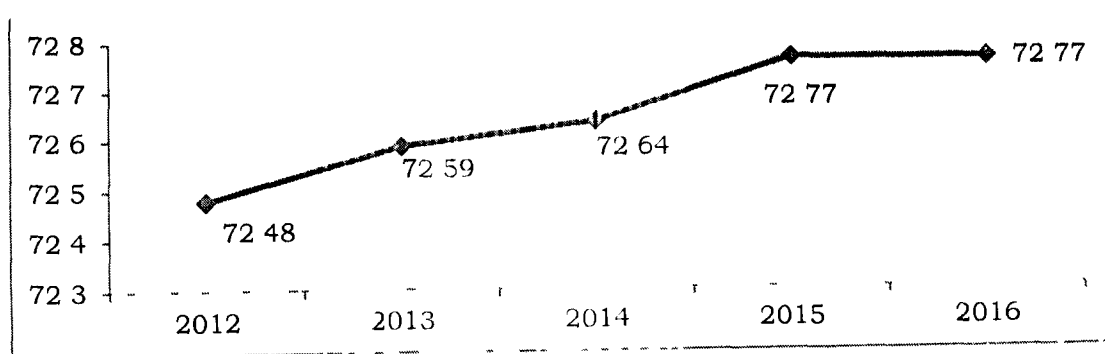
AHH ini menggambarkan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka UHH pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya.

**Tabel 2 13 Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup saat Lahir	72,48	72,59	72,64	72,77	72,77

Sumber: Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, BPS, 2016

**Gambar 2 13 Angka Harapan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016**



# 978

**d Pengeluaran per Kapita Disesuaikan - Purchasing Power Parity (PPP)**

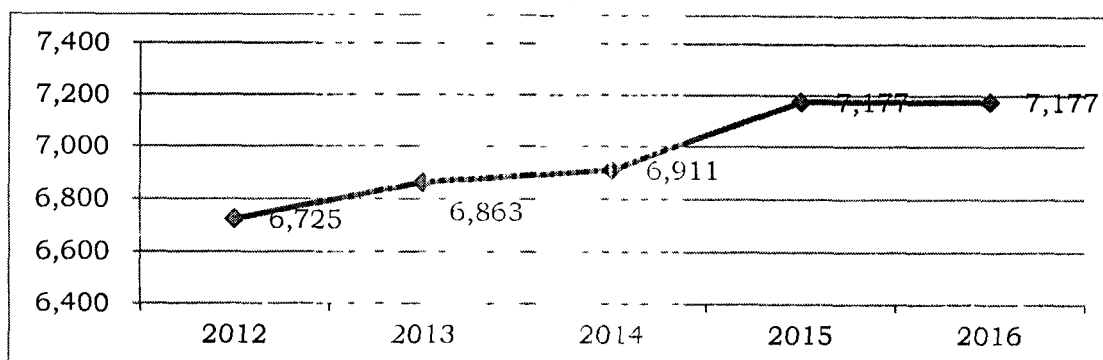
Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli

**Tabel 2 14 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	6 725	6 863	6 911	7 177	7 177

Sumber Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, BPS, 2016

**Gambar 2.14 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016**



Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Pantura, maka posisi IPM kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut

**Tabel 2 15 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Karesidenan Pekalongan Tahun 2012 - 2015**

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Batang	63,09	63,6	64,07	65,46
Pekalongan	65,33	66,26	66,98	67,40
Pemalang	60,78	61,81	62,35	63,70
Tegal	62,67	63,50	64,10	65,04
Brebes	60,92	61,87	62,55	63,18
Kota Pekalongan	69,95	70,82	71,53	72,69
Kota Tegal	70,68	71 44	72,20	72,96

# 90

### 7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

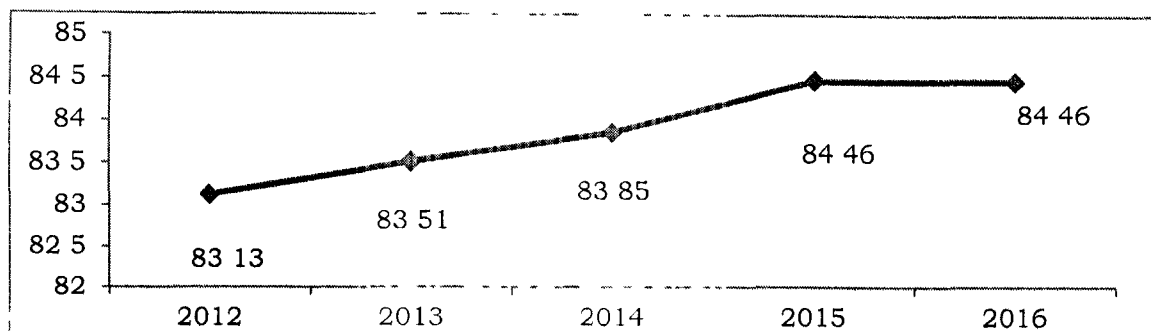
Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan

**Tabel 2 16. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Pembangunan Gender	83,13	83,51	83,85	84,46	84,46

Sumber Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, BPS, 2016

**Gambar 2 15 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pemalang Tahun 2010 - 2016**



### 8 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan, dan sumbangan pendapatan

Selama periode Tahun 2012 - 2016 IDG Kabupaten Pemalang senantiasa cukup fluktuatif sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini Namun secara umum gambaran capaian IDG ini mengandung arti bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan semakin besar Sedikit menurunnya capaian IDG Tahun 2014 dibanding Tahun 2013 disebabkan menurunnya keterwakilan perempuan dalam parlemen

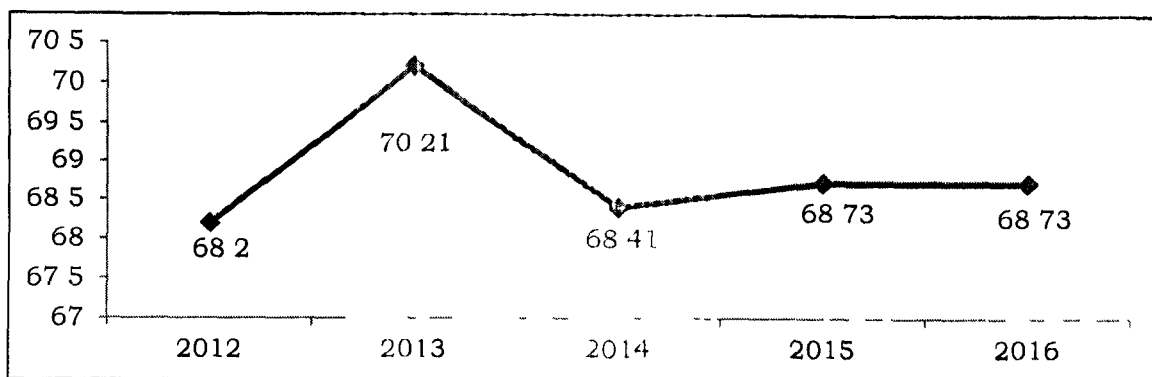
**Tabel 2 17 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Pemberdayaan Gender	68,2	70,21	68,41	68,73	68,73

Sumber Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, BPS, 2016

# 90

**Gambar 2 16 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



### 9 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Alasannya jelas karena tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, dan demikian pula sebaliknya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

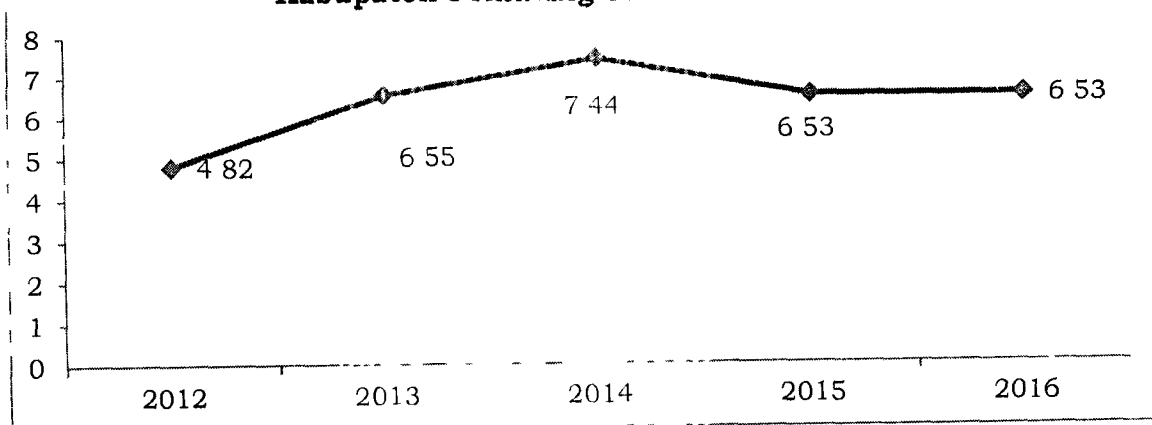
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan,
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha,
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan,
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

**Tabel 2.18. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,82	6,55	7,44	6,53	6,53

Sumber: Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, BPS, 2016, LKPJ 2017

**Gambar 2 17 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016**



#### 2.1 4. Aspek Pelayanan Umum

Untuk mengukur kinerja Aspek pelayanan umum, didasarkan 49 (empat puluh sembilan) indikator, yaitu

##### 1. Angka Kelulusan SD/MI

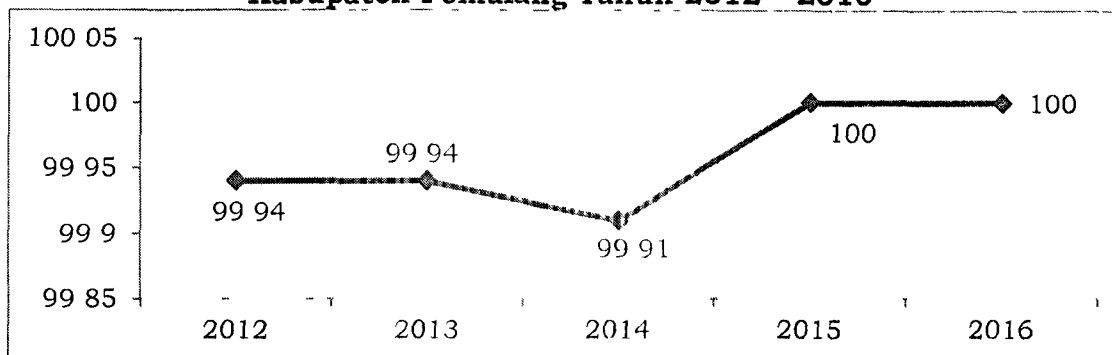
Angka Kelulusan SD/MI merupakan perbandingan antara jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya

**Tabel 2 19 Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Kelulusan SD/MI (%)	99,94	99,94	99,91	100	100

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**Gambar 2 18 Perkembangan Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



##### 2. Angka Kelulusan SMP/MTs

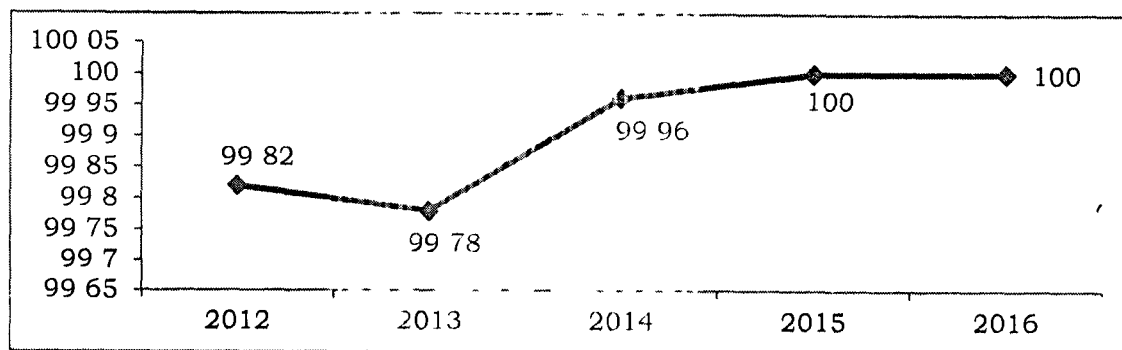
Angka Kelulusan SMP/MTs diperoleh dari perbandingan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs dibanding dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/Mts pada tahun sebelumnya

**Tabel 2 20 Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99,82	99,78	99,96	100	100

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**Gambar 2 19 Perkembangan Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



**3 Angka Melanjutkan SD/MI**

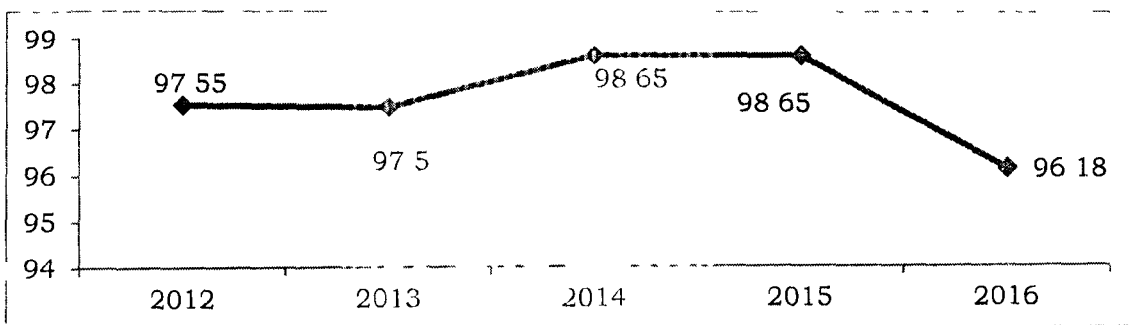
Angka melanjutkan SD/MI merupakan jumlah siswa baru tingkat SMP atau sederajat dibanding dengan jumlah lulusan jenjang SD atau sederajat pada tahun sebelumnya

**Tabel 2.21 Angka Melanjutkan SD/MI Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Melanjutkan SD/MI (%)	97,55	97,50	98,65	98,65	96,18

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**Gambar 2 20 Perkembangan Angka Melanjutkan SD/MI Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



**4 Angka Melanjutkan SMP/MTs**

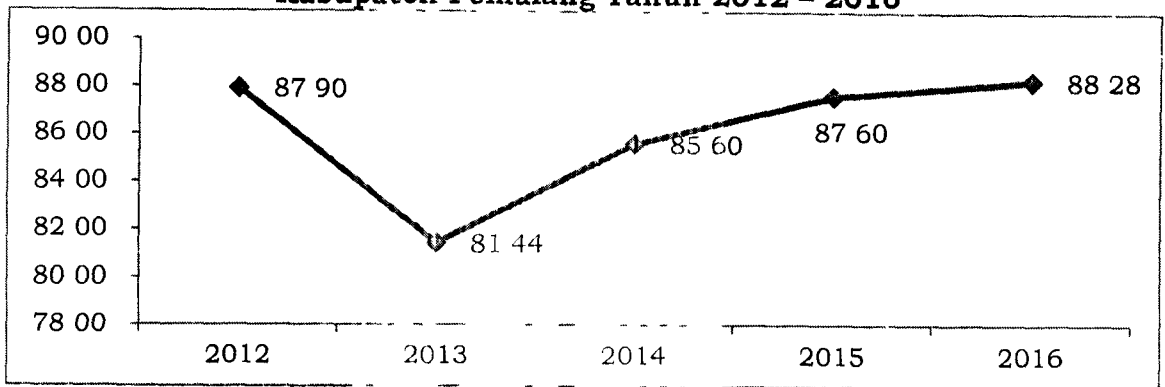
Angka melanjutkan SMP/MTs merupakan jumlah siswa baru tingkat SMA atau sederajat dibanding dengan jumlah lulusan jenjang SMP atau sederajat pada tahun sebelumnya

**Tabel 2 22 Angka Melanjutkan SMP/MTs Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Melanjutkan SMP/MTs (%)	87,90	81,44	85,60	87,60	88,28

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**Gambar 2 21 Perkembangan Angka Melanjutkan SMP/MTs Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



### 5 Angka Kunjungan ke Perpustakaan

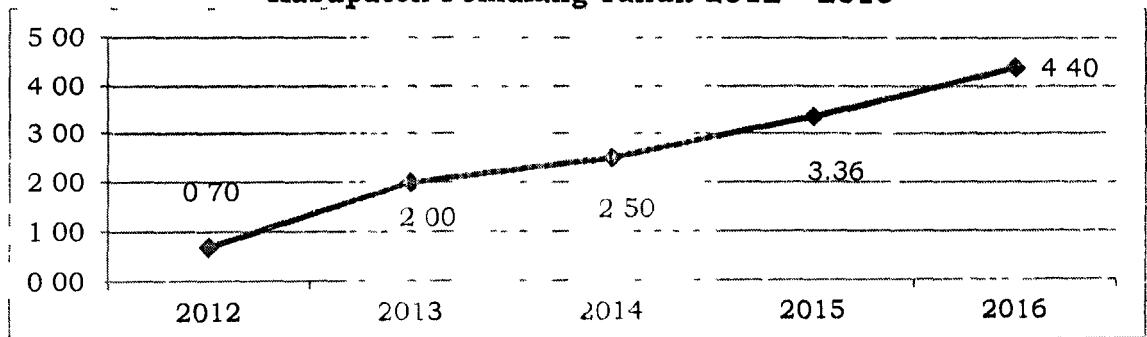
Angka Kunjungan ke Perpustakaan dihitung dari jumlah kunjungan ke perpustakaan pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah kunjungan ke perpustakaan pada tahun sebelumnya

**Tabel 2 23 Angka Kunjungan ke Perpustakaan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Kunjungan ke Perpustakaan	0,70	2,0	2,5	3,36	4,40

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**Gambar 2 22 Perkembangan Angka Kunjungan ke Perpustakaan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



### 6 Usia Harapan Hidup

Penghitungan indikator Usia Harapan Hidup diperoleh dari perbandingan antara jumlah usia penduduk meninggal dengan jumlah penduduk yang meninggal

**Tabel 2 24 Usia Harapan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016*
Usia Harapan Hidup	72,84	72,59	72,64	72,77	72,77

Sumber Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang BPS, 2016



### 7. Angka Kematian Ibu

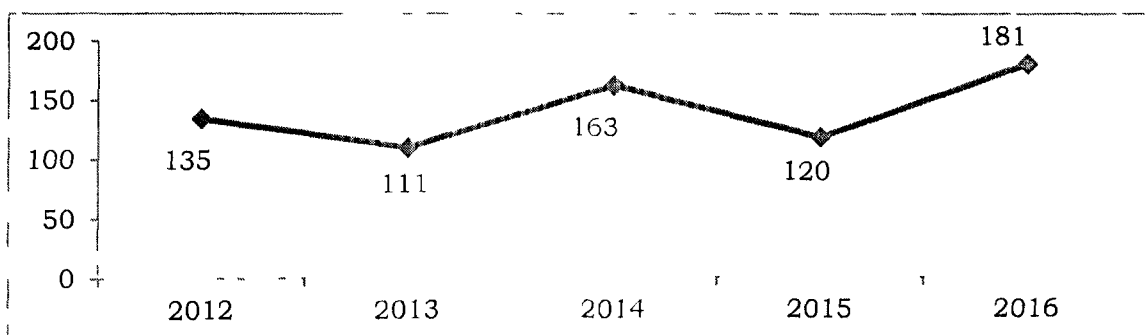
Angka Kematian Ibu (AKI ) atau *Maternal Mortality Rate* adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100 000 kelahiran hidup pada masa tertentu Yang dimaksud dengan Kematian Ibu disini adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan

**Tabel 2.25. Angka Kematian Ibu Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
AKI per 100 000 KLH	135	111	163	120	181

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**Gambar 2 23 Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



### 8 Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian Bayi merupakan kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1 000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu

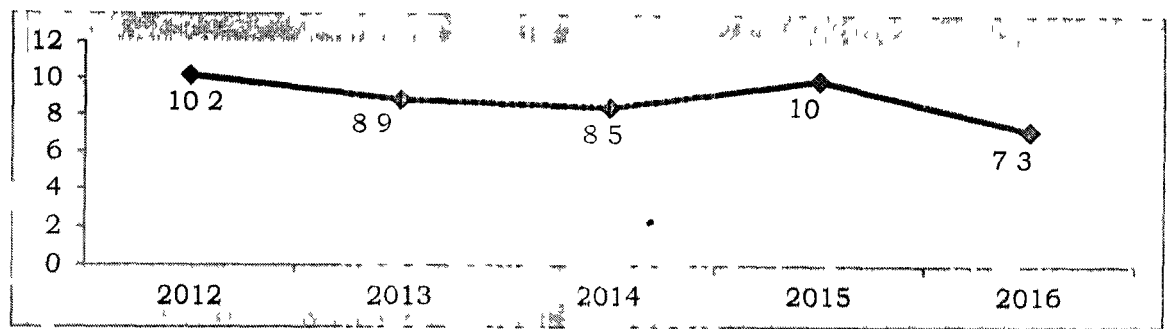
**Tabel 2 26 Angka Kematian Bayi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Kematian Bayi	10,2	8,9	8,5	10	7,3

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

# 9 0

**Gambar 2 24 Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



Pada tahun 2016 sebesar 7,9 artinya terdapat sekitar 7 atau 8 bayi meninggal pada setiap 1 000 kelahiran

### 9 Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABa) merupakan Angka kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan per 1 000 kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Angka ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah kematian balita (bayi dan anak balita yang meninggal usia 0-59 bulan) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1 000

**Tabel 2.27. Angka Kematian Balita Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Kematian Balita	na	na	na	11	9

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

### 10. Persentase Balita Gizi Buruk

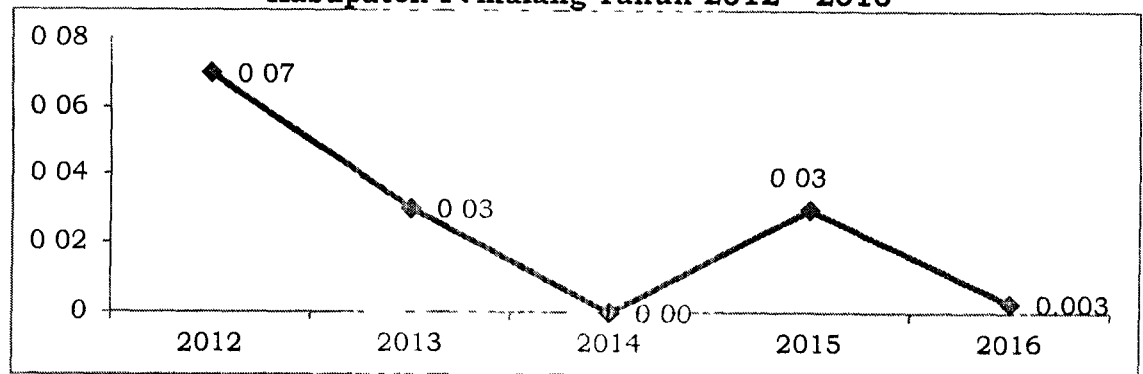
Merupakan persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita

**Tabel 2 28 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Balita Gizi Buruk	0,07	0,03	0,00	0,030	0,003

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**Gambar 2 25 Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



### 11. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam ber-KB. TFR dihitung dari jumlah peserta program KB aktif pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah pasangan usia subur pada tahun tersebut.

**Tabel 2 29 Total Fertility Rate Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Total Fertility Rate	na	na	na	2,49	2,55

Sumber: LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

### 12. Persentase PMKS yang Tertangani

Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi para PMKS.

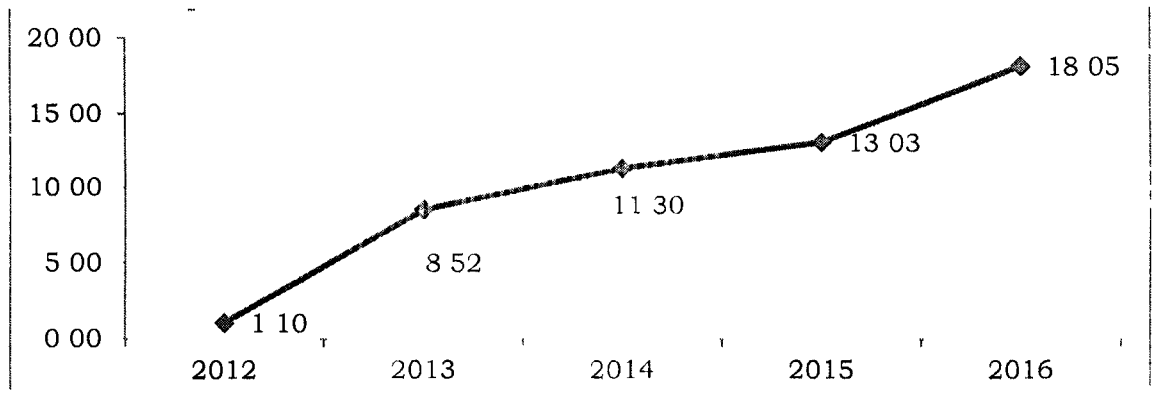
Indikator penanganan PMKS menggambarkan jumlah PMKS yang tertangani dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada. Selama kurun waktu 2012 - 2016, capaian indikator ini senantiasa menunjukkan kecenderungan positif meningkat seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

**Tabel 2.30 Persentase PMKS yang Tertangani Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase PMKS yang Tertangani	1,10	8,52	11,30	13,03	18,05

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**Gambar 2.26 Perkembangan Persentase PMKS yang Tertangani Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



### 13. Persentase Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.

Persentase Kepemilikan KTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Capaian indikator ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun yang ber-KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun atau yang telah menikah.

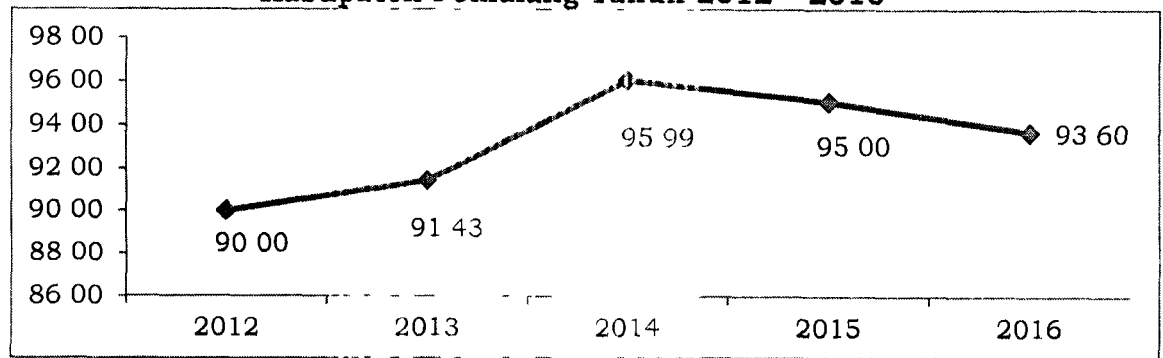
**Tabel 2.31 Persentase Kepemilikan KTP Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Kepemilikan KTP	90	91,43	95,99	95	93,6

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

✱ 9

**Gambar 2 27 Perkembangan Persentase Kepemilikan KTP Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



**14. Persentase Anak Memiliki Akta Kelahiran**

Indikator ini dihitung dari jumlah anak (0 - 18 tahun) yang memiliki akte kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun

**Tabel 2.32 Persentase Anak Memiliki Akta Kelahiran Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Anak Memiliki Akta Kelahiran	n a	n a	n a	80	81,49

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**15. Produktivitas Padi**

Indikator ini menunjukkan kemampuan hasil panen dalam satuan luas per hektar. Dihitung dari produktivitas padi (dalam kwintal) dibagi dengan luas area tanaman padi

**Tabel 2.33. Produktivitas Padi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Produktivitas Padi	58,64	66,25	64,08	57	57,96

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**16. Produktivitas Jagung**

Jagung adalah salah satu komoditas pangan alternatif selain padi (beras). Produktivitas jagung diperoleh dengan cara menghitung jumlah produksi jagung (dalam kwintal) dibagi dengan luas area tanaman jagung

**Tabel 2 34 Produktivitas Jagung Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Produktivitas Jagung	n a	n a	n a	54,72	60,96

Sumber LKPJ 2013 LKPJ 2014 LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

# 98

### 17 Produktivitas Kedelai

Produktivitas kedelai diperoleh dengan cara menghitung jumlah produksi kedelai (dalam kwintal) dibagi dengan luas area tanaman jagung (hektar)

**Tabel 2 35 Produktivitas Kedelai  
Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Produktivitas Kedelai	n a	n a	n a	11,83	15,12

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

### 18 Produksi Komoditas Peternakan Utama

**Tabel 2 36 Produksi Komoditas Peternakan Utama  
Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi Komoditas Peternakan Utama	n a	n a	n a	18 119 3 45	18 704 53 3,60

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

### 19 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang Capaian skor PPH Kabupaten Pemalang selama kurun 2010 - 2015 adalah sebagai berikut

**Tabel 2.37. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pemalang  
Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Skor Pola Pangan Harapan	85,7	86,2	89,2	72,10	77,8

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

### 20. Ketersediaan Cadangan Pangan

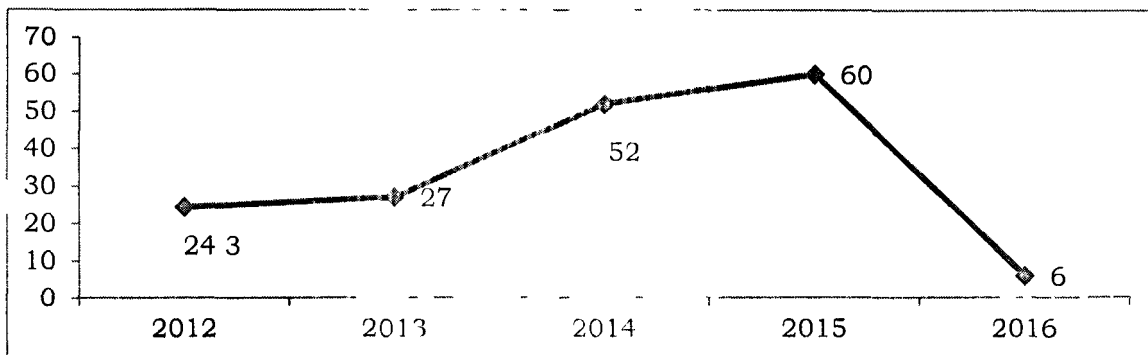
Pengelolaan cadangan pangan harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintahdesa/kelurahan dan masyarakat, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Cadangan pangan merupakan salah satukomponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadanganpangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antarproduksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu Berikut adalah capaian indikator Penguatan Cadangan Pangan selama kurun waktu 2012 - 2016

**Tabel 2.38. Ketersediaan Cadangan Pangan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Ketersediaan Cadangan Pangan	24,3	27	52	60	6

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**Gambar 2.28. Perkembangan Ketersediaan Cadangan Pangan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



## 21 Produksi Perikanan Tangkap

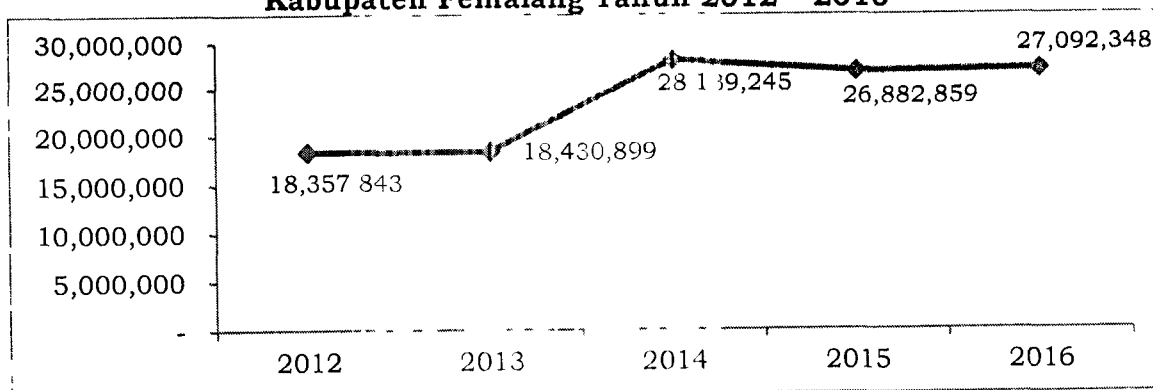
Perikanan tangkap merupakan usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya) Indikator ini menunjukkan jumlah produksi perikanan tangkap dalam satuan Kilogram

**Tabel 2 39. Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Produksi Perikanan Tangkap	18 357 843	18 430 899	28 139 245	26 882 859	27 092 348

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**Gambar 2 29 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



# - 50

## 22 Produksi Perikanan Budidaya

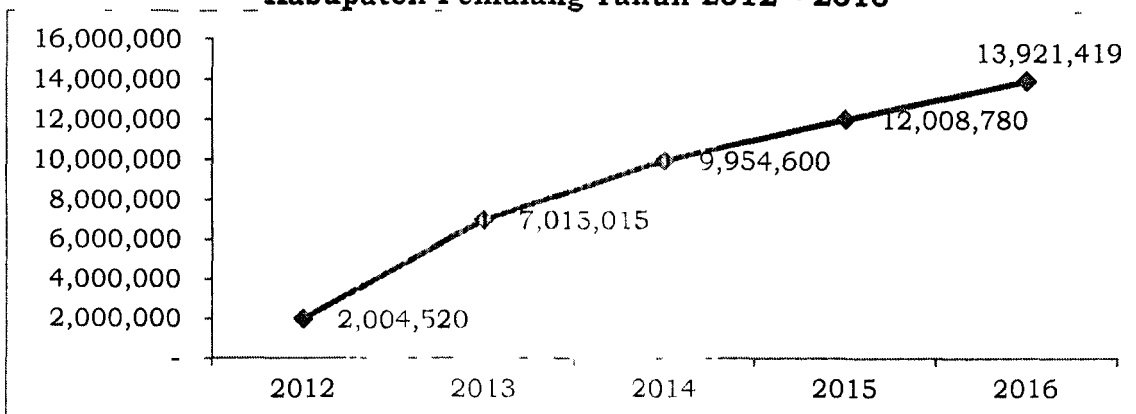
Perikanan budidaya adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya

**Tabel 2.40 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

No	Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi Perikanan Budidaya	5 004 520	8 015 015	9 954 600	12 008 780	13 921 419

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**Gambar 2.30 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



## 23 Persentase Koperasi Sehat

**Tabel 2.41 Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Koperasi sehat	11,85	31,33	31,33	29,9	38,16

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

## 24 Persentase Pertumbuhan IKM

**Tabel 2.42 Persentase Pertumbuhan IKM Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Pertumbuhan IKM	n a	n a	n a	5,47	5,82

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

\* 99



## 25. Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

**Tabel 2.43. Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016*
Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	n a	n a	n a	n a	

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

\*= data belum tersedia

## 26. Peningkatan Wisatawan

Penghitungan indikator ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah wisatawan pada tahun tertentu dengan jumlah wisatawan tahun sebelumnya

**Tabel 2 44. Peningkatan Wisatawan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Peningkatan Wisatawan	n a	n a	n a	2,04	n a

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

## 27 Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Pelayanan Air Minum

Nilai indikator ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah masyarakat yang terlayani dengan proyeksi total masyarakat

**Tabel 2.45. Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Pelayanan Air Minum Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Pelayanan Air Minum	n a	n a	n a	87,12	89,37

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

## 28. Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik

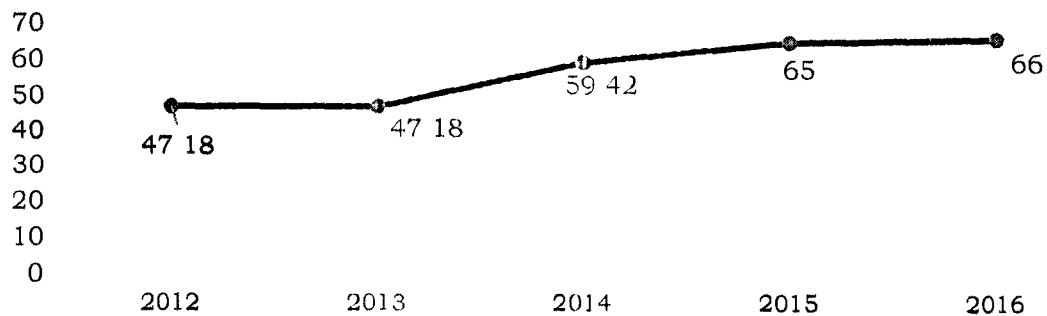
Menunjukkan persentase panjang drainase wilayah kota dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Indikator ini dihitung dengan membagi panjang drainase tersumbat (km) dengan panjang seluruh drainase di wilayah perkotaan kali 100 persen Selama tahun 2010 - 2015 capaian indikator ini menunjukkan tren positif sebagaimana gambar berikut

**Tabel 2 46 Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	47,18	47,18	59,42	65	66

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**Gambar 2.31. Perkembangan Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

## 29 Persentase RLTH

**Tabel 2 47 Persentase RTLH Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase RTLH	n a	n a	n a	n a	8,67

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

## 30. Cakupan Wilayah Kumuh

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, maka kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru. Selanjutnya pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada gilirannya memberikan kontribusi terjadinya lingkungan permukiman kumuh.

Rumus penghitungan indikator Cakupan Wilayah Kumuh adalah jumlah pemukiman kumuh yang tertangani dibagi dengan jumlah pemukiman kumuh yang telah ditetapkan. Berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor ... luas kawasan kumuh sebesar 973,64 Ha

# 98

**Tabel 2 48 Cakupan Wilayah Kumuh Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan Wilayah Kumuh	5	6,55	0,75	4,7	2,50

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**31 Persentase Usaha yang Memiliki Ketaatan terhadap Pencemaran Air dan Udara dari Sumber Tidak Bergerak**

Capaian indikator Persentase Usaha yang Memiliki Ketaatan terhadap Pencemaran Air dan Udara dari Sumber Tidak Bergerak dihitung berdasarkan jumlah usaha wajib AMDAL yang diawasi, dibagi dengan jumlah perusahaan yang seharusnya wajib AMDAL

**Tabel 2.49. Persentase Usaha yang Memiliki Ketaatan terhadap Pencemaran Air dan Udara dari Sumber Tidak Bergerak Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Usaha yang Memiliki Ketaatan terhadap Pencemaran Air dan Udara dari Sumber Tidak Bergerak	n a	n a	n a	100	100

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**32 Persentase Penurunan Konflik Sosial**

Persentase penurunan konflik sosial merupakan perbandingan antara jumlah konflik sosial yang terjadi di tahun tertentu dengan jumlah konflik sosial tahun sebelumnya

**Tabel 2 50 Persentase Penurunan Konflik Sosial Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Penurunan Konflik Sosial	n a	n a	n a	5	100

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**33 Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah**

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima

**Tabel 2.51 Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	na	na	na	WDP	WDP

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**34 Rata-rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD Pelayanan Publik**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah skor seluruh pelayanan publik, dibagi dengan jumlah pelayanan publik.

**Tabel 2.52. Rata-rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD Pelayanan Publik Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rata-rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD Pelayanan Publik	na	na	na	B	B (76,93)

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**35. Cakupan Pelayanan TI Bagi Masyarakat**

Teknologi informasi merupakan suatu hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Teknologi informasi telah merambah ke dalam semua sisi kehidupan. Oleh sebab itu, kebutuhan terhadap teknologi informasi adalah mutlak. Menyadari hal itu, Pemerintah Kabupaten berupaya untuk meningkatkan pelayanan dengan cara memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat melalui pembangunan titik-titik *hostpot* di ruang publik. Pada tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) titik *hostpot* dibangun yaitu di Desa Majakerta, Desa Cibuyur dan alun-alun Pemalang.

**Tabel 2.53 Cakupan Pelayanan TI Bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan Pelayanan TI Bagi Masyarakat	na	na	na	3	3

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**36 Cakupan Kelompok Seni yang Aktif**

**Tabel 2 54 Cakupan Kelompok Seni yang Aktif Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan Kelompok Seni yang Aktif	n a	n a	n a	30	32

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**37 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dihitung dengan cara membagi jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah dikali 100 persen. Setiap tahun jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan makin bertambah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.55. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	28	28	43	58	61

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**38. Tingkat Keselarasan Antara Program RKPD dengan RPJMD**

**Tabel 2.56 Tingkat Keselarasan Antara Program RKPD dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tingkat Keselarasan Antara Program RKPD dengan RPJMD	n a	n a	n a	70	100

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**39 Nilai LkjIP**

**Tabel 2 57 Nilai LkjIP Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai LkjIP	n a	n a	n a	C	CC

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021 LKPJ 2017

# 58

**40. Persentase Prioritas Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPd**

**Tabel 2 58 Persentase Prioritas Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPd Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Prioritas Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPd	n a	n a	n a	85	100

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**2 1 5 Aspek Daya Saing Daerah**

Pada aspek daya saing daerah, terdapat 5 (lima) indikator yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan pembangunan Antara lain Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Persentase Jalan dalam Kondisi Baik, Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik, Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik

**1 Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

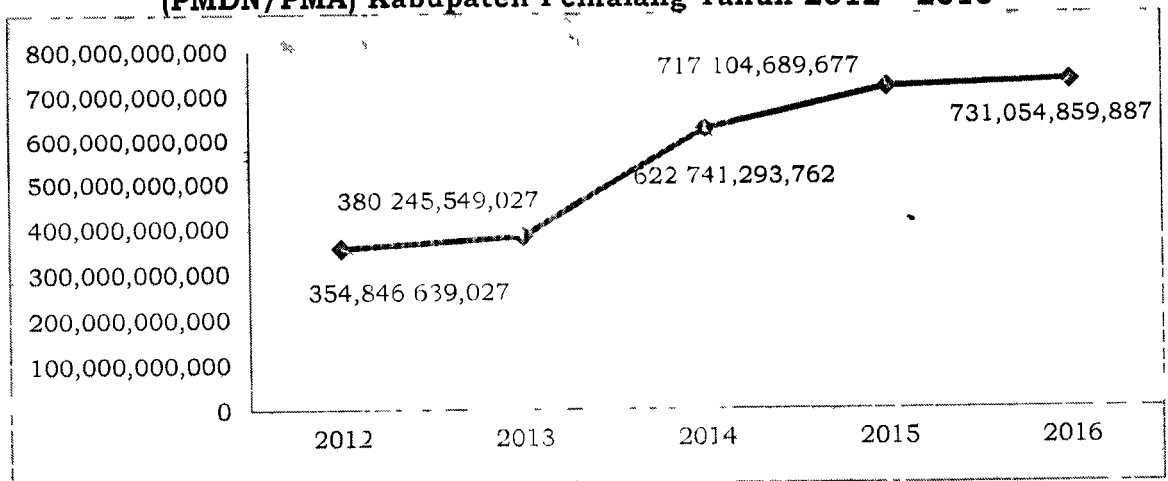
**Tabel 2.59 Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai Investasi Penanaman Modal dalam Negeri	354 846 639 027	380 245 549 027	622 741 293 762	717 104 689 677	731 054 859 887

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

Perkembangan jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pemalang setiap tahunnya meningkat seperti ditunjukkan dalam Gambar 2 126 di bawah ini

**Gambar 2 32 Perkembangan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



490

**2. Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas**

Capaian indikator ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dihitung dengan cara membandingkan jumlah rambu-rambu yang ada dengan jumlah rambu-rambu seharusnya

**Tabel 2 60. Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	n a	n a	n a	35	36,02

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**3. Persentase Jalan dalam Kondisi Baik**

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Kabupaten Pemalang memiliki sekitar 651,97 km jalan kabupaten, dimana perkembangan kondisinya selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut

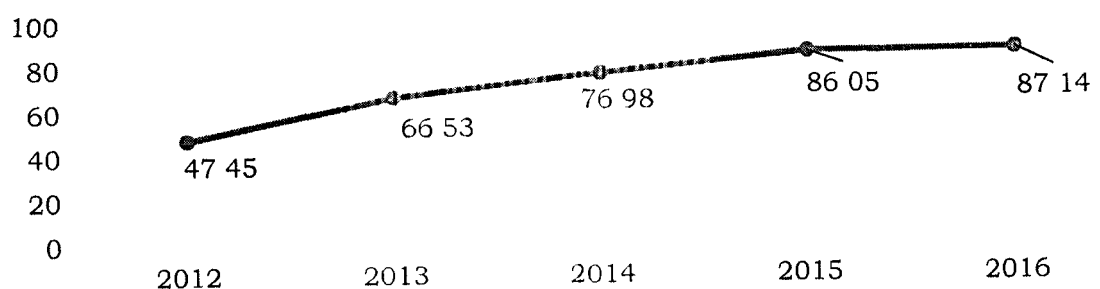
Jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis. Sedang sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. Perkembangan capaian persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan kecenderungan positif sebagaimana tabel berikut

**Tabel 2 61 Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	47,45	66,53	76,98	86,05	87,14

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

**Gambar 2.33. Perkembangan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014, LKPJ 2015 RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

\* 970

#### 4. Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik

**Tabel 2 62. Persentase Jembatan Kondisi Baik Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	n a	n a	n a	95,70	96,13

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

#### 5 Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik

**Tabel 2 63 Persentase Saluran Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**

Bidang Urusan/ Indikator	Capaian				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik	45	51,67	55,22	55,22	60,01

Sumber LKPJ 2013, LKPJ 2014 LKPJ 2015, RPJMD 2016-2021, LKPJ 2017

### 2 1.6 Program Unggulan Kepala Daerah

Untuk mewujudkan visi misi pembangunan Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, Bupati Pemalang menetapkan beberapa program prioritas, antara lain

- 1 Peningkatan Infrastruktur Pendidikan,
- 2 Pendirian Rumah Sakit Pratama Di Comal dan Randudongkal,
- 3 Pembangunan Kawasan Wisata,
  - a Mangrove di Mojo Ulujami
  - b Pengembangan Wisata Susur Sungai Comal
  - c Pemandian Moga, dengan infrastruktur pendukung
  - d Pengembangan Desa Wisata
  - e Pembangunan Wisata Edukasi Gardu Pandang Gunung Slamet
- 4 Pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu
- 5 Pengembangan Agropolitan
  - a Agropolitan Durian
  - b Agropolitan Mangga Istana
  - c Nanas
- 6 Budidaya Padi Teknologi Salibu
- 7 Pengembangan Minapolitan
- 8 Pengembangan Kawasan Pedesaan
- 9 Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kerbau Kec Bantarbolang dan SPR Sapi Potong di Kecamatan Watukumpul dan Belik
- 10 Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Desa Nyamplung Sari dan Mojo



- 11 RTH di masing-masing Kecamatan dengan kelengkapan Hotspot area
- 12 Pengembangan Peternakan di Kawasan Penghasil Telur Omega
- 13 Pembangunan pasar pagi dan pasar unggas
- 14 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
- 15 Pengembangan BLK dan Pembangunan Technopark
- 16 Pembangunan Masjid Agung Pemalang
- 17 Revitalisasi Pasar-pasar daerah
- 18 Pembangunan jalan-jalan beton (*Rigid Pavement*)
- 19 Penataan Ibukota Kabupaten dan Kecamatan
- 20 Penyiapan Pembangunan PLTU di Kabupaten Pemalang
- 21 Penyiapan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
- 22 Pembangunan Pusat Pengembangan Informatika dan Desa (PUSPINDES)
- 23 Penyiapan Pembangunan Bandara Perintis
- 24 Pembangunan Gedung DPRD
- 25 Pembangunan Rumah Budaya
- 26 Penyediaan Air Bersih
- 27 Pembangunan *Sport Centre*

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

### 2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat, ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 target indikator seperti tertuang pada tabel berikut

**Tabel 2.64 Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	PD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,48	5,43	5,50	(*)	(*)	--	Seluruh PD
2	Laju Inflasi (%)	5,6 - 6,0	6,53 - 7,38	3,52	2,33	2,33	★	Seluruh PD
3	PDRB per Kapita (Rp)	15 156 018,76	11 926 161,85	11 380 000	(*)	(*)	--	Seluruh PD
4	Indeks Gini	0,20	0,23	0,31	0,31	0,31	↔	Seluruh PD
5	Persentase Penduduk Miskin (%)	15,4	17,4	18,30	18,30	18,30	↔	Seluruh PD
6	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	66,7	64,2	63,70	63,70	63,70	↔	Seluruh PD

✱ 90

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	PD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	5,92	5,87	6,04	6,04	6,04	★	Dindikbud
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14	11,66	11,86	11,86	11,86	➡	Dindikbud
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,35	72,86	72,77	72,77	72,77	➡	Dinkes
	- Tingkat Pengeluaran Perkapita (Rp)	9.002.890	7.453.315	7.177.000	7.177.000	7.177.000	↔	Seluruh PD
7	Indeks Pembangunan Gender (Nilai)	85,89	84,19	84,46	84,46	84,46	➡	Dinsos PP KB PA
8	Indeks Pemberdayaan Gender (Nilai)	71,17	68,87	68,73	68,73	68,73	↔	Dinsos PP KB PA
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,87	7,11	6,53	6,53	6,53	★	Dinsaker

Sumber Indikator Penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, BPS, 2016

\* = data belum tersedia

Keterangan ★ telah tercapai, ➡ akan tercapai, ↔ perlu perhatian, ● sulit dicapai

## 2.2.2 Aspek Pelayanan Umum

Tabel 2.65 Capaian Kinerja Aspek Pelayanan Umum

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	PD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Kelulusan SD/MI (%)	100	100	100	100	100	★	Dindikbud
2	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100	★	Dindikbud
3	Angka Melanjutkan SD/MI (%)	98,90	98,70	98,65	96,18	96,18	↔	Dindikbud
4	Angka Melanjutkan SMP/MTs (%)	88,10	87,70	87,60	88,28	88,28	★	Dindikbud
5	Angka Kunjungan ke Perpustakaan (%)	5,56	5,26	3,36	4,40	4,40	➡	Dinpepus
6	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,35	72,86	72,77	(*)	(*)	--	Dinkes
7	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	100	120	120	181	181	↔	Dinkes

# 28

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	PD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Angka Kematian Bayi (Per 1 000 KH)	7,5	10	10	7,3	7,3	➡	Dinkes
9	Angka Kematian Balita (Per 1 000 KH)	8,5	11	11	9	9	➡	Dinkes
10	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,025	0,030	0,030	0,003	0,003	★	Dinkes
11	Total Fertility Rate (%)	2,43	2,48	2,49	2,55	2,55	↔	Dinsos PP KB PA
12	Persentase PMKS yang Tertangani (%)	47,32	18,75	13,03	18,05	18,05	➡	Dinsos PP KB PA
13	Persentase Kepemilikan KTP (%)	99,50	97,00	95	93,6	93,6	➡	Disdukta cpil
14	Persentase Anak Memiliki Akta Kelahiran (%)	98,00	95,00	80	81,49	81,49	↔	Disdukta cpil
15	Produktivitas Padi (kw/ha)	54,89	57,00	57	57,96	57,96	★	Dipertan
16	Produktivitas Jagung (kw/ha)	57,91	57,61	54,72	60,96	60,96	★	Dipertan
17	Produktivitas Kedelai (kw/ha)	17,80	15,00	11,83	15,12	15,12	➡	Dipertan
18	Produksi Komoditas Peternakan Utama (Kg)	18 676 630	18 119 345	11 119 345	18 704 533 6 0	18 704 53 3,60	➡	Dipertan
19	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,60	75,20	72,10	77,8	77,8	➡	Dipertan
20	Ketersediaan Cadangan Pangan (Ton)	60	5	60	6	6	???	Dipertan
21	Produksi Perikanan Tangkap (Kg)	17 194 460	15 573 552	26 882 859	27 092 348	27 092 34 8	★	Disperik
22	Produksi Perikanan Budidaya (Kg)	18 652 000	13 081 112	12 008 780	13 921 419	13 921 41 9	↔	Disperik
23	Koperasi sehat (%)	30	29,9	29,9	38,16	38,16	★	Diskop
24	Persentase Pertumbuhan IKM (%)	7,30	5,80	5,47	5,87	5,87	➡	Diskop
25	Persentase Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	4,65	4,43	na	(*)	(*)	--	Diskop
26	Peningkatan Wisatawan (%)	2,17	2,04	2,04	(*)	(*)	--	Dispaspo ra

# 978

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPd		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	PD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Pelayanan Air Minum (%)	100	87,12	87,12	89,37	89,37	➡	DPU PR
28	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	71	66	65	66	66	↔	DPU PR
29	Persentase RTLH (%)	25	4,17	n a	8,67	8,67	↔	Disperkim
30	Cakupan Wilayah Kumuh (%)	0	4	4,7	2,50	2,50	➡	Disperkim
31	Persentase Usaha yang Memiliki Ketaatan terhadap Pencemaran Air dan Udara dari Sumber Tidak Bergerak (%)	100	100	100	100	100	★	DLH
32	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	5	5	5	100	100	★	Kesbang polinmas
33	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (Nilai)	WTP	WDP	WTP	WDP	WDP	➡	BPKAD
34	Rata-rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD Pelayanan Publik (Skor)	90	80	80	B (76,93)	B (76,93)	➡	Setda
35	Cakupan Pelayanan TI Bagi Masyarakat (Titik Hotspot)	14	3	n a	3	3	➡	Diskominfo
36	Cakupan Kelompok Seni yang Aktif (%)	70	40	30	32	32	↔	Dindikbud
37	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	73	61	58	61	61	➡	Dindikbud
38	Tingkat Keselarasan Antara Program RKPd dengan RPJMD (%)	90	78	70	100	100	★	Seluruh PD
39	Nilai LkjIP (Nilai)	B	C	C	CC	CC	➡	Bappeda & Setda
40	Persentase Prioritas Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPd (%)	95	90	85	100	100	★	Bappeda

# 99

**2 2 3 Aspek Daya Saing Daerah**

**Tabel 2 66 Capaian Kinerja Aspek Daya Saing Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2016	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RPJMD s/d 2016	Status Capaian Target Akhir RPJMD	PD
				Tahun 2015	Tahun 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Investasi Penanaman Modal dalam Negeri	749 604 689 677	724 60 4 689 6 77	717 104 689 67 7	731 054 859 88 7	731 054 8 59 887	➡	DPMP TSP
2	Ketersediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	60	36	35	36,02	36,02	↔	Dishu b
3	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	93	87	86,05	87,14	87,14	↔	DPU PR
4	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	100	96	95,70	96,13	96,13	➡	DPU PR
5	Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik	75	60	55 22	60,01	60,01	↔	DPU PR

**2.3. Lingkungan Strategis**

**2 3 1 Internal**

**A. Kekuatan (Strength)**

**1. Geo-Strategis**

Kabupaten Pemalang memiliki posisi strategis, berada di jalur perekonomian utama yang menghubungkan antar pusat-pusat pertumbuhan dan sebagai jalur distribusi barang dan jasa di Pulau Jawa Posisi ini menjadi salah satu kekuatan strategis yang mendukung pembangunan di Kabupaten Pemalang

Selain itu, Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi Bagian utara merupakan dataran rendah, berupa daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1 - 5 meter di atas permukaan laut Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian selatan merupakan dataran tinggi berupa pegunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 m di atas permukaan laut Puncak tertingginya ialah Gunung Slamet, yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga, dan merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah Karakter topografi ini menyebabkan kekayaan sumber daya alam Kabupaten Pemalang bervariasi Mulai dari kekayaan alam laut hingga pegunungan

Wilayah Kabupaten Pemalang dilintasi oleh tiga sungai besar, yaitu Sungai Comal, Sungai Waluh, dan Sungai Rambut yang menjadikannya

\* 90

sebagai daerah aliran sungai yang subur Kondisi ini mendukung pengembangan pertanian sebagai sektor utama pembangunan Kabupaten Pemalang

## **2 Sumber Daya Manusia**

Pembangunan suatu daerah memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya (*resources*), baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang untuk mendukung pembangunan adalah jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 1 292 573 jiwa

Membaiknya kualitas hidup penduduk Kabupaten Pemalang yang ditunjukkan dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun menjadi kekuatan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pemalang

## **B Kelemahan (*Weakness*)**

### **1. Kependudukan**

Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang yang besar tidak disertai persebaran yang merata Secara geografis, penduduk terkonsentrasi di wilayah pantura Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan pantura yang lebih tinggi dari pada kecamatan wilayah atas Ketidakmerataan persebaran penduduk ini akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang Secara sosial, penduduk yang tidak merata menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial pada daerah tertentu Secara ekonomi, menyebabkan pemusatan kegiatan ekonomi hanya pada daerah tertentu saja Secara budaya, pada daerah yang padat penduduknya mengakibatkan persaingan yang semakin ketat sehingga menumbuhkan individualistis dan memudarkan semangat gotong-royong

Disamping itu jumlah penduduk yang banyak namun tidak diiringi kualitas memadai justru menjadi permasalahan dalam pembangunan di Kabupaten Pemalang Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pemalang masih relatif rendah Dari segi pendidikan, hal ini ditunjukkan rasio lulusan S1/S2/S3 yang hanya sebesar 1,65 Artinya bahwa setiap 10 000 penduduk terdapat lulusan S1/S2/S3 sebanyak 165 orang Sementara itu rasio ketergantungan masih relatif besar, yaitu sebesar 28,37 Hal tersebut dimaknai bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 29 orang

### **2.3.2. Eksternal**

#### **A. Peluang (*Opportunity*)**

##### **1. Ekonomi Global**

Terbukanya pasar bebas pada era globalisasi baik pada tataran regional maupun internasional seperti *ASEAN Economic Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan *ASEAN China Free Trade Area* menjadi potensi dan peluang bagi pembangunan ekonomi di daerah. Dengan demikian peluang akses pasar untuk produk-produk daerah semakin besar.

Daerah memiliki kesempatan yang sangat terbuka untuk mempromosikan perdagangan, investasi dan berbagai potensi kerja sama dengan pihak-pihak di luar batas Negara. Terbukanya akses pasar ini tentunya harus disertai dengan kreasi produk yang kompetitif sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain.

##### **2 Perkembangan Teknologi**

Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia (tenaga kerja), akumulasi modal serta tenaga managerial yang mengorganisasi dan mengatur faktor produksi. Faktor ekonomi lain yang mendukung faktor-faktor produksi adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi berpengaruh pada meningkatnya efisiensi, efektivitas, produktivitas serta keragaman produk-produk lokal yang mampu bersaing di pasar global.

Pesatnya perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi menjadikan akses informasi ke seluruh penjuru dunia mudah mempromosikan dan memasarkan produknya secara luas.

#### **B. Ancaman (*Threat*)**

##### **1 Globalisasi**

Globalisasi merupakan sebuah proses terbentuknya dunia tanpa batas. Selain membuka luas peluang untuk berinteraksi dengan negara lain, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif dalam berbagai bidang. Tergerusnya nilai sosial budaya bangsa dapat memberikan akses negatif terhadap perkembangan karakter bangsa. Sementara itu membanjurnya produk dari luar negeri mengakibatkan terpuruknya produk lokal apabila tidak ada kebijakan proteksi.

Berlakunya MEA atau AEC membuka peluang masuknya produk dari China ke dalam pasar dalam negeri. Apabila tidak disikapi dengan upaya-upaya dan kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri, maka hal ini akan menjadi ancaman yang serius bagi perekonomian daerah.

## **2. Perubahan Iklim**

Pola cuaca adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Pola ini memengaruhi tanaman pangan kita, air yang kita gunakan, tempat tinggal, aktivitas dan kesehatan kita. Oleh karena itu, perubahan iklim benar-benar berdampak serius bagi kehidupan kita.

Perubahan iklim telah berlangsung dan dampaknya makin hari makin terasa. Selain berdampak pada kesehatan, perubahan iklim atau *global warming* berdampak pada terjadinya kekeringan yang mempengaruhi produksi dan produktivitas pertanian. Perubahan iklim juga mengakibatkan cuaca ekstrem yang menimbulkan banyak bencana alam.

### **2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan mendasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2015 yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang meliputi pelayanan urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing daerah. Di samping itu juga dengan mempertimbangkan perbandingan antara capaian indikator kinerja daerah Tahun 2015 dan target akhir capaian indikator pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2016.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian indikator kinerja daerah tersebut, maka permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pemalang, yaitu sebesar 18,30% pada Tahun 2015 s/ segenap stakeholder untuk mengatasinya.
2. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang. Capaian IPM Tahun 2015 dengan metode penghitungan lama adalah sebesar 63,70.
3. Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, yaitu sebesar 6,04 di tahun 2015. Artinya penduduk Kabupaten Pemalang secara rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Rendahnya RLS ini merupakan cermin belum optimalnya pembangunan di bidang pendidikan. Oleh sebab itu pemerintah harus berupaya secara maksimal untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.
4. Masih belum membaiknya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh masih terjadinya kasus balita gizi buruk (dan tingginya Angka Kematian Ibu, sebesar 178 per 100.000 kelahiran hidup di Tahun 2016).
5. Masih tingginya Angka Putus Sekolah (APS) pada tingkat pendidikan SD/MI.
6. Rendahnya produksi komoditas peternakan utama.

# 90



## 2.5 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Dari identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Pemalang, serta dengan memperhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2017 sebagai berikut

### 1 Pengurangan kemiskinan

Kemiskinan menjadi permasalahan di hampir semua daerah di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

Dampak kemiskinan terhadap kehidupan masyarakat begitu banyak dan kompleks. Ketidakmampuan ekonomi menyebabkan ketiadaan biaya untuk menempuh pendidikan sehingga pengetahuan atau *skill* yang dimiliki rendah. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan ini menyebabkan terbatasnya jenis pekerjaan yang dapat dimasuki. Dengan demikian kemiskinan mengakibatkan pengangguran. Kemiskinan juga memicu terjadinya kekerasan atau tindak kriminal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu. Ketidakberdayaan ekonomi menyebabkan angka putus sekolah tinggi. Dengan demikian kemiskinan berdampak negatif dalam bidang pendidikan. Dalam bidang kesehatan, kemiskinan menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat.

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Selain itu diperlukan perluasan upaya penanggulangan kemiskinan yang inklusif dan berkeadilan, baik perluasan sasaran maupun program/kegiatan melalui kegiatan yang bersifat *affirmative*.

### 2 Pembangunan infrastruktur

Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Infrastruktur pada dasarnya merupakan asset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Saat ini masalah infrastruktur terutama jalan kabupaten menjadi agenda penting untuk dibenahi, karena merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, diantaranya untuk mencapai target pembangunan ekonomi secara kualitatif maupun kuantitatif. Prasarana jalan memberikan peran sebanyak-banyaknya dalam kelancaran distribusi, pelayanan jasa angkutan manusia, barang dan jasa yang dipastikan dapat menunjang perekonomian.

Dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi. Dalam jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan

produktifitas sektor-sektor ekonomi terkait Pembangunan infrastruktur antara lain dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, menghemat penggunaan energi, memperlancar arus barang, membuka berbagai kemungkinan investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi barang dan jasa di berbagai sektor yang pada ujungnya memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan mobilitas barang dan jasa, serta dapat mengurangi biaya investor dalam dan luar negeri.

### **3 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat**

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat.

Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Untuk itu diperlukan suatu upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang inklusif dan komprehensif dengan memanfaatkan semua potensi sumber daya kesehatan yang ada.

### **4 Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat**

Di era globalisasi saat ini pendidikan merupakan sarana yang sangat penting bagi setiap orang untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Selain itu, pembentukan indeks pembangunan manusia (IPM) yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan suatu bangsa/daerah, faktor pendidikan merupakan salah satu indikator komposit, selain faktor kesehatan dan daya beli masyarakat. Karena itu, pembangunan pendidikan menjadi isu penting dan berperan strategis bagi kemajuan taraf kesejahteraan penduduk setiap daerah.

Indikator komposit IPM dari sektor pendidikan, diukur dengan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dan HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan

dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Capaian RLS Kabupaten Pemalang Tahun 2015 adalah 6,04. Artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Pemalang menyelesaikan sekolah pada kelas 6 SD. Standar RLS menurut UNDP (United Nations Development Programs) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Jadi, apabila dibandingkan dengan standar maksimal UNDP, RLS Kabupaten Pemalang masih sangat jauh.

Oleh sebab itu, pendidikan, merupakan isu strategis pembangunan di Kabupaten Pemalang. Upaya pembangunan manusia dari sisi pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

### BAB III

## RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Di tengah perekonomian global yang cenderung melambat, Indonesia justru berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya yang cukup tinggi. Pada triwulan III tahun 2016 pertumbuhan PDB Indonesia tercatat sebesar 5,0 persen (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,7 persen.

Di tahun 2017, harga komoditas dan energi diperkirakan mulai membaik serta perekonomian global yang mulai pulih akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 diperkirakan masih berasal dari sisi pengeluaran konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah.

Sementara itu untuk kondisi perekonomian Jawa Tengah pada triwulan III 2016, mencatatkan pertumbuhan 5,06 persen (y-o-y). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan I 2017 diperkirakan melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2016. Dari segi pengeluaran, perlambatan berasal dari komponen konsumsi rumah tangga dan investasi.

Kebijakan pembangunan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah, dengan sasaran pokok:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten/kota yang maju di Indonesia,
2. Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian,
3. Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana perdagangan,
4. Semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok didukung dengan swasembada pangan yang disertai dengan ketersediaan instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat,
5. Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi dengan sumber-sumber kekayaan daerah.

Sementara itu arah pembangunan ekonomi jangka panjang Kabupaten Pemalang adalah:

1. Pengembangan keuangan daerah yaitu semakin meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

# 9 0

- 2 Perekonomian daerah dikembangkan ke arah perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi lokal yang memperhatikan sumber daya alam secara berkelanjutan, membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi yang kokoh
- 3 Perekonomian daerah dikembangkan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat, mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan
- 4 Kelembagaan ekonomi dibangun dan dikembangkan guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan non diskriminatif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen, mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri,
- 5 Jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan di tingkat pedesaan dengan pengembangan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang mampu menyediakan sumber pendanaan di pedesaan dalam pengembangan kegiatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan di pedesaan
- 6 Pengembangan sektor-sektor strategis didayagunakan untuk memperkuat perekonomian daerah Sistem agribisnis dan agroindustri diperkuat sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh
- 7 Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah Hal ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, serta penguatan ketahanan pangan
- 8 Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (entrepreneur) sehingga mampu bersaing di era global
- 9 Pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pengembangan dan pemerataan di Balai Latihan Kerja
- 10 Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Pemalang memandang perlu untuk memberdayakan masyarakat desa karena pemberdayaan tersebut bersifat strategis dan dilakukan melalui penyiapan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang dan memberdayakan masyarakat yang berbasis komunitas desa untuk mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel

\* 9/8

- 11 Pembangunan UKM diarahkan untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha, mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 12 Koperasi didorong untuk berkembang luas melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha
- 13 Usaha peningkatan investasi di daerah diarahkan untuk mendorong ekonomi daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat. Pengembangan investasi dilakukan dengan mengembangkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian berusaha dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi
- 14 Pengembangan dan beragamnya lembaga keuangan di daerah diarahkan dapat memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi investasi di daerah. Setiap jenis investasi akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan
- 15 Pembangunan pertanian diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan produktivitas pertanian dalam negeri, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu maupun harga yang terjangkau dengan tetap memperhatikan sawah lestari
- 16 Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana energi untuk meningkatkan akses dan pelayanan listrik, ketersediaan untuk kecukupan energi untuk industri bagi pertumbuhan ekonomi daerah
- 17 Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk meningkatkan devisa, pendapatan, gizi masyarakat, penciptaan kesempatan kerja dan lapangan berusaha serta melindungi, memulihkan dan melestarikan sumber daya ikan melalui penghijauan hutan bakau, pelestarian terumbu karang dan pelarang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan
- 18 Perdagangan daerah diarahkan pada pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri, dan menjaga distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah pedesaan, dengan harga yang terjangkau sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
- 19 Pembangunan sektor industri diarahkan untuk memperkuat basis industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, meningkatkan peran industri daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah

\* 9/10

- 20 Transmigrasi dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah, serta untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan pelatihan ketrampilan bagi calon transmigran menjadi prioritas untuk menciptakan transmigrasi yang tangguh, mampu menciptakan peluang usaha mandiri dengan jiwa wirausaha
- 21 Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, peninggalan-peninggalan sejarah dan potensi daerah
- 22 Pengembangan investasi melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta dengan meningkatkan pelayanan kepada pihak swasta yang akan menanamkan modalnya di daerah dengan penyediaan informasi yang dibutuhkan, memfasilitasi kerjasama usaha, percepatan waktu pelayanan dan lain sebagainya

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018, merupakan bagian dari pentahapan tahunan ketiga RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, dimana skala prioritas pembangunan ekonomi ditujukan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan

### 3.1 1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Pemalang Tahun 2016

#### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Mulai Tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan PDRB. Hal tersebut disebabkan karena selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh pada perekonomian nasional. Krisis finansial global atau penerapan perdagangan bebas merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Dengan adanya perubahan tahun dasar PDRB Tahun 2010 ini, maka jumlah sektornya menjadi lebih banyak menjadi 17 (tujuh belas), dari sebelumnya hanya sembilan sektor dengan tahun dasar 2000

Berikut ini ditampilkan PDRB Kabupaten Pemalang dari Tahun 2012 – 2016, baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan

**Tabel 3 1. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 – 2016 (Juta Rupiah)**

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3 822 369,4 3	4 382 174,1 3	4 727 693,0 0	5 210 603 8 9	
2	Pertambangan dan Penggalian	595 463 25	652 452 12	783 638,53	917 731,48	
3	Industri Pengolahan	2 618 151 8 8	2 855 930 1 3	3 419 321,4 0	3 866 264,8 5	

\* 978

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15 133,86	15 149,89	15 313,62	15 679,83	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11 085,81	11 940,53	13 179,93	13 914,59	
6	Konstruksi	568 873,44	623 829,17	692 787,86	766 661,33	
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 234 480,70	2 367 266 43	2 569 990,45	2 752 120,73	
8	Transportasi dan Pergudangan	375 580,11	402 655,91	449 338,80	489 958,38	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	715 493 79	758 037,66	846 837,88	943 591,09	
10	Informasi dan Komunikasi	266 758,49	287 940,07	315 391,46	344 867,09	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	407 502,67	444 980,79	495 489,34	558 766,65	
12	Real Estate	227 450,85	244 983,88	272 109,94	300 034,65	
13	Jasa Perusahaan	42 067,66	48 278,12	54 896,14	63 870,77	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	519 286,88	560 902,19	586 449,45	637 274,13	
15	Jasa Pendidikan	714 225,99	826 778,32	963 139,78	1 070 170,82	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135 728,71	152 051,07	170 457,17	188 962,54	
17	Jasa Lainnya	364 019,02	397 267,43	457 794,89	488 839,01	
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>13 635 672,54</b>	<b>15 032 617,79</b>	<b>16 858 829,62</b>	<b>18 629 311,81</b>	

Sumber BPS Kabupaten Pemalang 2016

\* = data belum tersedia

**Tabel 3 2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2016 (Juta Rupiah)**

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3 455 924,36	3 680 933,28	3 615 815,56	3 762 376,81	
2	Pertambangan dan Penggalian	571 189,49	600 719 99	638 084,77	656 263,08	
3	Industri Pengolahan	2 316 429 16	2 472 070 49	2 810 141,65	3 014 904,05	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15 157,73	15 944,00	16 032,65	15 566,17	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	11 177,20	11 791,94	12 642,14	12 935,89	

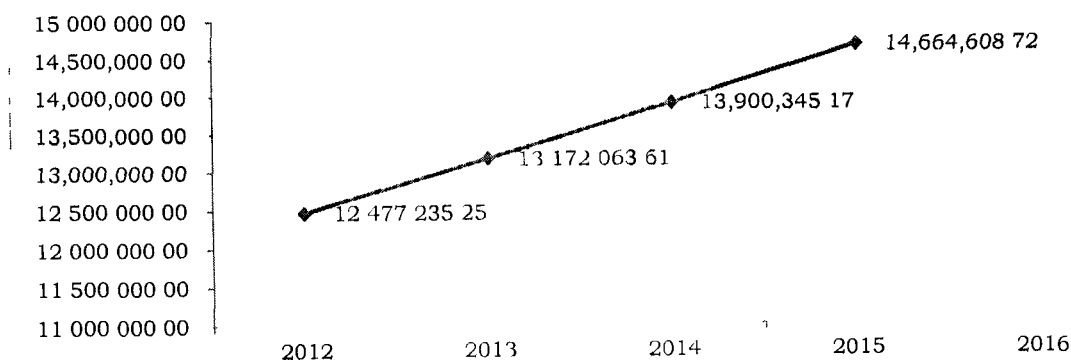


No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
6	Konstruksi	528 904,91	559 369 84	585 324,60	617 993,54	
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 118 196,71	2 185 406 25	2 317 609,80	2 420 232,68	
8	Transportasi dan Pergudangan	367 454,07	389 201 63	411 165,21	433 521,95	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	688 784,08	711 838,36	759 004,66	808 886,30	
10	Informasi dan Komunikasi	267 669,68	293 660,40	333 187,09	360 877,09	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	357 963,28	371 375 28	393 784,06	426 209,97	
12	Real Estate	220 559,27	235 733 75	251 857,94	269 812,96	
13	Jasa Perusahaan	38 743,81	42 943 64	47 414,07	52 360,28	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	465 688,16	475 653,89	476 414,94	498 969,52	
15	Jasa Pendidikan	586 997,98	628 968 34	692 828,72	757 180,33	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117 828,26	124 179 21	134 337,06	143 313,06	
17	Jasa Lainnya	348 567,08	367 773 13	399 695,84	413 205,02	
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>12 477 23 5,25</b>	<b>13 172 06 3,61</b>	<b>13 900 34 5,17</b>	<b>14 664 60 8,72</b>	

Sumber BPS Kabupaten Pemalang 2016

\* = data belum tersedia

**Gambar 3.1. Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2016 (Juta Rupiah)**



Dari tabel dan gambar di atas, terlihat bahwa nilai PDRB Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan yang positif Pada tahun 2015, meningkat sebesar 5,49 persen dibanding tahun sebelumnya

**b. Distribusi Persentase PDRB**

Distribusi Persentase PDRB merupakan sumbangan dari setiap satuan unit pengamatan (lapangan usaha/sektor) terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase Indikator ini berguna untuk menunjukkan peranan/sumbangan setiap sektor ekonomi terhadap PDRB pada periode tertentu

**Tabel 3.3. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pemalang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2016 (Juta Rupiah)**

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	28,03	29,15	28,19	27,97	
2	Pertambangan dan Penggalian	4,37	4,34	4,65	4,93	
3	Industri Pengolahan	19,22	19,00	20,28	20,75	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,10	0,09	0,08	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,07	
6	Konstruksi	4,17	4,15	4,11	4,12	
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,39	15,75	15,24	14,77	
8	Transportasi dan Pergudangan	2,75	2,68	2,67	2,63	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,25	5,04	5,02	5,07	
10	Informasi dan Komunikasi	1,96	1,92	1,87	1,85	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,99	2,96	2,94	3,00	
12	Real Estate	1,67	1,63	1,61	1,61	
13	Jasa Perusahaan	0,31	0,32	0,33	0,34	
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,81	3,73	3,48	3,42	
15	Jasa Pendidikan	5,24	5,50	5,71	5,74	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	1,01	1,01	1,01	
17	Jasa Lainnya	2,67	2,64	2,72	2,62	
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Sumber BPS Kabupaten Pemalang

\* = data belum tersedia

\* 30

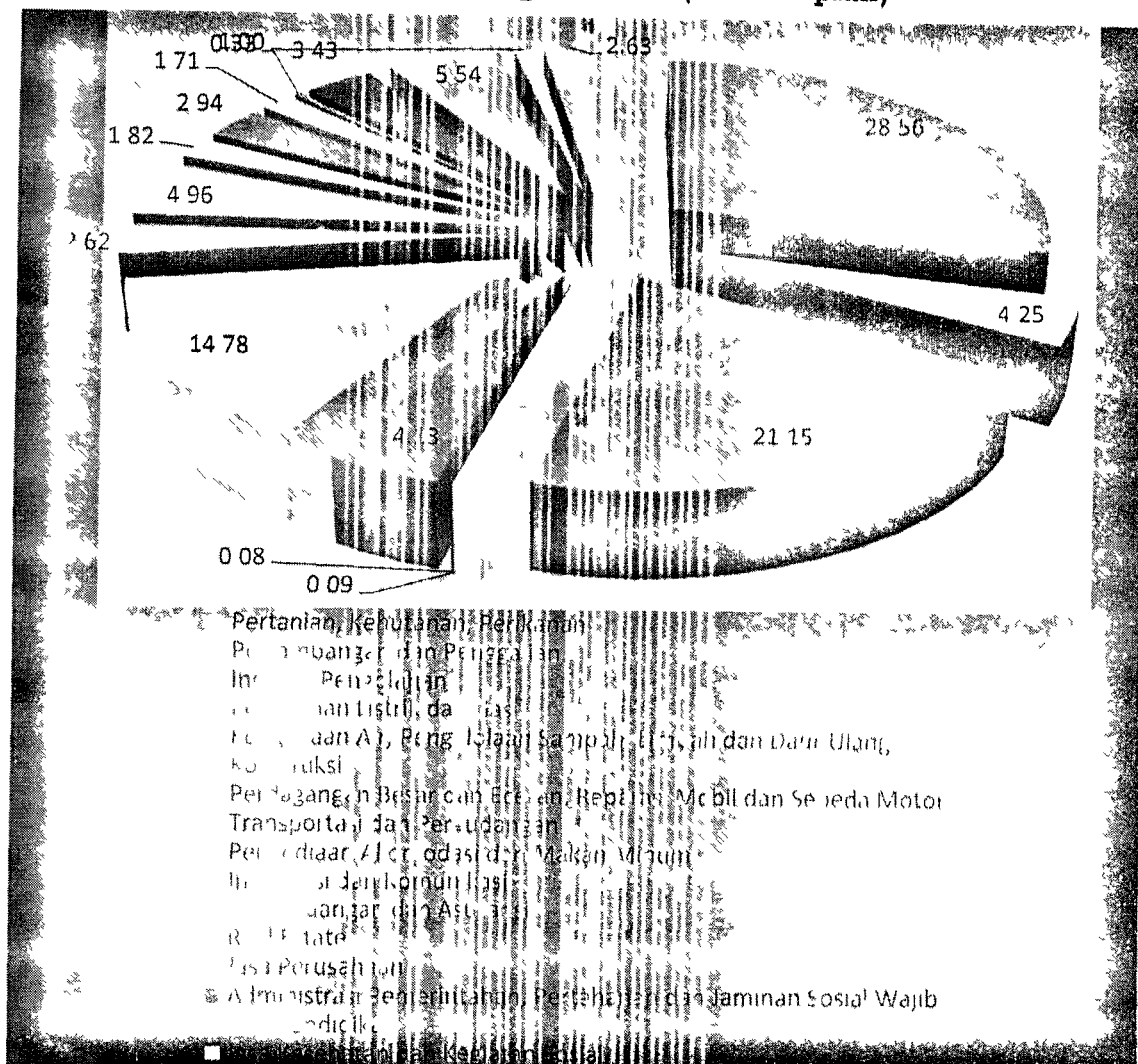
**Tabel 3 4 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pemalang PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2016 (Juta Rupiah)**

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,70	27,95	26,01	25,66	
19	Pertambangan dan Penggalian	4,58	4,56	4,59	4,48	
20	Industri Pengolahan	18,57	18,77	20,22	20,56	
21	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,12	0,11	
22	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	
23	Konstruksi	4,24	4,25	4,21	4,21	
24	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,98	16,59	16,67	16,50	
25	Transportasi dan Pergudangan	2,94	2,95	2,96	2,96	
26	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,52	5,40	5,46	5,52	
27	Informasi dan Komunikasi	2,15	2,23	2,40	2,46	
28	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,87	2,82	2,83	2,91	
29	Real Estate	1,77	1,79	1,81	1,84	
30	Jasa Perusahaan	0,31	0,33	0,34	0,36	
31	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,73	3,61	3,43	3,40	
32	Jasa Pendidikan	4,70	4,81	5,02	5,16	
33	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	0,94	0,97	0,98	
34	Jasa Lainnya	2,79	2,79	2,88	2,82	
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang

\* = data belum tersedia

**Gambar 3 2 Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Tahun 2015 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**



Pada PDRB Kabupaten Pemalang Tahun 2015, sektor yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi yaitu Informasi dan Komunikasi sebesar 12,21 persen, diikuti oleh sektor Jasa Pendidikan sebesar 8,51 persen, Industri Pengolahan sebesar 8,45 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,70 persen serta Jasa Lainnya 7,38 persen

**c. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya adalah peningkatan kegiatan produksi secara riil (tidak termasuk kenaikan harga), baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam periode tertentu. Karena itu, pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menghitung peningkatan nilai PDRB pada tahun tertentu ke tahun berikutnya.

Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dalam bentuk perkiraan laju pertumbuhan ekonomi tahunan atau untuk periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.

\* 90

**Tabel 3 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pemalang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (%)**

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,56	14,65	8,46	9,63	
2	Pertambangan dan Penggalian	6,34	9,57	20,11	17,11	
3	Industri Pengolahan	11,33	9,00	19,73	13,07	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,49	0,11	1,08	2,39	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	7,71	10,38	5,57	
6	Konstruksi	10,63	9,66	11,05	10,66	
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,39	5,94	8,56	7,09	
8	Transportasi dan Pergudangan	10,09	7,21	11,59	9,04	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,89	5,95	11,71	11,43	
10	Informasi dan Komunikasi	7,66	7,94	9,53	9,35	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,48	9,20	11,35	12,77	
12	Real Estate	6,19	7,71	11,07	10,26	
13	Jasa Perusahaan	12,07	14,76	13,71	16,35	
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,48	8,01	4,55	8,67	
15	Jasa Pendidikan	25,48	15,76	16,49	11,11	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,36	12,03	12,11	10,86	
17	Jasa Lainnya	0,52	9,13	15,24	6,78	
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>9,11</b>	<b>10,24</b>	<b>12,15</b>	<b>10,50</b>	

Sumber BPS Kabupaten Pemalang 2016

**Tabel 3 6 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pemalang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (%)**

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,01	6,51	-1,77	4,05	
19	Pertambangan dan Penggalian	5,19	5,17	6,22	2,85	
20	Industri Pengolahan	8,19	6,72	13,68	7,29	
21	Pengadaan Listrik dan Gas	6,66	5,19	0,58	-2,93	
22	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,76	5,50	7,21	2,32	
23	Konstruksi	6,12	5,76	4,64	5,58	
24	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,82	3,17	6,05	4,43	

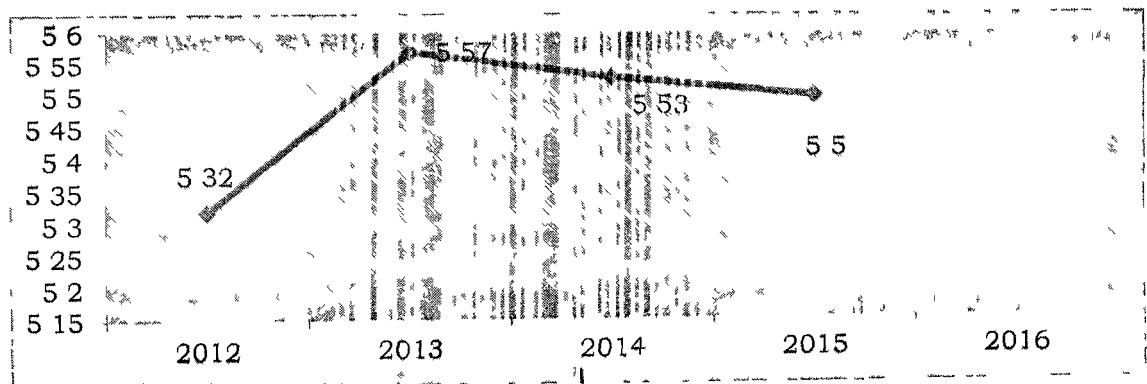
# 98

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	Transportasi dan Pergudangan	8,58	5,92	5,64	5,44	
26	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,77	3,35	6,63	6,57	
27	Informasi dan Komunikasi	10,60	9,71	13,46	8,31	
28	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71	3,75	6,03	8,23	
29	Real Estate	6,03	6,88	6,84	7,13	
30	Jasa Perusahaan	8,50	10,84	10,41	10,43	
31	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,93	2,14	0,16	4,73	
32	Jasa Pendidikan	13,80	7,92	10,16	8,51	
33	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,81	5,39	8,18	6,68	
34	Jasa Lainnya	0,38	5,51	8,68	3,38	
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5,32</b>	<b>5,57</b>	<b>5,53</b>	<b>5,50</b>	

Sumber BPS Kabupaten Pemalang 2016

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang cukup fluktuatif. Di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,01% dibanding tahun 2013. Tahun 2015 kembali mengalami penurunan, hingga tercapai pertumbuhan sebesar 5,5%. Penurunan ini terjadi pada 13 sektor. Hanya 4 (empat) sektor saja yang mengalami pertumbuhan positif yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

**Gambar 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 - 2016**



### b Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu inflasi merayap, inflasi sederhana (*moderate*) dan hiperinflasi.

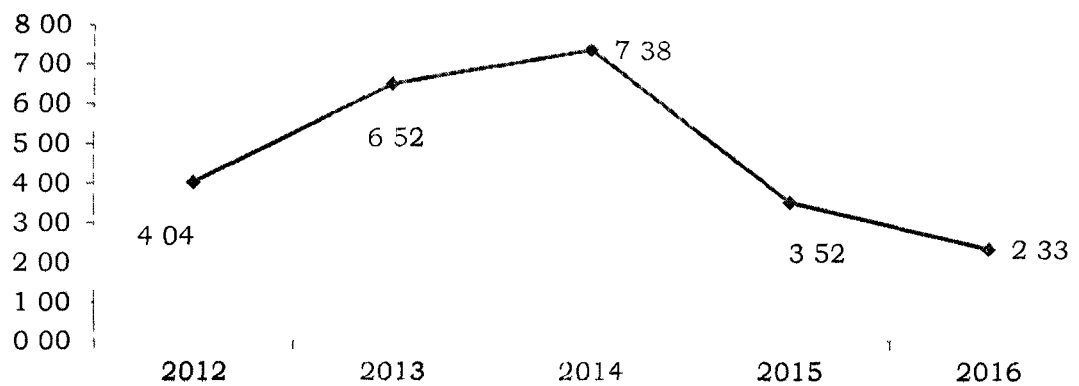
Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Biasanya tidak melebihi 2 (dua) atau 3 (tiga) persen setahun.

# 978

Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Di negara-negara berkembang adakalanya tingkat inflasi tidak mudah dikendalikan. Negara-negara tersebut tidak mengalami hiperinflasi, akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang sangat rendah. Secara rata-rata di sebagian negara tingkat inflasi mencapai di antara 5 hingga 10 persen. Inflasi dengan tingkat yang seperti itu digolongkan sebagai inflasi sederhana atau *moderate inflation*.

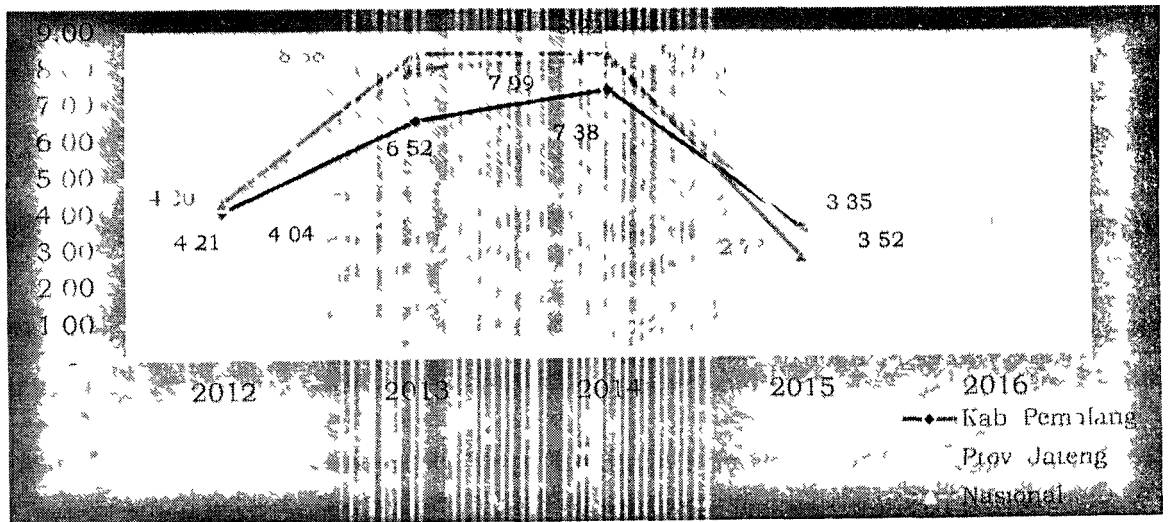
Selama kurun waktu 2012-2016, tingkat inflasi di Kabupaten Pemalang berkisar antara 3,5 – 7,3 persen. Oleh karena itu inflasi di Kabupaten Pemalang dikategorikan sebagai *moderate inflation*.

**Gambar 3.4. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016**



Apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2015, laju inflasi di Kabupaten Pemalang lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Inflasi di Kabupaten Pemalang tercatat sebesar 3,52 persen, Jawa Tengah 3,35 persen dan Nasional sebesar 2,73 persen.

**Gambar 3.5 Laju Inflasi Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012 - 2016**



# 98

**Tabel 3 7 Laju Inflasi Kabupaten Pemalang Desember 2014 dan Desember 2015 menurut Kelompok Pengeluaran**

Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2014	IHK Des 2015	Inflasi YoY 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Umum</b>	<b>115,78</b>	<b>119,86</b>	<b>3,52</b>
1 Bahan Makanan	124,85	128,40	2,84
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	112,28	117,99	5,08
3 Perumahan, Air, Listrik Gas dan Bahan Bakar	114,71	121,48	5,90
4 Sandang	111,96	117,18	4,66
5 Kesehatan	108,39	112,18	3,56
6 Pendidikan, rekreasi dan Olah Raga	106,09	108,70	2,46
7 Transpor dan Komunikasi dan Jasa Keuangan	122,47	118,00	-3,65

Inflasi Kabupaten Pemalang tahun 2015 sebesar 3,52 persen Kontributor terbesar berasal dari sektor Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 5,90 persen Sementara itu sektor Tranpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan justru mengalami deflasi sebesar 3,65 persen

Meski masuk dalam kategori *moderate*, pemerintah harus berupaya untuk mengendalikan laju inflasi Bagi individu atau masyarakat, inflasi menimbulkan efek-efek negatif sebagai berikut

- Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap,
- Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang,
- Memperburuk pembagian kekayaan Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap akan menjadi semakin tidak merata

### 3 1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Momentum pertumbuhan ekonomi domestik ke depan akan menghadapi sejumlah tantangan baik global maupun domestik Tantangan utama dari ekonomi global bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang masih belum cukup kuat dan berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia Tantangan global lainnya adalah mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Dalam kaitan ini, peluang Indonesia menjadi pemasok dalam rantai nilai ASEAN dan global cukup besar Namun demikian, bila produk domestik tidak mampu bersaing, maka Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk negara MEA lainnya

Sementara itu terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 baru-baru ini sedikit banyak berimbas pada perekonomian Indonesia Amerika serikat menjadi tujuan utama ekspor Indonesia Neraca perdagangan Indonesia ke AS selama rentang 2011-2015 selalu surplus Artinya, ekspor Indonesia ke AS selalu lebih besar daripada impor Indonesia dari AS Dengan kebijakan proteksi yang

# 98



diterapkan Donald Trump, maka akan mengurangi peluang ekspor Indonesia ke AS

Di sisi domestik, perekonomian Indonesia ke depan juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Tantangan struktural yang pertama adalah pencapaian ketahanan pangan, energi, dan air sebagai faktor input utama yang diperlukan dalam proses transformasi menuju industrialisasi. Tantangan struktural kedua adalah tantangan memperkuat daya saing industri, maritim, dan pariwisata.

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Pemalang di Tahun 2018 antara lain adalah

1. Pemberlakuan MEA yang akan berpengaruh pada kegiatan ekonomi masyarakat, terutama terhadap produk lokal yang harus mampu bersaing dengan produk-produk dari negara-negara ASEAN lainnya,
2. Penurunan harga komoditas ekspor dunia yang berpengaruh pada nilai ekspor produk non-migas Kabupaten Pemalang,
3. Terkait dengan daya saing industri, sektor industri di kabupaten Pemalang masih lebih mengandalkan komoditas ekstraktif dan yang bernilai tambah rendah,
4. Di sektor pariwisata tantangan utama pengembangan sektor ini bersumber dari terbatasnya infrastruktur yang pada gilirannya menghambat akses dan waktu jelajah wisatawan. Selain itu, terbatasnya promosi menyebabkan potensi pariwisata di Kabupaten Pemalang kurang dikenal,
5. Dari sisi kualitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pemalang yang mayoritas merupakan lulusan pendidikan dasar belum compatible dengan upaya penguatan struktur ekonomi pada sektor teknologi menengah-tinggi,
6. Di sisi iptek, belum optimalnya dukungan iptek dalam meningkatkan daya saing sektor produksi dan jasa merupakan permasalahan yang harus terus dicermati,
7. Fluktuasi harga BBM yang berimbas pada ketidakpastian ekspetasi dunia usaha,
8. Makin tidak teraturnya iklim yang berakibat meningkatnya resiko terhadap bencana alam kekeringan di beberapa wilayah di Kabupaten Pemalang

Sementara itu, beberapa hal berikut merupakan **peluang** bagi perekonomian Kabupaten Pemalang di Tahun 2018, antara lain

1. Letak geografis Kabupaten Pemalang berada di jalur pantura Jawa yang merupakan jalur sangat penting dalam perekonomian Indonesia,
2. Karakter masyarakat yang tenang, adem ayem dan cenderung meminimalisir konflik,
3. Komitmen dari pemerintah dan stakeholder lainnya untuk mengembangkan potensi lokal Kabupaten Pemalang,
4. Komitmen pemerintah untuk mengembangkan destinasi wisata baru di Kabupaten Pemalang,
5. Iklim usaha yang semakin kondusif dengan kemudahan perijinan,
6. Infrastruktur yang semakin memadai yang mendukung konektivitas antar daerah dan kelancaran arus manusia, barang dan jasa, sehingga dapat menekan biaya ekonomi,

- 7 Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan instansi pusat/daerah dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal,
- 8 Makin terbukanya peluang pasar bagi produk lokal Kabupaten Pemalang baik di lingkup domestik maupun ASEAN serta negara-negara tujuan ekspor lainnya,
- 9 Terbukanya arus informasi dan makin beragamnya pilihan media sehingga mendukung kegiatan promosi dan memudahkan mendapat informasi yang diperlukan dalam kegiatan ekonomi,
- 10 Menggeliatnya kegiatan pariwisata lokal sehingga membuka peluang bagi tumbuh kembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Pemalang

### **3 2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Berdasar pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah, yang pada dasarnya menjadi acuan/kerangka dalam pengelolaan APBD

#### **3.2 1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih Pendapatan Daerah terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta 3) Lain – lain pendapatan yang sah yang meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan Pendapatan daerah menjadi sumber pendanaanaan utama dalam pelaksanaan pembangunan Hal tersebut menjadikan upaya peningkatan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah menjadi prioritas dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal yang akan berbanding lurus dengan keleluasaan ruang dalam pencapaian visi kepala daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah tahun diarahkan melalui peningkatan pendapatan sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan, melalui upaya-upaya

- 1) Pemantapan Regulasi dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah, khususnya PBB dan BPHTB ,
- 2) Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan pendapatan,
- 3) Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan, melalui peningkatan validitas data aset, seperti luas sawah eks bondo desa yang akan dilelang melalui lelang garapan,

A 99

- 4) Meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah,
- 5) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD Penghasil,
- 6) Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut

- 1) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam (kehutanan, pertambangan umum dan perikanan) sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan, dan
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan,
- 3) Untuk kebijakan dana perimbangan ditambahkan penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP)

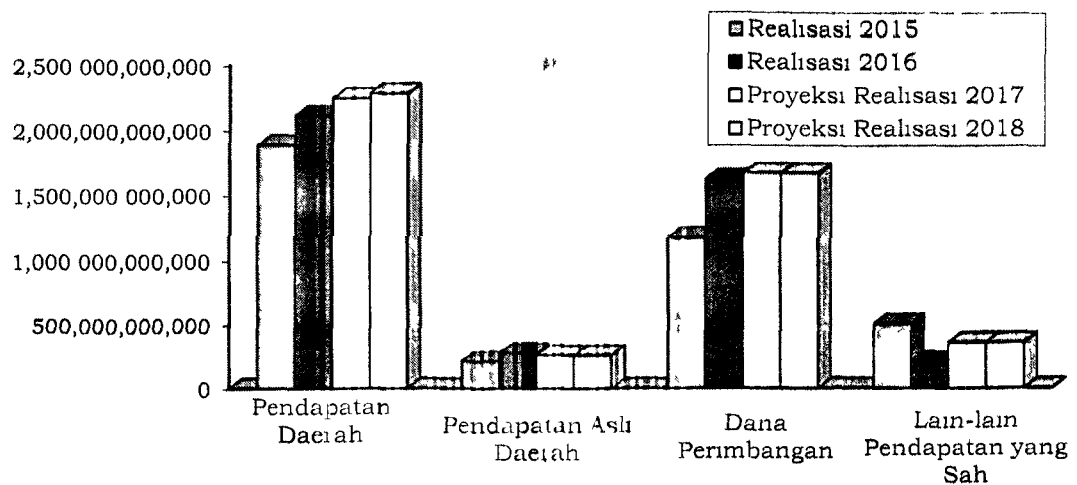
Berikut ini disajikan realisasi pendapatan daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015, serta proyeksi realisasi pendapatan Tahun 2016 dan 2017

**Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pemalang**

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi		Proyeksi Realisasi	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	1 888 045 671 273	2 112 626 257 689	2 246 298 597 000	2 284 500 150 000
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	211 365 995 59 4	275 570 031 34 0	257 103 975 00 0	257 103 975 00 0
a	Pendapatan Pajak Daerah	40 166 252 269	45 544 391 390	48 648 050 000	48 648 050 000
b	Pendapatan Retribusi Daerah	20 261 301 446	26 067 860 115	28 426 540 000	28 426 540 000
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13 746 971 117	37 153 819 470	16 864 523 000	16 864 523 000
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	137 191 470 76 0	166 803 960 36 5	163 164 862 00 0	163 164 862 00 0
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	1 175 641 249 717	1 628 709 256 509	1 675 552 462 0 00	1 675 552 462 0 00
<b>2 1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	1 175 641 249 717	1 507 813 090 084	1 675 552 462 000	1 675 552 462 000
a	Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak	28 165 127 717	39 469 913 885	38 567 631 000	38 567 631 000
b	Dana Alokasi Umum	1 058 982 530 0 00	1 197 916 501 0 00	1 197 916 501 0 00	1 197 916 501 0 00
c	Dana Alokasi Khusus	88 493 592 000	270 126 675 19 9	439 068 330 00 0	439 068 330 00 0
<b>2 2</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>		120 896 166 42 5		-
a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	120 896 166 42 5	-	-

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi		Proyeksi Realisasi	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	501 038 425 96 2	208 346 969 84 0	351 843 713 00 0	351 843 713 00 0
a	Pendapatan Hibah	3 068 450 660	9 046 077 840	60 000 000	60 000 000
b	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	106 013 128 30 2	-	137 160 752 00 0	137 160 752 00 0
c	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	295 959 400 00 0	-	-	0
d	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	29 377 915 000	-	51 341 500 000	51 341 500 000
e	Alokasi Dana Desa	-	-	163 281 461 00 0	163 281 461 00 0
f	Pendapatan Lainnya	-	199 296 692 00 0	-	-

**Gambar 3.6 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pemalang**



### 3 2 2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah akan mempunyai peran rui dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah.

# 30

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Belanja daerah mengedepankan efisiensi anggaran, mempertahankan serta pemenuhan terhadap hak-hak dasar masyarakat

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Pemalang diarahkan pada

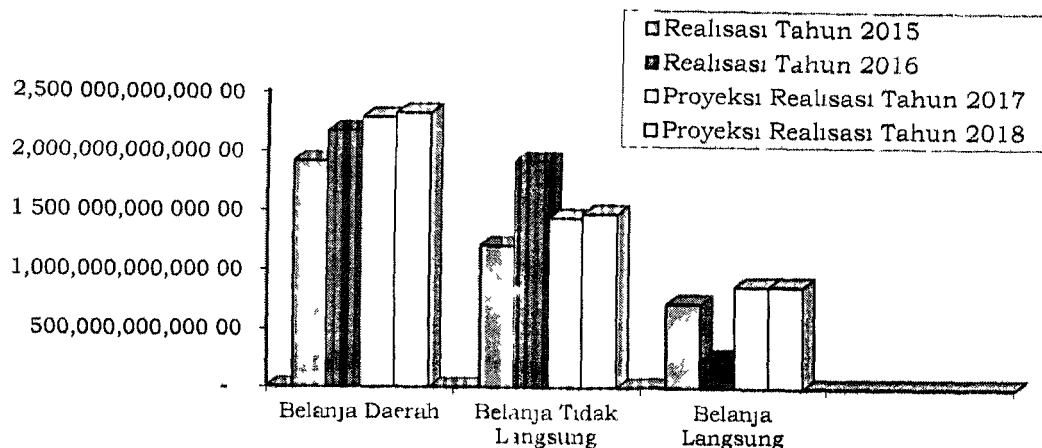
- 1) Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan
- 2) Penyediaan anggaran yang menunjang program penanggulangan kemiskinan antara lain Bantuan Sosial untuk pendampingan PNPM baik mandiri perkotaan maupun mandiri perdesaan, Hibah pemugaran rumah tidak layak huni, Fasilitas pendampingan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan Fasilitas pendampingan koordinasi pengalokasian beras bagi masyarakat miskin
- 3) Pembangunan yang mendukung pencapaian IPM dengan memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur

Berikut ini adalah tabel realisasi belanja Tahun 2015 dan 2016 serta proyeksi realisasi belanja Tahun 2017 dan 2018

**Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Pemalang**

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi		Proyeksi Realisasi	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1 905 266 162 905</b>	<b>2 163 122 915 653</b>	<b>2 277 731 86 7 000</b>	<b>2 315 912 286 000</b>
1	Belanja Tidak Langsung	1 198 289 038 345	1 912 192 302 763	1 427 188 02 9 000	1 463 061 124 000
a	Belanja Pegawai	977 138 769 76 4	1 133 211 267 1 92	1 078 939 024 000	1 105 912 500 0 00
	Belanja Barang	-	410 127 180 76 1	-	-
b	Belanja Bunga	71 186 939	14 330 850	-	-
c	Belanja Subsidi	-	-	-	-
d	Belanja Hibah	38 130 286 000	47 030 617 043	11 253 216 00 0	12 603 602 000
e	Belanja Bantuan Sosial	2 064 830 000	5 976 615 750	2 500 000 000	2 600 000 000
f	Belanja Bagi Hasil	3 684 035 613	-	7 006 781 000	7 707 459 000
g	Belanja Bantuan Keuangan	176 906 409 99 9	315 832 291 16 7	324 989 008 0 00	331 737 563 00 0
h	Belanja Tidak Terduga	293 500 000	599 700 000	2 500 000 000	2 500 000 000
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>706 977 124 56 0</b>	<b>246 074 547 68 6</b>	<b>850 543 838 000</b>	<b>852 851 162 00 0</b>
a	Belanja Pegawai	70 710 915 121	-	n a	n a
b	Belanja Barang dan Jasa	377 913 627 93 2	-	n a	n a
c	Belanja Modal	258 352 581 50 7	246 074 547 68 6	n a	n a
<b>3</b>	<b>Transfer</b>		<b>4 256 365 204</b>	-	-
	Transfer Bagi Hasil ke kab/kota/Desa		4 256 365 204		
a	Bagi Hasil Pajak		3 731 531 001	-	-
b	Bagi Hasil Retribusi		524 834 203	-	-

**Gambar 3.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Pemalang**



### 3 5 3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau pemberian pinjaman daerah.

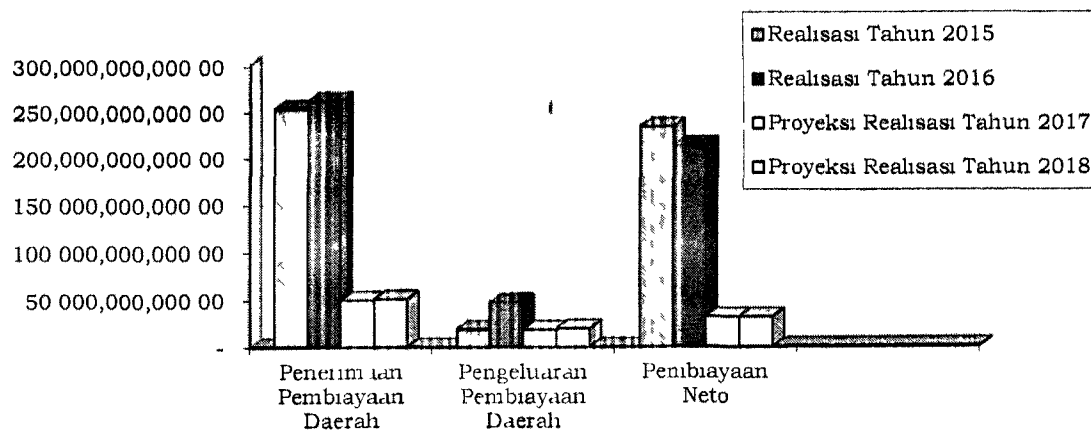
Berikut ini adalah tabel realisasi pembiayaan Tahun 2015 dan 2016 serta proyeksi realisasi belanja Tahun 2017 dan 2018

**Tabel 3 10. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Pemalang**

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi		Proyeksi Realisasi	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
1	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>252 942 812 504</b>	<b>261 617 785 076</b>	<b>49 799 490 0 00</b>	<b>50 827 090 0 00</b>
a	Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Lalu	252 933 812 5 04	261 474 585 0 76	45 399 490 00 0	46 827 090 00 0
b	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
c	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	9 000 000	143 200 000	4 400 000 000	4 000 000 000
2	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>18 862 253 1 02</b>	<b>47 853 626 5 51</b>	<b>18 366 220 0 00</b>	<b>19 414 954 0 00</b>
a	Pembentukan Dana Cadangan	0	-	-	-
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14 560 000 00 0	43 615 000 00 0	14 366 220 00 0	15 414 954 00 0
c	Pembayaran Pokok Utang	477 253 102	238 626 551	-	-
d	Pemberian Pinjaman Daerah	3 825 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi		Proyeksi Realisasi	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	234 080 559 402	213 764 158 525	31 433 270 0 00	31 412 136 0 00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	216 860 067 770	163 267 500 561	-	-

**Gambar 3 8 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Pematang**



Handwritten marks: a star and some illegible characters.

## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

#### 4 1 Visi Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ke dua pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan

Visi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan Sejahtera”**. Adapun makna frasa yang terkandung dalam pernyataan Visi tersebut sebagai berikut

##### 1 **Pemalang Hebat**

Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada Pemalang Hebat merupakan *ultimate goal* yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjati diri, mandiri dan sejahtera **Pemalang Hebat** juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para *stakeholders* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang

##### 2 **Berdaulat**

**Berdaulat** diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum

##### 3 **Berjati diri**

**Berjati diri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati

##### 4 **Mandiri**

**Mandiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal

##### 5 **Sejahtera**

**Sejahtera** diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak



- Visi tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu
- 1 Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong
  - 2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak
  - 3 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
  - 4 Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah
  - 5 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati
  - 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah
  - 7 Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat

#### **4 1 1 Keterkaitan Antara Visi Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang 2016-2021 dengan Visi Misi Pembangunan Nasional 2015-2019**

Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah **"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**, yang diwujudkan melalui pelaksanaan 7 Misi Pembangunan yaitu

- 1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
- 2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum
- 3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
- 4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
- 5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
- 6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
- 7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yaitu

- 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
- 2 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
- 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

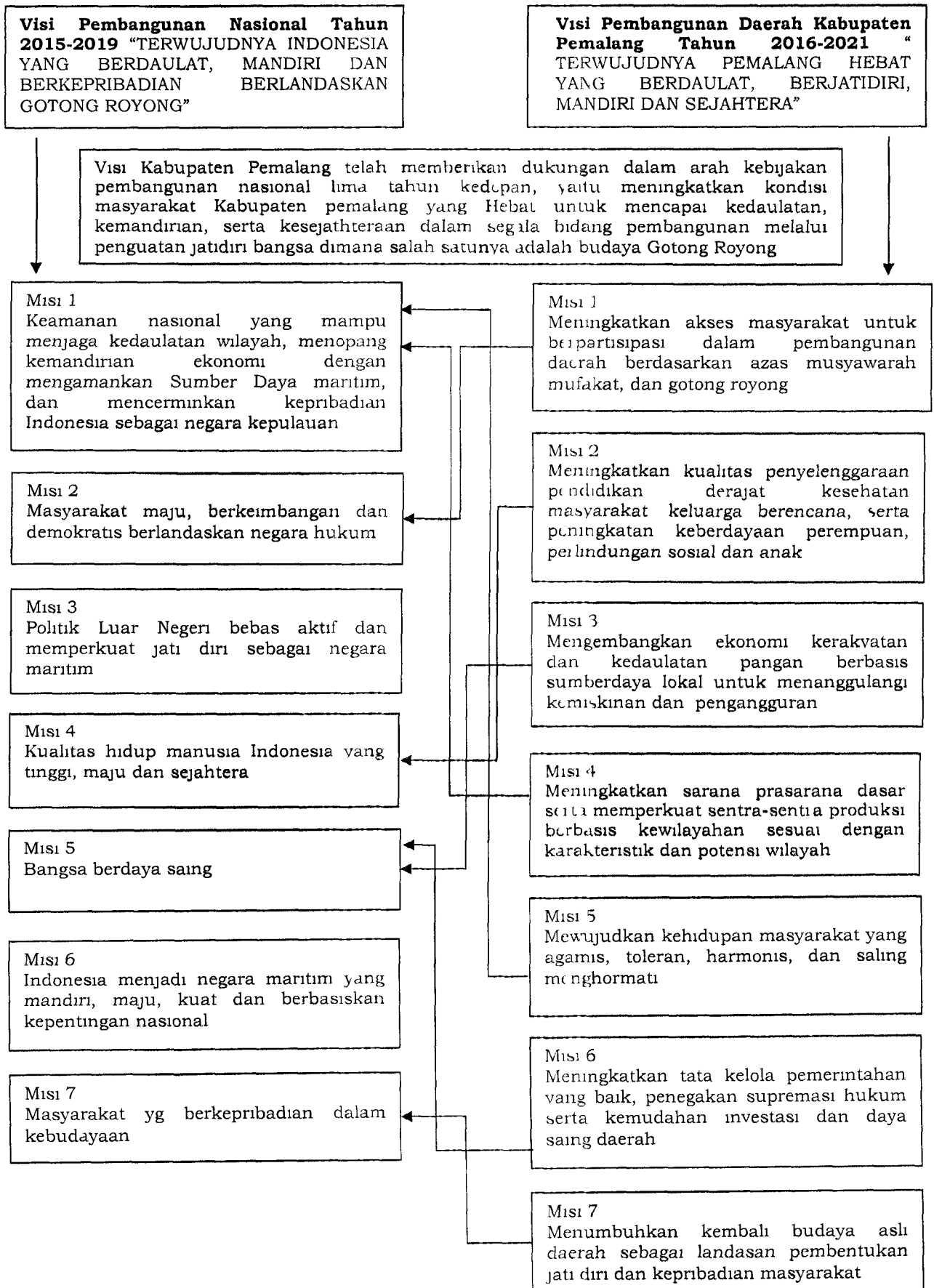
- 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
- 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik
- 8 Melakukan revolusi karakter bangsa
- 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam tiga dimensi pembangunan yaitu

- 1 Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter,
  - 2 Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri,
  - 3 Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar jawa dan kawasan timur
- Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

Adapun keterkaitan antara arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut

**Gambar 4 1. Keterkaitan antara Visi Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dengan Visi Misi Pembangunan Nasional 2015-2019**



# 30

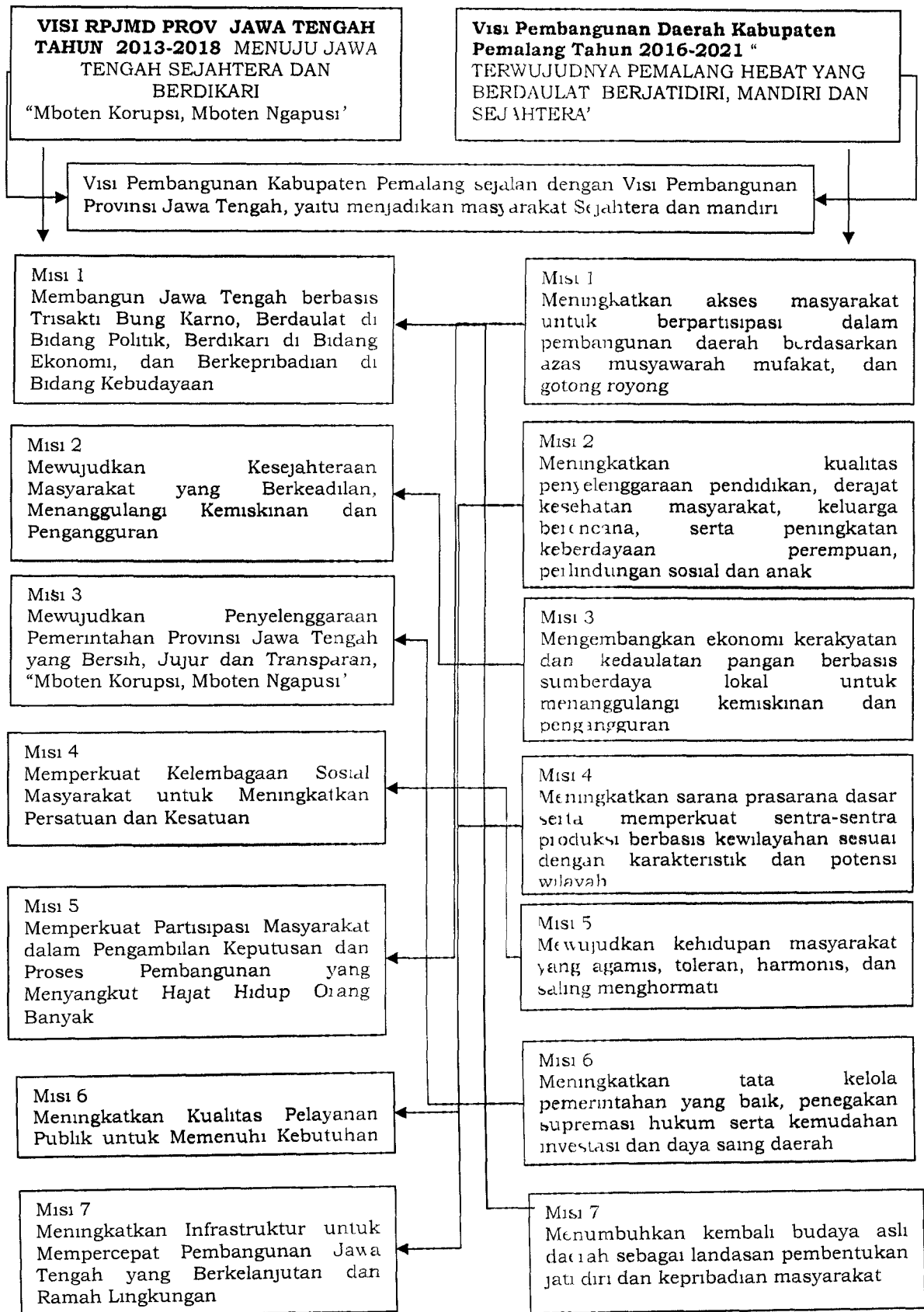
#### **4.1.2. Keterkaitan Antara Visi Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang 2016-2021 dengan Visi Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018**

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, pembangunan di Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk mencapai visi **“Menuju Jawa tengah Sejahtera dan Berdikari *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”**, yang ditempuh melalui tujuh misi pembangunan daerah yaitu

- 1 Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan,
- 2 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran,
- 3 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, *“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”*,
- 4 Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk memperkuat perstuan dan kesatuan,
- 5 Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembnagunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,
- 6 Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,
- 7 Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan

Adapun keterkaitan antara arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD adalah sebagai berikut

**Gambar 4 2 Keterkaitan antara Visi Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dengan Visi Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018**



# 94

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud

**Tabel 4 1 Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan**

Visi/Misi	Tujuan		Sasaran
<b>Visi Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera</b>			
<b>Misi 1</b> Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong	1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	a	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
		b	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
<b>Misi 2</b> Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak	1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkeadilan	a	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal
		b	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan
	2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	c	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		d	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB
	3 Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah	e	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik
	4 Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	h	Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS
		i	Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	<b>Misi 3</b> Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran	1 Meningkatkan tingkat kecukupan pangan masyarakat	a
b			Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan
2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		c	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang
		d	Menurunnya tingkat pengangguran
	3 Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi pengangguran		
	4 Menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang	e	Menurunnya penduduk miskin
<b>Misi 4</b> Meningkatkan sarana prasarana dasar	1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas	a	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan

# 99

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	
serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah	infstrukturi dasar dan penunjang secara merata		penunjang secara merata
	2 Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat	b	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat
	3 Meningkatkan kelestarian lingkungan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang kehidupan	c	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
<b>Misi 5</b> Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati	1 Meningkatkan toleransi dan hubungan beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat 2 Meningkatkan toleransi dan hubungan beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat	a	Terciptanya kehidupan beragama yang rukun dan damai
<b>Misi 6</b> Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah	1 Meningkatkan realisasi investasi yang didukung iklim investasi yang kondusif	a	Meningkatnya nilai realisasi investasi
	2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	b	Meningkatnya kapasitas Aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
	3 Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informasi guna menunjang pelayanan publik	c	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
<b>Misi 7</b> Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat		d	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi
	Menumbuhkembangkan budaya asli Kabupaten Pemalang sebagai kekayaan non ragawi dan Jati Diri Pemalang	a	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya, seni, dan kekayaan budaya Asli Pemalang

Penjabaran dari ketujuh misi tersebut di atas adalah sebagai berikut

**1 Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.**

Strategi

Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah

# 99

**Kebijakan:**

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan

**2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.**

**Strategi:**

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menempuh pendidikan melalui pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,
- 2) Meningkatkan minat baca masyarakat melalui pengembangan dan pembangunan perpustakaan masyarakat, penyediaan buku bacaan berkualitas, serta fasilitas penunjang perpustakaan,
- 3) Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan kualitas SDM Kesehatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, penanganan kesehatan ibu dan anak, dan penanganan manajemen kesehatan,
- 4) Menurunkan kematian ibu, bayi dan balita melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan peran serta masyarakat dan keluarga dalam deteksi resiko tinggi,
- 5) Menurunkan gizi buruk melalui pemberian makanan tambahan, peningkatan pendapatan, pemanfaatan pekarangan, dan keanekaragaman pangan,
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB melalui pemberdayaan PLKB dan kader di masyarakat,
- 7) Meningkatkan kapasitas, koordinasi dalam penguatan kelembagaan gender dan anak, Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender serta pengembangan Kabupaten Layak Anak,
- 8) Memberikan jaminan perlindungan dan rehabilitasi sosial difokuskan pada keluarga rentan, penyandang cacat dan anak terlantar

**Kebijakan:**

- 1) Peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat,
- 2) Peningkatan kualitas sarana perpustakaan daerah difokuskan pada pembangunan perpustakaan desa dan penggunaan TI,
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat baik promotif maupun preventif,
- 4) Perbaikan gizi masyarakat diprioritaskan pada kelangsungan hidup bayi usia 1 000 hari, penanganan gizi buruk, gizi kurang, balita *stunting*, dan gizi lebih,
- 5) Peningkatan pelayanan KB terutama pada wilayah pedesaan dan wilayah dengan tingkat *unmeet-need* tinggi,
- 6) Peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif,
- 7) Peningkatan penanganan PMKS secara komprehensif



**3 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.**

**Strategi.**

- 1) Mengoptimalkan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi Alsintan tepat guna, melakukan pengembangan pola dan sistem pertanian terutama pada jenis komoditas pertanian unggulan lokal,
- 2) Meningkatkan pemantauan pasokan dan harga pangan pokok masyarakat, penanganan wilayah rawan pangan, dan penyediaan cadangan pangan,
- 3) Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui pemberdayaan nelayan serta penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, intensifikasi perikanan budidaya dengan cara budidaya ikan yang benar (CBIB),
- 4) Peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberian bantuan peralatan bagi pengurus koperasi dan pelaku UMKM yang produktif,
- 5) Penguatan jejaring pelaku industri melalui sistem kluster, standarisasi mutu produk industri, peningkatan akses informasi pasar bagi pelaku industry, serta fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi,
- 6) Fasilitasi permodalan diprioritaskan kepada pedagang kecil dan menengah,
- 7) Pengembangan destinasi wisata yang sudah ada serta pembangunan destinasi wisata baru di wilayah Pemalang bagian selatan serta peningkatkan promosi melalui berbagai media,
- 8) Pembangunan potensi wisata, khususnya wisata alam yang terdapat di wilayah Pemalang Selatan,
- 9) Meningkatkan kualitas calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peluang pasar kerja,
- 10) Menurunkan jumlah penduduk miskin melalui pengurangan beban pengeluaran, pemberdayaan usaha produktif, dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan

**Kebijakan.**

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian,
- 2) Peningkatan penyediaan pangan secara adil dan merata,
- 3) Peningkatan sarpras perikanan tangkap dan budidaya, serta peningkatan kapasitas SDM perikanan tangkap dan budidaya,
- 4) Peningkatan kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM berbasis masyarakat,
- 5) Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pelaku industri kecil dan menengah dalam hal produksi maupun pemasaran,
- 6) Peningkatan hasil perdagangan berbasis potensi local,
- 7) Peningkatan potensi pariwisata,
- 8) Pembangunan sarana dan prasarana pada obyek wisata potensial,
- 9) Peningkatan kesempatan kerja dan kapasitas calon tenaga kerja,
- 10) Penanggulangan kemiskinan berbasis kewilayahan

**4 Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah**

**Strategi**

- 1) Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan,
- 2) Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi dan penyediaan air baku,

- 3) Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pedesaan (drainase, air bersih, sanitasi, permukiman kumuh),
- 4) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni,
- 5) Peningkatan RTH,
- 6) Peningkatan jaringan energi dan pemanfaatan EBT,
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, dan perbaikan sistem manajemen transportasi,
- 8) Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup.

**Kebijakan:**

- 1) Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang berbasis kewilayahan,
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keselamatan dalam berlalu lintas,
- 3) Peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan fasilitas penunjang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

**5 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati**

**Strategi**

- 1) Menciptakan kehidupan beragama yang rukun dan damai melalui peningkatan peran masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan dalam menjaga dan mempertahankan kondusivitas daerah

**Kebijakan.**

- 1) Peningkatan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelegen Daerah (Kominda), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

**6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.**

**Strategi**

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang cepat melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan peningkatan jaringan dengan investor,
- 2) Peningkatan kemudahan pelayanan baik perijinan maupun non perijinan, peningkatan sarana penunjang dan promosi peluang investasi,
- 3) Pengembangan kapasitas, kualitas dan etos kerja aparatur,
- 4) Pengembangan dan penerapatan regulasi secara konsisten dan menyeluruh,
- 5) Penerapan SPP, Maklumat pelayanan, dan pengukuran kepuasan masyarakat diprioritaskan kepada SKPD yang melakukan pelayanan publik,
- 6) Pembangunan titik *hotspot* di kawasan fasilitas umum kecamatan

**Kebijakan**

- 1) Peningkatan iklim investasi yang kondusif,
- 2) Peningkatan penerapan reformasi birokrasi secara baik menuju pemerintahan yang baik dan bersih
- 3) Peningkatan pelayanan publik terutama pada PD yang melakukan pelayanan publik,
- 4) Peningkatan akses TI kepada masyarakat

## **7 Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.**

### **Strategi**

- 1) Pengintegrasian materi pembelajaran seni dan budaya asli Pemalang ke dalam kurikulum muatan lokal sekolah,
- 2) Penyelenggaraan *event-event* seni budaya daerah yang hampir punah,
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan seni,
- 4) Inventarisasi, ekskavasi, dan pelestarian benda cagar budaya

### **Kebijakan.**

- 1) Menumbuhkembangkan kecintaan masyarakat terhadap budaya asli Pemalang melalui jalur pendidikan dan mengembangkan kesenian daerah

## **4 3 Proritas Pembangunan Daerah**

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dengan perencanaan Pusat yang berada dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut mengandung makna bahwa perencanaan pembangunan daerah harus sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional.

Hal yang sama dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Daerah untuk melaksanakan program strategis nasional. Demikian pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang mengamanatkan penyusunan RKPD Tahun 2017 harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program dalam rencana kerja pemerintah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

### **4 3 1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018**

Pembangunan jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di Tahun 2019, antara lain meliputi

- 1 Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%,
- 2 Laju inflasi sebesar 3,5%,
- 3 PDB per kapita sebesar Rp 72 217 ribu,
- 4 Indeks Gini sebesar 0,36,
- 5 Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0%,
- 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3,
- 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%

Guna mencapai sasaran pembangunan nasional sesuai dengan tema dimaksud, pendekatan perencanaan yang digunakan adalah tematik-holistik, integratif dan spasial. **Tematik-holistik** diartikan bahwa untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementerian atau lembaga yang terkait. **Integratif** artinya bahwa kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. **Spasial** dimaksudkan bahwa kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.

\* 99

Prioritas pembangunan nasional dijabarkan dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta kondisi perlu. Adapun prioritas pembangunan nasional Tahun 2018 adalah sebagai berikut

#### **1 Dimensi Pembangunan Manusia**

Dimensi pembangunan manusia meliputi revolusi mental, kesehatan, pendidikan, perumahan dan permukiman

##### **a. Revolusi Mental**

Revolusi mental merupakan upaya mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan yang religius

##### **Arah kebijakan Revolusi Mental:**

- 1) Reformasi Birokrasi Pemerintahan
- 2) Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
- 3) Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa
- 4) Penguatan Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan
- 5) Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa

##### **b. Pembangunan Kesehatan**

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat

##### **Arah kebijakan:**

- 1) Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
- 2) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan,
- 3) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat,
- 4) Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

##### **Kebijakan terkait Revolusi Mental**

- 1) Meningkatkan responsivitas pelayanan kesehatan antara lain dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan rujukan *online* dan *telemedicine*,
- 2) Efektivitas program promotif dan preventif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
- 3) Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll)

##### **c. Pembangunan Pendidikan**

Pembangunan pendidikan dicapai dengan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing

##### **Arah kebijakan:**

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah,
- 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perkuatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, serta perkuatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel,
- 3) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru yang merata,
- 4) Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu pendidikan keguruan,
- 5) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini,

- 6) Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja,
- 7) Meningkatkan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi,
- 8) Meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan

**Kebijakan terkait Revolusi Mental**

- 1) Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter/budi pekerti dan budaya bangsa,
- 2) Menciptakan lingkungan pendidikan yang menumbuhkan integritas, bebas intimidasi dan kekerasan,
- 3) Menegakkan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dan sertifikat palsu, perilaku mencontek, plagiat, bolos)

**d Pembangunan Perumahan dan Permukiman**

**Arah kebijakan**

- 1) Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya serta penciptaan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan,
- 2) Peningkatan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, serta penyelesaian rencana penanganan kawasan kumuh dalam rangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh,
- 3) Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, penerapan manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat,
- 4) Menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air

**Kebijakan terkait Revolusi Mental**

- 1) Perilaku hemat air,
- 2) Stop buang sampah di sungai dan saluran,
- 3) Stop buang air besar sembarangan (langsung dan tidak langsung),
- 4) Tertib pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan),
- 5) Gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle),
- 6) Gerakan menabung untuk perumahan

**2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan**

Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi pembangunan kedaulatan pangan, kemaritiman dan kelautan, kedaulatan energi, pariwisata, percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi

**a Pembangunan Kedaulatan Pangan**

Pembangunann kedaulatan pangan ditujukan untuk menyelaraskan kebijakan produksi pangan dengan pergeseran permintaan. Dari sisi konsumsi, kebijakan pangan diarahkan pada perbaikan kualitas konsumsi gizi masyarakat, ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga pangan. Pada sisi produksi, kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas, diversifikasi, dan penanganan gangguan terhadap produksi pangan

**Arah kebijakan:**

- 1) Peningkatan produksi padi dan pangan lain, terutama produktivitas, diversifikasi dan efisiensi rantai pasokan pangan,
- 2) Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat,
- 3) Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, terutama kecukupan nutrisi bagi masyarakat miskin dan keseimbangan gizi bagi masyarakat,
- 4) Penanganan gangguan terhadap produksi pangan

**Kebijakan terkait Revolusi Mental**

- 1) Mendorong konsumen untuk cerdas, hemat dan bijaksana dalam mengkonsumsi makanan, termasuk penurunan food waste,
- 2) Mendorong produsen dan pedagang agar kreatif, cerdas dan inovatif dalam membaca dan memanfaatkan peluang pasar,
- 3) Mendorong produsen untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, pupuk dan pestisida,
- 4) Memperkuat penegakan hukum dan disiplin
- 5) Mendorong kerjasama antar pelaku ekonomi di bidang pangan, termasuk antar pelaku usaha skala kecil dengan pelaku usaha skala menengah dan besar

**b Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan**

Kemaritiman dan kelautan merupakan salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang menekankan peran laut sebagai sumber kesejahteraan dan kepentingan bangsa ke depan

**Arah kebijakan:**

- 1) Konektivitas (tol) laut dan industri maritim,
- 2) Peningkatan industri perikanan dan hasil laut,
- 3) Penataan Ruang Laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari,
- 4) Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam,
- 5) Penanggulangan dan penyelesaian Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dan keamanan laut,
- 6) Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau-pulau kecil

**Kebijakan terkait Revolusi Mental**

- 1) Perubahan *mindset* sebagai bangsa maritim,
- 2) Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayanan Perintis,
- 3) Penegakan hukum dan disiplin

**c Pembangunan Kedaulatan Energi**

Kedaulatan energi akan selalu menjadi tantangan karena terbatasnya pasokan energi primer dalam 5 tahun ke depan

**Arah kebijakan**

- 1) Meningkatkan produksi energi primer,
- 2) Meningkatkan cadangan energi,
- 3) Meningkatkan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi,
- 4) Meningkatkan aksesibilitas energi,
- 5) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi

**Kebijakan terkait Revolusi Mental**

- 1) Penguatan tata kelola (*good governance*) sumberdaya energi,
- 2) Pemanfaatan energi secara efisien,
- 3) Pelayanan BUMN energi yang memuaskan pelanggan,
- 4) Penambangan yang ramah lingkungan,

- 5) Penegakan hukum dan disiplin di sektor energi

#### **d Pembangunan Pariwisata**

##### **Arah kebijakan.**

- 1) Pemasaran Pariwisata Nasional mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara,
- 2) Pembangunan Destinasi Pariwisata meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri,
- 3) Pembangunan Industri Pariwisata meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran,
- 4) Pembangunan Kelembagaan Pariwisata membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional

##### **Kebijakan terkait Revolusi Mental**

- 1) Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang nyaman bagi pelancong,
- 2) Petugas yang ramah dan melayani,
- 3) Penegakan hukum dan disiplin

#### **e Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)**

##### **Arah kebijakan.**

- 1) Pertumbuhan Industri
- 2) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa

##### **Kebijakan terkait Revolusi Mental**

- 1) Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri,
- 2) Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi,
- 3) Penegakan hukum dan disiplin

### **3 Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan**

#### **a Pemerataan Antarkelompok Pendapatan**

Salah satu agenda prioritas nasional adalah memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah dapat tumbuh jauh lebih baik

##### **Arah kebijakan:**

- 1) Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas
- 2) Pengembangan ekonomi produktif
- 3) Perluasan peningkatan pelayan dasar, melalui
- 4) Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif

##### **Kebijakan terkait Revolusi Mental**

- 1) Redesain program yang memungkinkan perubahan *mindset* masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri dan bermartabat,
- 2) Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana,
- 3) Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat,
- 4) Penegakan aturan dan disiplin

#### **b Reforma Agraria**

##### **Arah kebijakan**

- 1) Reforma agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat,
- 2) Membangun sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif,

- 3) Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan,
- 4) Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

**Kebijakan terkait Revolusi Mental**

- 1) Pelayanan pertanahan yang cepat, murah, dan memuaskan,
- 2) Pembentukan Lembaga Penyediaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
- 3) Kementerian ATR/BPN menjadi “*leading sector*” pelaksanaan Reformasi Agraria

**c. Pembangunan Daerah Perbatasan**

Arah pembangunan kawasan perbatasan negara adalah mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga

**Arah kebijakan.**

- 1) Pembangunan infrastruktur Kawasan Perbatasan,
- 2) Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara,
- 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi

**Kebijakan terkait Revolusi Mental**

- 1) Peningkatan kemudahan dan keceatan pelayanan imigrasi, kepabeanan, karantina dan keamanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
- 2) Mengubah sikap dan cara pandang bahwa kawasan perbatasan bukan halaman belakang namun menjadi beranda negara

**d. Pembangunan Daerah Tertinggal**

Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan perwujudan dimensi pemerataan dan kewilayahan khususnya Nawacita ketiga (3), yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan

**Arah kebijakan:**

- 1) Percepatan pembangunan infrastruktur /konektivitas,
- 2) Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan,
- 3) Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar public,
- 4) Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas

**Kebijakan terkait Revolusi Mental**

- 1) Peningkatan kreativitas masyarakat di daerah tertinggal untuk mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat,
- 2) Membangun semangat kompetisi untuk mengejar ketertinggalan,
- 3) Penegakan hukum dan disiplin

**e. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan**

Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, telah mengedepankan desa sebagai fokus pembangunan nasional 2015-2019

**Arah kebijakan**

- 1) Pemenuhan Standar pelayanan Minimum di desa termasuk kawasan transmigrasi,
- 2) Pembangunan SDM, pemberdayaan dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk kawasan transmigrasi,

\* 9 9



- 3) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk kawasan transmigrasi,
- 4) Penguatan pemerintah desa,
- 5) Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan,
- 6) Pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota,
- 7) Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan

**Kebijakan terkait Revolusi Mental.**

- 1) Penguatan masyarakat desa yang berkualitas, produktif, dan inovatif,
- 2) Mengedepankan modal sosial budaya masyarakat desa dan desa adat dalam pembangunan desa,
- 3) Penegakan hukum dan pengawasan oleh masyarakat desa,
- 4) Fasilitasi dan pendampingan untuk penguatan pemerintah desa dan kader masyarakat desa menuju desa mandiri,
- 5) Penguatan daya sing ekonomi desa dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan

**f Pembangunan Perkotaan**

**Arah kebijakan.**

- 1) Mewujudkan sistem perkotaan untuk pengurangan kesenjangan,
- 2) Membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP),
- 3) Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana,
- 4) Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan TIK,
- 5) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, patisipatif, dan personal


**Kebijakan terkait Revolusi Mental**

- 1) Pembangunan kota yang inklusif, memperhatikan kebutuhan kelompok disabel, wanita, anak dan lansia,
- 2) Pelayanan terpadu keamanan, ketertiban, dan kondisi darurat (kesehatan dan kebencanaan) kota,
- 3) Penegakan hukum dan disiplin masyarakat kota,
- 4) Membangun pengetahuan masyarakat kota melalui pendidikan formal dan informal, dan TIK,
- 5) Penyederhanaan proses perijinan, perpajakan dan kepabeanan untuk meningkatkan investasi perkotaan,
- 6) Pemerintahahn kota yang transparan, akuntabel, dan patisipatif,
- 7) Penguatan inovasi dan kreativitas masyarakat kota berdasarkan karakter lokalnya

**g Konektivitas**

**Arah kebijakan**

- 1) Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan terutama pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua, penyelesaian pembangunan Jalan tol Trans Jawa, Jalan tol Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dengan memastikan penyelesaian pembebasan lahan,
- 2) Mempercepat penyelesaian pembangunan jalur ganda kereta api terutama lintas selatan Jawa, jalur kereta api Lintas Sumatera dan Sulawesi serta memulai pembangunan jalur kereta api di Kalimantan dan Papua,

\* 

- 3) Meningkatkan jaringan transportasi yang mendukung aksesibilitas dari dan menuju kawasan strategis, seperti Kawasan Pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, serta aksesibilitas pada wilayah terpencil, perbatasan dan daerah tertinggal,
- 4) Mengurangi kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan melalui pembangunan fasilitas dan sistem angkutan umum massal yang modern, maju, aman, nyaman dan harga yang terjangkau, baik berbasis rel maupun *bus rapid transit* yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi lainnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota,
- 5) Mempercepat pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan sebagai tulang punggung konektivitas antarpulau (tol laut) yang terintegrasi dengan simpul moda transportasi lainnya,
- 6) Membangun dan meningkatkan kapasitas bandara baik sebagai pengumpul dan pengumpan, terutama bandara pada pintu-pintu utama pariwisata, serta bandara-bandara lainnya untuk mendukung aksesibilitas dan perekonomian wilayah dan penanganan bencana,
- 7) Mendorong pengembangan industri nasional dan pemanfaatan produk industri dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan nilai tambah domestik dan daya saing industri nasional,
- 8) Meningkatkan standar keselamatan pelayanan transportasi sesuai dengan standar keselamatan nasional, serta mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang telah mempertimbangkan kemampuan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan memberikan dampak minimum terhadap lingkungan,
- 9) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM transportasi yang berkompeten baik melalui penerapan standar kompetensi dan peningkatan kualitas fasilitas sarana-prasarana pendidikan yang mengacu kepada standar internasional,
- 10) Mentransformasikan Kewajiban Pelayanan USO (Universal Service Obligation) menjadi *broadband-ready*

#### **Kebijakan terkait Revolusi Mental**

- 1) Pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris,
- 2) Masa depan Indonesia tergantung pada keberhasilan pembangunan yang merata dan pembangunan maritim,
- 3) Penegakan hukum dan disiplin

#### **4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan**

##### **a Reformasi Regulasi, Kepastian dan Penegakan Hukum**

###### **1) Reformasi Regulasi**

Reformasi regulasi merupakan perubahan-perubahan yang dimaskdukan untuk meningkatkan kualitas regulasi, baik secara individual maupun secara integral (terintegrasi dalam suatu sistem regulasi yang komprehensif dan utuh)

###### **2) Kepastian dan Penegakan Hukum**

Arah kebijakan

- Penegakan hukum yang berkualitas
- Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif
- Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan

✱ 40

**b Stabilitas Kemanan dan Ketertiban**

Arah kebijakan

- 1) Deteksi dini dan bebas ancaman terorisme,
- 2) Keselamatan dan kemanan laut yang terkendali,
- 3) Membangun lingkungan masyarakat bersih dan penyalahgunaan narkoba,
- 4) Peningkatan pelayanan prima kepolisian,
- 5) Postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbatasan yang aman,
- 6) Keamanan data dan informasi (keamanan siber)

**c. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi**

Arah kebijakan

- 1) Penegakan kualitas lembaga demokrasi dan hak-hak politik, serta kebebasan sipil,
- 2) Peningkatan efektivitas penanggulangan konflik kekerasan dan ancaman terorisme,
- 3) Peningkatan akses dan kualitas informasi publik,
- 4) Pemeliharaan stabilitas kemanan kawasan,
- 5) Perlindungan WNI/BHI di luar negeri,
- 6) Penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan, termasuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular,
- 7) Pemantapan peran di ASEAN dan efektivitas politik luar negeri bebas aktif

**d. Reformasi Birokrasi**

Arah kebijakan

- 1) Mewujudkan birokrasi efektif dan efisien,
- 2) Mewujudkan birokrasi yang melayani,
- 3) Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel

**5. Pembangunan Ekonomi**

**a Perbaiki Iklim Investasi dan Iklim Usaha**

**Arah kebijakan:**

Penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana layanan/fasilitas investasi, yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha asing dan domestik untuk berinvestasi dan berusaha di seluruh wilayah Indonesia

**b Peningkatan Ekspor Non Migas**

**Arah kebijakan:**

Peningkatan ekspor nonmigas barang dan jasa yang bernilai tambah lebih tinggi dengan produk yang lebih bervariasi, serta meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam mendorong potensi produk ekspor daerah

**c Reformasi Fiskal**

Sasaran umum dan arah kebijakan di Tahun 2017 adalah

- 1) Rasio perpajakan sebesar 12,0 persen,
- 2) Subsidi energi sebesar 0,6 persen,
- 3) Belanja modal sebesar 1,8 persen,
- 4) Surplus/Defisit APBN sebesar -2,2 persen,
- 5) Rasio Utang pemerintah sebesar 25,7 persen

#### **4.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018**

Pembangunan jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2018, antara lain meliputi

- 1 Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 - ,
- 2 Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1 persen,
- 3 PDB per kapita sebesar Rp 8,39 juta,
- 4 Indeks Gini sebesar 0,337,
- 5 Persentase penduduk miskin sebesar 7,80 – 7,60 persen,
- 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,94,
- 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,32 – 4,20 persen

Sementara itu, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 diarahkan untuk **“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari”**, dengan prioritas meliputi

- 1 Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada
  - a Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui penekatan OVOP, penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi, perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang,
  - b Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal,
  - c Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi,
  - d Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, kondisi kerja yang kompetitif, perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja,
  - e Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata
- 2 Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin, dengan fokus pada
  - a Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan berupa beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, perbaikan rumah tidak layak huni, listrik perumahan, jamban dan kelambu,

- b Jaminan perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif,
  - c Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS,
  - d Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal, pemberdayaan UMKM, permodalan bagi Kelompok Usaha bersama (KUBE) dan UKM, pelatihan dan keterampilan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja, pemberdayaan, pelatihan dan pemberian modal bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi,
  - e Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah,
  - f Penyediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar,
  - g Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan data PBDT 2015
- 3 Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, dengan fokus pada
- a Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP/MTs/SMPLB,
  - b Penyediaan pendampingan BOS untuk peningkatan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus,
  - c Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB,
  - d Pendampingan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit, sertifikasi tenaga Kesehatan, pendampingan masyarakat beresiko kesehatan melalui program OSOC, penyelesaian pentahapan pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit,
  - e Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),
  - f Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda untuk meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan
- 4 Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, dengan fokus pada
- a Pengembangan komoditas padi gogo, padi lahan salinitas, jagung hibrida dan intensifikasi kedelai,
  - b Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran,
  - c Pemanfaatan lahan melalui *integrated farming system* (IFS) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai,
  - d Peningkatan penanaman dan intensifikasi tebu,
  - e Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing,
  - f Pengembangan perikanan budidaya melalui pemanfaatan pakan mandiri dan pengembangan perikanan tangkap dengan optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan,
  - g Pembangunan dan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) serta terwujudnya lumbung cadangan Pemerintah Provinsi,
  - h Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE),
  - i Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap *energy mix* di Jawa Tengah

4

- 5 Pemanfaatan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada
  - a Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (*bottle-neck*), ruas penghubung wilayah pantai utara-selatan, ruas jalan di perbatasan, peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian
  - b Penanganan infrastruktur perhubungan dengan meningkatkan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (*blackspot*) dan penataan sistem transportasi massal untuk mengatasi kemacetan
  - c Penanganan infrastruktur jaringan irigasi, penanganan sungai dan pantai serta penanganan bangunan penampungan air pada daerah lumbung pangan, rawan banjir dan kekeringan
  - d Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan dan miskin pedesaan serta pengolahan sampah/TPA
  - e Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (*mangrove*) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah
  - f Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota berdampak bencana
  - g Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
  - h Pengembangan *Early Warning System* bencana berbasis masyarakat
  - i Pengembangan masyarakat tangguh bencana
- 6 Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada
  - a Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi
  - b Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi
  - c Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu Pengembangan
    - 1) Manajemen perubahan yang dilaksanakan antara lain melalui implementasi penetapan agent of change (Kader Revolusi Mental) dan kode etik Aparatur Sipil Negara
    - 2) Penguatan Pengawasan yang bebas dari KKN melalui implemetasi Aksi PPK, penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media, optimalisasi SIMWAS Online untuk percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
    - 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui optimalisasi penggunaan e-SAKIP, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik
    - 4) Penataan dan Penguatan Organisasi melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, penataan kelembagaan non struktural
    - 5) Penataan Tatalaksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi dan pembentukan PTSP
    - 6) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional, dan berkinerja tinggi melalui

- pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka
- 7) Peraturan Perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta selaras melalui penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan, pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah, pemantauan dan evaluasi Perda/Perkada secara berkala
  - 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi dengan menyusun *Standart Operational Procedure* dan penyediaan media pengaduan masyarakat
- d Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis Akrua
  - e Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompeten, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh sistem pembinaan karir yang jelas dan terbuka (*merit system*)
  - f Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - g Gerakan revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan budaya gotong-royong
  - h Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat
  - i Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keamanan dan ketakwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS guna menangkal upaya destruktif
  - j Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan melalui pembangunan asrama atlet dan gedung terpadu II di Jatidiri

#### **4 3 3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2018**

Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun ke-8 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dengan berbagai permasalahan dan isu strategis, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah tahun 2018 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan pada **“Pengembangan ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah menuju Pemalang mandiri”**

Guna mencapai tujuan pembangunan daerah tahun 2018 tersebut serta dengan memperhatikan permasalahan dasar yang dihadapi Kabupaten Pemalang hingga saat ini, yaitu kemiskinan yang tinggi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, tingginya Angka Kematian Ibu, tingginya Angka Kematian Balita dan masih terjadinya kasus Balita Gizi Buruk, maka pembangunan difokuskan pada

- 1 Optimalisasi sektor koperasi, usaha kecil dan menengah melalui peningkatan kapasitas, pembinaan kelembagaan maupun sumberdaya manusia koperasi dan pelaku UMKM yang produktif,
- 2 Optimalisasi infrastruktur jalan dan jembatan serta transportasi darat yang menghubungkan hingga tingkat perdesaan yang memudahkan perpindahan barang dan jasa
- 3 Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan dan perluasan layanan dasar,

- 4 Peningkatan pembangunan pertanian dalam arti luas melalui upaya pengembangan budidaya pertanian, peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap dan pengembangan peternakan,
- 5 Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin,
- 6 Peningkatan pariwisata melalui upaya pengembangan destinasi wisata baru, peningkatan sarana dan prasarana, promosi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia disertai dengan upaya menjaga kelestarian budaya,
- 7 Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah

#### **4.3.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang Tahun 2018**

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang harus sinkron dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional



6-6

**Tabel 4.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang Tahun 2018**

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang	Keterkaitan
<b>1 Dimensi Pembangunan Manusia</b> a Revolusi Mental b Pembangunan Kesehatan c Pembangunan Pendidikan d Pembangunan Perumahan dan Permukiman	1 Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan,	1 Optimalisasi sektor koperasi, usaha kecil dan menengah melalui peningkatan kapasitas, pembinaan kelembagaan maupun sumberdaya manusia koperasi dan pelaku UMKM yang produktif	
<b>2 Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan</b> a Pembangunan Kedaulatan Pangan b Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan c Pembangunan Kedaulatan Energi d Pembangunan Pariwisata e Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	2 Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin,	2 Optimalisasi infrastruktur jalan dan jembatan serta transportasi darat yang menghubungkan hingga tingkat perdesaan yang memudahkan perpindahan barang dan jasa	
<b>3 Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan</b> a Pemerataan Antarkelompok Pendapatan b Reforma Agraria c Pembangunan Daerah Perbatasan d Pembangunan Daerah Tertinggal e Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan f Pembangunan Perkotaan g Konektivitas	3 Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar	3 Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan dan perluasan layanan dasar,	
<b>4 Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan</b> a Reformasi Regulasi, Kepastian dan Penegakan Hukum b Stabilitas Kemanan dan Ketertiban c Konsolidasi Demokrasi dan	4 Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan	4 Peningkatan pembangunan pertanian dalam arti luas melalui upaya pengembangan budidaya pertanian, peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap dan pengembangan peternakan,	

4-9

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang	Keterkaitan
Efektivitas Diplomasi d Reformasi Birokrasi			
<b>5 Pembangunan Ekonomi</b> a Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha b Peningkatan Ekspor Non Migas c Reformasi Fiskal	5 Pemanfaatan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana	5 Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin,	
	6 Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	6 Peningkatan pariwisata melalui upaya pengembangan destinasi wisata baru, peningkatan sarana dan prasarana, promosi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia disertai dengan upaya menjaga kelestarian budaya,	
		7 Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah	

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2018 yang diarahkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah menuju Pemalang mandiri, maka program dan kegiatan prioritas daerah selanjutnya dijabarkan ke dalam pelaksanaan urusan pemerintah juga ditekankan pada upaya-upaya antara lain

- 1 Optimalisasi sektor koperasi, usaha kecil dan menengah melalui peningkatan kapasitas, pembinaan kelembagaan maupun sumberdaya manusia koperasi dan pelaku UMKM yang produktif,
- 2 Optimalisasi infrastruktur jalan dan jembatan serta transportasi darat yang menghubungkan hingga tingkat perdesaan yang memudahkan perpindahan barang dan jasa
- 3 Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan dan perluasan layanan dasar,
- 4 Peningkatan pembangunan pertanian dalam arti luas melalui upaya pengembangan budidaya pertanian, peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap dan pengembangan peternakan,
- 5 Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin,
- 6 Peningkatan pariwisata melalui upaya pengembangan destinasi wisata baru, peningkatan sarana dan prasarana, promosi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia disertai dengan upaya menjaga kelestarian budaya,
- 7 Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan

#### 5 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

##### 1 Pendidikan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

##### a Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Fokus kegiatan pada pembangunan gedung sekolah, pembangunan sarana dan prasarana bermain, pengadaan mebeluer sekolah, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini formal, publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini non formal dan informal

**b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**

Fokus kegiatan pada pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan dasar, rehabilitasi bangunan sekolah, pemberian beasiswa, Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar, penyelenggaraan akreditasi dan ujian sekolah/nasional

**c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Fokus kegiatan pada pelaksanaan sertifikasi pendidik, pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG), pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik, pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan dan pendataan tenaga pendidik dan kependidikan untuk kenaikan pangkat

**d. Program Manajemen Pendidikan**

Fokus kegiatan pada pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan, sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan dan penerapanan sistem dan informasi manajemen pendidikan Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2017 yaitu Persentase Sekolah terakreditasi B dan A sebesar 91,54

**2. Kesehatan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**

Fokus kegiatan pada pengadaan, peningkatan pemerataan dan peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan, pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan serta pengadaan sarana dan prasarana instalasi farmasi

**b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat**

Fokus kegiatan pada pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan, peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan daerah dan peningkatan penanggulangan kesehatan akibat bencana

**c. Program Pengawasan Obat dan Makanan**

Fokus kegiatan pada peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

**d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Fokus kegiatan pada pengembangan media promosi dan informasi serta penyuluhan dan pembinaan kesehatan masyarakat

**e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat**

Fokus kegiatan pada penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, pemberian tambahan makanan dan vitamin, Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya, serta Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

\* 70

**f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat**

Fokus kegiatan pada pengkajian pengembangan lingkungan sehat, penyuluhan menciptakan lingkungan sehat, sosialisasi kebijakan lingkungan sehat, peningkatan penyehatan lingkungan TTU, TPM dan industri, pengembangan wilayah sehat, dan pengelolaan limbah pelayanan kesehatan

**g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**

Fokus kegiatan pada penyemprotan/fogging sarang nyamuk, pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging, pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, peningkatan imunisasi, peningkatan *surveillance* epidemiologi dan penanggulangan wabah, penanganan kejadian pasca imunisasi, pelayanan kesehatan calon haji, pelayanan vaksinasi bagi bayi, wus dan ibu hamil, dan pengendalian penyakit menular langsung

**h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**

Fokus kegiatan pada evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan, penyelenggaraan registrasi dan sertifikasi kesehatan, peningkatan kompetensi SDM kesehatan

**i Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya**

Fokus kegiatan pada pembangunan, rehabilitasi sedang/berat dan pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Poskesdes

**j. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

Fokus kegiatan pada kemitraan asuansi kesehatan masyarakat dan pengobatan bagi pasien kurang mampu

**k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia**

Fokus kegiatan pada pelayanan pemeliharaan kesehatan

**l. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan**

Fokus kegiatan pada pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

**m. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**

Fokus kegiatan pada perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu, pembinaan tugas pokok dan fungsi bidan, peningkatan kesehatan ibu dan bayi serta pembinaan kesehatan keluarga

**n. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD**

Fokus kegiatan pada pelayanan dan pendukung pelayanan pada BLUD RSUD

**o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional**

Fokus kegiatan pada pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas Banyumudal Kecamatan Moga, Puskesmas Warungpring Kecamatan Warungpring, Puskesmas Pulosari Kecamatan Pulosari, Puskesmas Belik Kecamatan Belik, Puskesmas Watukumpul Kecamatan Watukumpul, Puskesmas Kebandaran Kecamatan Bodeh, Puskesmas Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang, Puskesmas Randudongkal Kecamatan Randudongkal, Puskesmas Kalimas Kecamatan Randudongkal, Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang, Puskesmas Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, Puskesmas Kebondalem Kecamatan Pemalang, Puskesmas Banjardawa Kecamatan Taman, Puskesmas Kabunan Kecamatan Taman,

\* 98

Puskesmas Jebed Kecamatan Taman, Puskesmas Petarukan Kecamatan Petarukan, Puskesmas Klareyan Kecamatan Petarukan, Puskesmas Losari Kecamatan Ampelgading, Puskesmas Purwoharjo Kecamatan Comal, Puskesmas Sarwodadi Kecamatan Comal, Puskesmas Rowosari Kecamatan Ulujami, dan Puskesmas Mojo Kecamatan Ulujami

**p. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja**

Fokus kegiatan pada penyuluhan kesehatan anak dan remaja, dan peningkatan kesehatan anak dan remaja

**q. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular**

Fokus kegiatan pada pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

**r. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan**

Fokus kegiatan pada penyusunan data base dan laporan capaian kinerja program kesehatan daerah, dan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Fokus kegiatan pada pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan

**b. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan**

Fokus kegiatan pada rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat

**c. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

Fokus kegiatan pada rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

**d. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Fokus kegiatan pada pembangunan/peningkatan infrastruktur, dan pembangunan/penataan kawasan

**e. Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong**

Fokus kegiatan pada pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

**f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**

Fokus kegiatan pada perencanaan pembangunan jaringan irigasi, perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum, perencanaan normalisasi saluran sungai, pembangunan jaringan air bersih/air minum, rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai, optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, pemberdayaan petani pemakai air, rehabilitasi jaringan irigasi dalam kondisi tanggap darurat, serta rehabilitasi sungai dalam kondisi tanggap darurat

**g. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**

Fokus kegiatan pada Pembangunan jaringan air bersih/air minum, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi serta irigasi dan sungai dalam kondisi tanggap darurat, normalisasi saluran sungai, optimalisasi fungsi

jaringan irigasi yang telah dibangun, serta pemberdayaan petani pemakai air

**h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**

Fokus kegiatan pada penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan prasarana dan sarana air limbah, fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan

**i. Program Pengaturan Jasa Konstruksi**

Fokus kegiatan pada sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait, serta pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

**j. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**

Fokus kegiatan pada pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya, serta rehabilitasi embung dan bangunan panampung air lainnya dalam kondisi tanggap darurat

**k. Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan**

Fokus kegiatan pada rehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan irigasi, normalisasi saluran sunga, saluran drainase/gorong-gorongsecara swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah I hingga VI

**l. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**

Fokus kegiatan pada pengadaan alat-alat berat, pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan, serta rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

**m. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi**

Fokus kegiatan pada pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

**n Program Pengawasan Jasa Konstruksi**

Fokus kegiatan pada pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi

**o. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan**

Fokus kegiatan pada Penyediaan sarana tenaga kelistrikan di luar daerah jangkauan PLN

**p. Program Perencanaan Tata Ruang**


Fokus Kegiatan pada Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, serta Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

**4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a Program Pengembangan Perumahan**

Fokus kegiatan pada fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu serta pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

\* 

**b. Program Lingkungan Sehat perumahan**

**5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

Fokus kegiatan pada pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat, pengendalian keamanan lingkungan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, operasi penegakan Perda dan perundang-undangan, koordinasi penanganan kasus - kasus pelanggaran Perda dan Perpu, pengamanan hari libur, hari besar nasional dan patroli wilayah, pengamanan kegiatan kunjungan kerja pejabat, dan pengamanan aset penda

**b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Fokus kegiatan pada peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan, peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah, pelaksanaan patroli wilayah serta peningkatan kemampuan anggota satpol PP

**c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

Fokus kegiatan pada Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2017 yaitu terlaksananya gelar pasukan dalam rangka HUT Satpol PP di tingkat Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 1 (satu) kali

**d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**

Fokus kegiatan pada penyuluhan pencegahan dan penertiban premanisme

**e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**

Fokus kegiatan pada pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat, penyuluhan trantibum dan penegakan Perda

**f. Program Darurat Bencana dan Logistik**

Fokus kegiatan pada peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, dengan target capaian di Tahun 2017 yaitu meningkatnya jumlah pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, sebesar 60 kali

**6. Sosial**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**

Fokus kegiatan pada peningkatan kemampuan (*capacity building*) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, kat dan pmks lainnya, pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin, fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi, dan fasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan keluarga



**b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

Fokus kegiatan pada pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia, pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal, pelayanan psikososial bagi PMKS di *trauma centre* termasuk bagi korban bencana, pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan *trauma center*, peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, serta penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

**c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**

Fokus kegiatan pada pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma, dan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

**d. Program Pembinaan Pantu Asuhan/Pantu Jompo**

Fokus kegiatan pada pendayagunaan para penghuni PA/jompo

**e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)**

Fokus kegiatan pada pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

**f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

Fokus kegiatan pada peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha, peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, serta peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

**g. Program Penanganan Anak Terlantar**

Fokus kegiatan pada pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar dan pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar

**5.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

**1. Tenaga Kerja**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Fokus kegiatan pada penyusunan data base tenaga kerja daerah, peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur blk, pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja, pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta, penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta serta bimbingan program pemagangan ke luar negeri

**b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

Fokus kegiatan ini pada penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, penyiapan tenaga kerja siap pakai, pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat, pelaksanaan kegiatan padat kerja darurat, pendampingan pengelolaan unit

bursa kerja khusus serta peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri

**c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**

Fokus kegiatan pada fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemberian bantuan hukum dan jamsotek, pendataan tenaga kerja, pengujian lingkungan dan peralatan di perusahaan serta pembinaan dan pemantauan kinerja organisasi

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**

Fokus kegiatan pada peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik, pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan, peningkatan produkufitas ekonomi perempuan dan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesejahteraan dan perlindungan anak

**a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

Fokus kegiatan pada Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan, Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2), Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak, Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak, Penguatan kelembagaan pengarusutamaan hak anak, Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan kesejahteraan dan perlindungan anak, Fasilitasi peningkatan kapasitas forum anak, Evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta gender dalam pembangunan, Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan, serta Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

**b Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

Fokus kegiatan pada Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah, Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT, Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan, Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan, Pengembangan dan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, Fasilitasi upaya perlindungan anak dari kekerasan dan ABH, Pelatihan pelayanan dan pendampingan anak korban kekerasan dan ABH, serta Pendidikan dan pelatihan pengasuhan anak bagi keluarga

### **3. Pangan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

#### **a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan**

Fokus kegiatan pada penanganan daerah rawan pangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat, pemantauan dan analisis harga pangan pokok, pengembangan cadangan pangan daerah, desa mandiri pangan, diversifikasi tanaman, lumbung pangan desa, model distribusi pangan yang efisien, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penyuluhan sumber pangan alternatif serta koordinasi ketahanan pangan dengan ketahanan pangan

### **4. Pertanahan**

Fokus kegiatan pada koordinasi serta fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan serta rapat koordinasi di bidang pertanahan

### **5 Lingkungan Hidup**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

#### **a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

Fokus kegiatan pada Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, Peningkatan operasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, Bimbingan teknis persampahan, serta Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

#### **b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Fokus kegiatan pada Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura, Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, Pengelolaan B3 dan limbah B3, serta Koordinasi penyusunan AMDAL

#### **c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

Fokus kegiatan pada konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air, pantai dan laut lestari, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

#### **d Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Fokus kegiatan pada Pengembangan data dan informasi lingkungan Kegiatan dalam program ini dilakukan untuk mendukung target capaian

#### **e Peningkatan Pengendalian Polusi**

Fokus kegiatan pada Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

\* 38

## **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

### **a. Program Penataan Administrasi Kependudukan**

Fokus kegiatan pada implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan (termasuk catatan sipil), Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan (termasuk catatan sipil), Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat (termasuk catatan sipil), Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, Pengembangan data base kependudukan (termasuk catatan sipil), Penyusunan kebijakan kependudukan (termasuk catatan sipil), Sosialisasi kebijakan kependudukan (termasuk catatan sipil), Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil, Penataan, pemeliharaan dan penertiban dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, Pelayanan Mobile kependudukan dan pencatatan sipil, Sinkronisasi kebijakan, kelembagaan dan regulasi administrasi kependudukan, Pembangunan jaringan koneksitas data administrasi kependudukan, Peningkatan Pelayanan akta kematian, Standarisasi pelayanan administrasi kependudukan, serta Pendataan dan penertiban dokumen kependudukan

## **7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

### **a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**

Fokus kegiatan pada pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat, diseminasi informasi bagi masyarakat desa, pembinaan tenaga teknis dan kader pemberdayaan masyarakat, pengembangan model posyandu terpadu, pameran teknologi tepat guna masyarakat desa, peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, peningkatan peran dan fungsi BPD serta fasilitas pendataan sarana dan prasarana desa

### **b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

Fokus kegiatan pada fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan, fasilitas kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan serta pembinaan dan asistensi manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/usaha desa

### **c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**

Fokus kegiatan pada pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong masyarakat, penyusunan profil desa dan kelurahan, penyusunan mekanisme, formulasi penyaluran ADD, Pembinaan penggunaan dana ADD, pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan, fasilitas pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa, pembinaan partisipasi peran serta masyarakat, fasilitas dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan pemukiman berbasis masyarakat, fasilitas pelaksanaan program pamsimas bidang monitoring kesinambungan, fasilitas pelaksanaan pengembangan sistem pembangunan partisipatif dan integrasi, fasilitas dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa serta pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan, Koordinasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan desa,

# 5/8

Fasilitasi pengembangan potensi desa/kelurahan serta Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat

**d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**

Fokus kegiatan pada pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang administrasi, Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa, Penataan Desa, Pengembangan data/informasi sistem informasi manajemen pemerintahan desa/kecamatan (SIMPEDES), Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kecamatan, Fasilitasi pengangkatan perangkat desa, Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa

**e Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**

Fokus kegiatan pada Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan, Fasilitasi inventarisasi kekayaan/ aset desa, serta Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

**8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Keluarga Berencana**

Fokus kegiatan pada penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE, peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, promosi pelayanan Khiba, pembinaan keluarga berencana, peningkatan peran pria dalam keluarga berencana serta pengembangan keluarga berencana di wilayah sasaran khusus

**b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja**

Fokus kegiatan pada Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), dan Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

**c Program Pelayanan Kontrasepsi**

Fokus kegiatan pada Pengadaan alat dan obat kontrasepsi (ALAKONT), Pelayanan KB medis operasi, dan Penguatan kemitraan dan implementasi KKBPK melalui momentum

**d Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**

Fokus kegiatan pada Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB, Pembinaan kelompok masyarakat peduli KB, Pengelolaan data dan informasi program KB, serta Penguatan pembangunan keluarga sejahtera melalui momentum hari keluarga

**e. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR**

Fokus kegiatan pada pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR dan fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

**f. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS**

**g Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**

Fokus kegiatan pada pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan, pelatihan pengelola kelompok UPPKS di Kecamatan, Peningkatan peran serta usaha ekonomi produktif untuk mewujudkan

# 98

keluarga sejahtera, Promosi dan pemasaran produk-produk untuk meningkatkan keluarga sejahtera dan Peningkatan partisipasi dan peran serta kelompok kegiatan KKBPK

## **9. Perhubungan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

### **a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

Fokus kegiatan pada Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan, Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan, Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, Peningkatan pengelolaan parkir di tepi jalan, Inventarisasi data sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan, serta Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

### **b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**

Fokus kegiatan pada rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor, prasarana balai pengujian kendaraan bermotor, terminal/pelabuhan, rambu-rambu lalu lintas, halte serta sarana dan prasarana perlintasan KA

### **c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

Fokus kegiatan pada uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang, pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal, penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal A, pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan, fasilitasi perijinan di bidang perhubungan, pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan, koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan, penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal B

### **d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**

Fokus kegiatan pada Pengadaan rambu-rambu lalu lintas, Pengadaan marka jalan, Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan, Pengendalian dan pengamanan lalu lintas di jalan dan Koordinasi dalam peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas

## **10. Komunikasi dan Informatika**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

### **a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

Fokus kegiatan pada Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Penyelenggaraan ekosistem Smart City, Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagai pakai, Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah, serta Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi

### **b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

Fokus kegiatan pada Asistensi/bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik serta Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang

**c. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media**

Fokus kegiatan pada penyebaran informasi pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah serta informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

**d. Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah**

Fokus kegiatan pada Revitalisasi pendayagunaan media center daerah, Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center, Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik, Penyelenggaraan Government CIO, serta Pemberdayaan dan pemanfaatan *e-government*

**e Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika**

Fokus kegiatan pada Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll, Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD, Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial), Komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi, Pelayanan informasi melalui media online, Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah, serta Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat

**11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**

Fokus kegiatan pada Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi, Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD, serta Monitoring, evaluasi dan pelaporan

**b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**

Fokus kegiatan pada Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah, Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah, serta Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

**c Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

Fokus kegiatan pada Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi, Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi, Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi, serta Monitoring, evaluasi dan pelaporan

**12. Penanaman Modal**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

Fokus kegiatan pada Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah, Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah,

Penyelenggaraan pameran investasi, serta Monitoring, evaluasi dan pelaporan

**b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

Fokus kegiatan pada Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal serta Kajian kebijakan penanaman modal

**c. Program Penanganan Pengaduan di Bidang Investasi dan Perijinan**

Fokus kegiatan pada Fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang investasi

**13. Kepemudaan dan Olah Raga**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**

Fokus kegiatan pada Pembinaan organisasi kepemudaan, Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda serta Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

**b. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba**

Fokus kegiatan pada pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

**c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**

Fokus kegiatan pada Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat, Pengembangan olahraga rekreasi serta Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

**14. Statistik**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**

Fokus kegiatan pada penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

**15. Persandian**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program pengembangan persandian/informasi daerah**

Fokus kegiatan pada Pengamanan komunikasi dan informasi dan Penyelenggaraan keamanan informasi

**16 Kebudayaan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

Fokus kegiatan pada Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno, Pengelolaan dan pengembangan pelestarian



peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air, Pengembangan kebudayaan dan pariwisata, serta Pengembangan nilai dan geografi sejarah

**b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya**

Fokus kegiatan pada Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah, serta Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

**c. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya**

Fokus kegiatan pada fasilitas pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta

**17 Perpustakaan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**

Fokus kegiatan pada Pemasyarakan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, Pengembangan minat dan budaya baca, Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan, Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah, Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, Penyediaan kelengkapan sarana layanan perpustakaan, serta penyelenggaraan bimbingan teknis perpustakaan

**18. Kearsipan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**

Fokus kegiatan pada Kajian sistem administrasi kearsipan dan Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

**b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah**

Fokus kegiatan pada pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, dan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

**c. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan**

Fokus kegiatan pada Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah, Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

**d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan**

Fokus kegiatan pada Penyediaan sarana layanan informasi arsip, Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta dan Penyelenggaraan pameran kearsipan

+ 94

### **5.3. Urusan Pilihan**

#### **1. Kelautan dan Perikanan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

##### **a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

Fokus kegiatan pada Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir, dan pembentukan kelompok kerja mangrove daerah (KKMD)

##### **b. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut**

Fokus kegiatan pada pengendalian kerusakan ekosistem perairan, dan gerakan bersih pantai

##### **c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

Fokus kegiatan pada pengembangan bibit ikan unggul, pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan, pembinaan dan pengembangan perikanan, serta pelatihan budidaya perikanan

##### **d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Fokus kegiatan pada pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap, Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan, Penyediaan sarana perikanan tangkap, Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan dan pengembangan usaha penangkapan ikan dan usaha nelayan skala kecil

##### **e. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**

Fokus kegiatan pada Pelatihan pengolahan ikan berorientasi pasar, Pembinaan dalam rangka Standarisasi dan sertifikasi usaha budidayadan hasil tangkapan perikanan, Apresiasi Teknologi Pengolahan Produk Nilai Tambah, Intensifikasi Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, Promosi Gemar Makan Ikan, Promosi Pemasaran Hasil Perikanan serta Bimbingan Teknis Manajemen

##### **f. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar**

Fokus kegiatan pada Reservasi hewan air, Pengembangan/pembuatan demplot kolam air payau dan air tawar, Pengembangan kawasan minapolitan

#### **2. Pariwisata**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

##### **a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Fokus kegiatan pada pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata, koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri, pengembangan statistik kepariwisataan, dan pelatihan pemandu wisata terpadu

##### **b. Program pengembangan Destinasi Pariwisata**

Fokus kegiatan pada pengembangan objek pariwisata unggulan, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha, pengembangan daerah tujuan wisata, pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata

\* 99

**c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata**

Fokus kegiatan pada pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya, pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata, pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

**3. Pertanian**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Fokus kegiatan pada peningkatan kelembagaan petani dan peningkatan kemampuan lembaga petani perkebunan

**b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan**

Fokus kegiatan pada promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah, pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat, penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan, Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan, serta Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

**c. Program Peningkatan Penerapan Produksi Pertanian/ Perkebunan**

Fokus kegiatan pada Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, serta Pelatihan penerapan teknologi perlindungan tanaman perkebunan tepat guna

**d Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**

Fokus kegiatan pada Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan, Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan, Pencegahan, penanggulangan dan pengendalian hama, penyakit tanaman, dan organisme pengganggu pertanian dan perkebunan, Pengolahan lahan dan air pertanian/perkebunan, serta Pengamatan, identifikasi, inventarisasi dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan

**e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan**

Fokus kegiatan pada peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

**f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**

Fokus kegiatan pada pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak, dan kegiatan pengawasan dan penyehatan peredaran pangan asal hewan

**g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**

Fokus kegiatan pada Pengembangan agribisnis peternakan Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi hasil peternakan, pelayanan informasi pasar komoditas peternakan, bimbingan teknis kelompok tani ternak, lomba kelompok tani ternak, sosialisasi peraturan bupati tentang penyelenggaraan ijin usaha peternakan, *workshop* usaha peternakan, serta pengembangan peternakan di kawasan penghasil

# 90

telur omega 3 di Kecamatan Petarukan dan telur aneka rasa di Kecamatan Comal dan Petarukan

**h. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan**

Fokus kegiatan pada penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna, dan kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

**4. Perdagangan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Fokus kegiatan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen, peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, dan operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah

**b. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional**

**c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**

Fokus kegiatan pada pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri, pengembangan data base informasi potensi unggulan, membangun jejaring dengan eksportir, serta koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait /asosiasi /pengusaha

**d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri**

Fokus kegiatan pada pengembangan pasar dan distribusi barang/produk, pengembangan pasar lelang daerah, kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan, dan fasilitasi penyelenggaraan pasar murah

**e. Program Pembinaan Perdagangan Kaki Lima dan Asongan**

Fokus kegiatan pada penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan, pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan

**5. Perindustrian**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

Fokus kegiatan pada fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah, Penyelenggaraan dan Partisipasi Kegiatan Pasar Rakyat, Partisipasi Pameran Produk Unggulan Daerah di tingkat Regional, Nasional dan Internasional, Fasilitasi Program program penunjang kegiatan Dekranasda, Partisipasi dan Fasilitasi Kegiatan Lomba Rancang Busana, Pelatihan dan Pembinaan Perbengkelan Elektronika, Pembinaan dan Ketrampilan Pendukung Program Desa Binaan PKK, Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Masyarakat Mitra Desa Binaan P2MBG, Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Makanan, Pembinaan fasilitas kemasan IKM, Pembinaan dan pelatihan di tempat kerja bagi IKM, Pembinaan dan pelatihan AMT bagi IKM, Pembinaan dan pelatihan ketrampilan bahan

\* 30

bangunan dan kimia, Pembinaan dan pelatihan pengolahan hasil perikanan dan kelautan, Pembinaan fasilitasi merek bagi IKM, Pembinaan dan pelatihan industri logam, mesin dan perekayasaan, Fasilitasi pengembangan industri tekstil dan produk tekstil, serta Fasilitasi pengembangan industri aneka kerajinan

**b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**

Fokus kegiatan pada pembinaan kemampuan teknologi industri, dan pengembangan dan pelayanan teknologi industri

**c. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial**

Fokus kegiatan pada pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

**6. Transmigrasi**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**

Fokus kegiatan pada peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, dan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

**b. Program Transmigrasi Umum**

**5 4. Penunjang Urusan Pemerintahan**

**1. Perencanaan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Pengembangan Data/Informasi**

Fokus kegiatan pada Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan, Penyusunan dan Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah

**b. Program Kerjasama Pembangunan**

Fokus kegiatan pada Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga, Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya, Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah bidang prasarana wilayah, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang kesehatan, Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, dan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial dan budaya

**c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Fokus kegiatan pada Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh, dan Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

\* 30

**d. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar**

Fokus kegiatan pada Koordinasi perencanaan penanganan perumahan dan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

**e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Fokus kegiatan pada Penyusunan rancangan RKPD, Penyelenggaraan musrenbang RKPD, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Koordinasi bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, serta Koordinasi bidang kesehatan, PP dan PA, pengendalian penduduk dan KB

**f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Fokus kegiatan pada Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat, Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah, FEDEP

**g. Program Perencanaan Sosial Budaya**

Fokus kegiatan pada Penguatan kelembagaan PUS (Pendidikan Untuk Semua), Koordinasi penanggulangan GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium), Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKPK), Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan permukiman berbasis masyarakat, Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa, Koordinasi perencanaan bidang sosial, serta Koordinasi perencanaan bidang budaya

**h. Program Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan**

Fokus kegiatan pada kajian dan analisis pelaksanaan pemerintahan daerah, fasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang penelitian dan pengembangan, fasilitasi pada kegiatan kuliah kerja nyata (KKN), seminar dan lokakarya hasil penelitian dan pengembangan, dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan dari berbagai sumber, serta koordinasi bidang penelitian dan pengembangan

**2 Keuangan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Fokus kegiatan pada Penyusunan standar satuan harga, Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang, Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS, Pembayaran PBB aset daerah/Barang milik daerah, Pendistribusian barang milik daerah, Penetapan status pengguna BMD, SK pengurus barang RKB dan RKPBU, Penyusunan laporan semesteran barang milik daerah, Penyelesaian pemindahtanganan dan penghapusan BMD, Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan jasa giro dan bunga deposito serta penerimaan

\* 30

dana transfer, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah pengelolaan dana perimbangan, Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, Pengelolaan kerugian daerah, Sosialisasi/ peningkatan SDM / pengurus barang/ Simda BMD, Pemantauan, pemanfaatan aset/ Barang milik daerah, serta Penyusunan laporan semesteran barang milik daerah (konsolidasi)

### **3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

#### **a. Program Fasilitas Pindah/ Purna PNS**

Fokus kegiatan pada pemindahan tugas PNS

#### **b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Fokus kegiatan pada pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD

#### **c. Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur**

Fokus kegiatan pada pendidikan dan pelatihan prajabatan untuk para calon PNS, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat struktural, pendidikan dan pelatihan teknis sesuai tugas pokok dan fungsi bagi PNS, pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS, seleksi dan penetapan tugas belajar serta ijin belajar bagi PNS, penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan di daerah, serta penyelenggaraan diklat fungsional di daerah

#### **d. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian**

Fokus kegiatan pada penyusunan database karir ASN, seleksi penerimaan ASN, penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS, pembangunan/pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah, pelaksanaan kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Pengawas, pelaksanaan kegiatan pengangkatan/perpindahan dalam/dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan jabatan fungsional tertentu, penyusunan formasi ASN, pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitas jabatan fungsional tertentu, serta penyelesaian proses pensiun PNS

#### **e. Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur**

Fokus kegiatan pada pemberian penghargaan bagi PNS, penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, pengelolaan penilaian kinerja PNS, pembinaan, monitoring dan evaluasi disiplin aparatur, penyelesaian izin perceraian bagi PNS, fasilitas & kelengkapan urusan kepegawaian

### **4. Penelitian dan Pengembangan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

#### **a. Program optimalisasi penelitian dan pengembangan**

Fokus kegiatan pada Kajian dan Analisis pelaksanaan pemerintahan daerah, Fasilitas peran serta masyarakat dalam bidang penelitian dan pengembangan, Fasilitas pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Seminar dan lokakarya hasil penelitian dan pengembangan, Dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan dari berbagai sumber, Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan

\* 38

## **5 Sekretariat Daerah**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

### **a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**

Fokus kegiatan pada dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri, rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah, kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah, koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, penyelenggaraan protokoler kepala daerah, serta penyusunan materi sambutan kepala daerah/ wakil kepala daerah

### **b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Fokus kegiatan pada Penyusunan analisa standar belanja, Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Peningkatan manajemen aset/barang daerah, Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan BUMD, Peningkatan pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Evaluasi pelaksanaan peningkatan pemantauan DBHCHT, Kormonevlap sarana dan prasarana perekonomian, serta Koordinasi dan pembinaan KP3 dan pengembangan aktivitas agribisnis

### **c. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota**

Fokus kegiatan pada fasilitas unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintahan

### **d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Fokus kegiatan pada fasilitas pelaksanaan layanan tata naskah secara elektronik

### **e. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Fokus kegiatan pada pembentukan unit bantuan hukum, Fasilitas penanganan pengaduan masyarakat, Koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam dan Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

### **f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Fokus kegiatan pada penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, legislasi rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitas sosialisasi peraturan perundang-undangan, publikasi peraturan perundang-undangan, penyusunan kelengkapan peraturan kelembagaan Pemerintah Daerah (evaluasi SOTK), Penyuluhan peraturan perundang-undangan, Penyusunan kelengkapan peraturan ketatalaksanaan pemerintah daerah, Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah, fasilitas keluarga sadar hukum dan desa sadar hukum, fasilitas pemenuhan HAM, dan kajian peraturan perundang-undangan produk hukum daerah dan evaluasi rancangan peraturan desa, klarifikasi produk hukum desa terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-undangan desa

### **g. Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Fokus kegiatan pada Peningkatan forum komunikasi ulama dan umaro, Fasilitas kegiatan hari-hari besar keagamaan, Fasilitas kegiatan

# 49



keagamaan, Fasilitas petugas haji daerah dan forum silaturahmi bersama Forkompimda, Fasilitas kegiatan ibadah haji, Penyusunan database lembaga keagamaan formal dan non formal, Pembinaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan, Monitoring dan evaluasi program-program keagamaan, Fasilitas bansos/hibah keagamaan, Koordinasi kebijakan dan pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan, Sosialisasi kebijakan di bidang sosial kemasyarakatan, Penyusunan database lembaga sosial kemasyarakatan, Pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan, Fasilitas penguatan lembaga sosial kemasyarakatan, Fasilitas bansos/hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan, Monitoring dan evaluasi pemberian bansos/hibah lembaga sosial kemasyarakatan, Koordinasi penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat, Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental ODMK, Pembinaan eks psikotik, Penyusunan, penataan dan evaluasi database kemiskinan, Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan, serta Koordinasi dan fasilitas kegiatan penanggulangan kemiskinan

**h Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan**

Fokus kegiatan pada pembinaan administrasi pemerintah kecamatan, Fasilitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), serta Penyusunan buku data monografi kecamatan

**i Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

Fokus kegiatan pada pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah, penyusunan instrumen analisis jabatan PNS, fasilitas urusan kepegawaian, serta Fasilitas urusan kepegawaian bagi pejabat fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah

**j Program Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi**

Fokus kegiatan pada pembinaan dan monitoring reformasi birokrasi, penyusunan sistem dan prosedur kerja, Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja di SKPD

**k Program Pelayanan Publik**

Fokus kegiatan pada Standar Pelayanan Minimal, serta pembinaan lembaga pelayanan publik

**l Program Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah**

Fokus kegiatan pada koordinasi Ekuinda, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat dan fasilitas pengendalian inflasi daerah

**m Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**

Fokus kegiatan pada fasilitas pembakuan nama rupa bumi

**6. Sekretariat DPRD**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

Fokus kegiatan pada pembahasan rancangan peraturan daerah, *hearing*/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama, rapat-rapat alat kelengkapan dewan, rapat-rapat paripurna, kegiatan reses, kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota

\* 99

DPRD, kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah, serta Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

**b. Program Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

Fokus kegiatan pada Sosialisasi peraturan perundang-undangan

**7. Pengawasan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

**a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

Fokus kegiatan pada pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, tindak lanjut hasil temuan pengawasan, serta koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

**b. Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

Fokus kegiatan pada pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

**8. Program Rutin PD Teknis**

Program rutin yang ada pada setiap Perangkat Daerah antara lain adalah

**a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Fokus kegiatan pada penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, arang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan logistik kantor, makanan dan minuman, jasa keamanan serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

**b. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur**

Fokus kegiatan pada pengadaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, perlengkapan rumah jabatan/dinas, perlengkapan gedung kantor, peralatan rumah jabatan/dinas, peralatan gedung kantor, mebeleur, serta komputer dan perlengkapannya

**c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Fokus kegiatan pada Sosialisasi peraturan perundang-undangan, pengiriman pegawai pada seminar *workshop* terkait dengan pelaksanaan tupoksi

**d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Fokus kegiatan pada pemeliharaan rutin/berkala penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN), penyusunan pelaporan keuangan semesteran, dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

**e. Program Peningkatan disiplin aparatur**

Fokus kegiatan pada pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

\* 90

- f. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**  
Fokus kegiatan pada penyusunan data base perencanaan SKPD

**9. Program Rutin Kecamatan**

Program rutin yang ada pada setiap kecamatan antara lain adalah

**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Fokus kegiatan pada penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, arang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan logistik kantor, makanan dan minuman, jasa keamanan serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

**b. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur**

Fokus kegiatan pada pengadaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, perlengkapan rumah jabatan/dinas, perlengkapan gedung kantor, peralatan rumah jabatan/dinas, peralatan gedung kantor, mebeleur, serta komputer dan perlengkapannya

**c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Fokus kegiatan pada pemeliharaan rutin/berkala penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN), penyusunan pelaporan keuangan semesteran, dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

**d. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD**

Fokus kegiatan pada Penyusunan data base perencanaan SKPD, dan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

**e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran**

Fokus kegiatan pada Fasilitas penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan, Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan, Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/kelurahan, Pembinaan penggunaan dana ADD dan Dana Desa, Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Fasilitas penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan di kecamatan/kelurahan, dan Klarifikasi Peraturan desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

**5.5. Kegiatan Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan**

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis serta *top-down* dan *bottom-up* Pendekatan partisipatif dan *bottom-up* ditempuh melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai tingkat dusun hingga kabupaten Pada pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan, menghasilkan usulan kegiatan dari Musrenbang tingkat desa yang dikompilasi dan diurutkan menurut prioritas Adapun penentuan prioritas ini dilakukan dengan pertimbangan kemendesakan, dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan, kemanfaatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin, dukungan swadaya/sumberdaya yang ada, adanya potensi untuk berkembang dan berkelanjutan, serta

\* 99

bermanfaat bagi kawasan (menghubungkan antar kabupaten /kecamatan/desa)

Usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2018 di tingkat kecamatan kemudian dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan tertuang dalam tabel pada Lampiran V dan Lampiran VI

## BAB VI

### PENUTUP

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan kases dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RKPD disusun dengan melalui beberapa tahapan Rancangan Awal RKPD merupakan salah satu tahapan paling awal yang ditempuh dalam menyusun RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Tahapan berikutnya adalah penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD serta penetapan RKPD

Sebagai salah satu wujud pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan, maka

- 1 Perangkat Daerah (PD) agar segera menyusun Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja PD) Tahun 2018 dengan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 ini,
- 2 Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2018 dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan
- 3 Dalam menyusun Rancangan Renja, PD wajib melakukan penjarangan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (*public hearing*), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing,

Dokumen perencanaan pembangunan yang baik adalah dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilaksanakan Untuk itu diperlukan sinergitas yang baik antara Bappeda, Perangkat Daerah dan semua *stakeholder* dalam setiap tahapan penyusunannya

BUPATI PEMALANG,  
JUNAEDI

PARAF	Asubag Kasubid	Sekretaris Budan	Kepala Badan	Sekda
MIBARKI	#	m	f	g

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR                   TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

**REKAPITULASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018  
MENURUT SKPD DAN URUSAN**

NO	SKPD DAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pagu Indikatif (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>44,927,025,250</b>	
	Pendidikan	41,548,025,250	
	Kebudayaan	3 379 000 000	
2	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>250 332,486,000</b>	
	Kesehatan	250 332,486,000	
3	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>177 382,000 000</b>	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	177 382 000,000	
4	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>79 258,000,000</b>	
	Pertanahan	500 000,000	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	78 758 000 000	
5	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>9 030,000,000</b>	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9 030 000 000	
6	<b>DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>10 499,520,975</b>	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 830,155,500	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 341 795 000	
	Sosial	5 327 570 475	
7	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>	<b>13,068,800,000</b>	
	Tenaga Kerja	12 513,800 000	
	Transmigrasi	555 000 000	
8	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>37 960,000,000</b>	
	Lingkungan Hidup	37 960,000,000	
9	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>7,368,684,000</b>	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7 368,684 000	
10	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>22 217,310,000</b>	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22 217 310 000	
11	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>3 758,700,000</b>	
	Perhubungan	3 758 700 000	
12	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>18 700,000,000</b>	
	Komunikasi dan Informatika	17 001 800 000	

NO	SKPD DAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pagu Indikatif (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Statistik	885,200,000	
	Persandian	813 000 000	
13	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>60 294,000,000</b>	
	Perindustrian	2 835 000 000	
	Perdagangan	54 000 000 000	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3 459 000 000	
14	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>430,020,000</b>	
	Penanaman Modal	430 020 000	
15	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>1 239,000 000</b>	
	Kearsipan	807 500 000	
	Perpustakaan	431 500 000	
16	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>9,188,576,000</b>	
	Kelautan dan Perikanan	9 188 576 000	
17	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	<b>35,165,202,500</b>	
	Kepemudaan dan Olah Raga	8 145 500 000	
	Parwisata	27 019 702,500	
18	<b>DINAS PERTANIAN</b>	<b>52,879,000,000</b>	
	Pertanian	50 681 000 000	
	Pangan	2 198 000 000	
19	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>7 422,560,000</b>	
	Perencanaan	7 422 560 000	
20	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>12 109 100,000</b>	
	Keuangan	12 109 100 000	
21	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>4 960,650,000</b>	
	Pengawasan	4 960 650 000	
22	<b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>7 996,155,000</b>	
	Keuangan	7 996 155 000	
23	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>25 850,000,000</b>	
	Sekretariat DPRD	25 850 000 000	
24	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>11,982,610,753</b>	
	Kepegawaian dan Diklat	11 982 610 753	
25	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>23,682 000 000</b>	
	Sekretariat Daerah	23 682 000 000	
26	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>2 570,000,000</b>	
	BPBD	2 570 000 000	

# 98

NO	SKPD DAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pagu Indikatif (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
27	KANTOR KESBANGPOLINMAS	3 114,640,000	
	Kesbangpolinmas	3 114,640,000	
28	KECAMATAN MOGA	417,675,500	
	Kecamatan	417 675,500	
29	KECAMATAN PULOSARI	1,464,600,000	
	Kecamatan	1 464 600 000	
30	KECAMATAN BELIK	1,104,636,000	
	Kecamatan	1 104 636 000	
31	KECAMATAN WATUKUMPUL	1 510,600,000	
	Kecamatan	1 510 600,000	
32	KECAMATAN BODEH	2 191,000,000	
	Kecamatan	2 191 000 000	
33	KECAMATAN BANTARBOLANG	1 243,000,000	
	Kecamatan	1 243 000 000	
34	KECAMATAN RANDUDONGKAL	480 661 500	
	Kecamatan	480 661,500	
35	KECAMATAN PEMALANG	4,645,425,300	
	Kecamatan	4 645 425 300	
36	KECAMATAN TAMAN	1 557 640,900	
	Kecamatan	1 557 640 900	
37	KECAMATAN PETARUKAN	1,602 263,000	
	Kecamatan	1 602 263,000	
38	KECAMATAN AMPELGADING	3,905 000,000	
	Kecamatan	3 905 000 000	
39	KECAMATAN COMAL	2,088,850,000	
	Kecamatan	2 088 850 000	
40	KECAMATAN ULUJAMI	1 831 500,000	
	Kecamatan	1 831 500 000	
41	KECAMATAN WARUNGPRING	505,960,000	
	Kecamatan	505 960 000	
	JUMLAH	957 934 852,678	

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Lampiran II - 3

PARAF HIRARK	Kesubag Kesubid	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Sekda
	A	g	D	E



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TENTANG  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

REKAPITULASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018  
 MENURUT URUSAN DAN SKPD

NO	Kode			Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	2			3	4	5
1	1	1	1 01	<u>Pendidikan</u>	41 548 025 250	
	1	1	1 01 01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	41 548 025 250	
2	1	2	1 02	<u>Kesehatan</u>	250 332 486 000	
	1	2	1 02 01	DINAS KESEHATAN	250 332 486 000	
3	1	3	1 03	<u>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	177 382 000 000	
	1	3	1 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	177 382 000 000	
4	1	4	1 04	<u>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</u>	78 758 000 000	
	1	4	1 04 01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	78 758 000 000	
5	1	5	1 05	<u>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</u>	9 030 000 000	
	1	5	1 05 01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9 030 000 000	
6	1	6	1 06	<u>Sosial</u>	5 327 570 475	
	1	6	1 06 01	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5 327 570 475	
7	2	1	2 01	<u>Tenaga Kerja</u>	12 513 800 000	
	2	1	2 01 01	DINAS TENAGA KERJA	12 513 800 000	
8	2	2	2 02	<u>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</u>	1 341 795 000	
	2	2	1 06 01	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 341 795 000	
9	2	3	2 03	<u>Pangan</u>	2 198 000 000	
	2	3	3 03 01	DINAS PERTANIAN	2 198 000 000	
10	2	4	2 04	<u>Pertanahan</u>	500 000 000	
	2	4	1 04 01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	500 000 000	
11	2	5	2 05	<u>Lingkungan Hidup</u>	37 960 000 000	
	2	5	2 05 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37 960 000 000	
12	2	6	2 06	<u>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</u>	7 368 684 000	
	2	6	2 06 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7 368 684 000	
13	2	7	2 07	<u>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</u>	22 217 310 000	
	2	7	2 07 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	22 217 310 000	
14	2	8	2 08	<u>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</u>	3 830 155 500	
	2	8	1 06 01	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3 830 155 500	
15	2	9	2 09	<u>Perhubungan</u>	3 758 700 000	
	2	9	2 09 01	DINAS PERHUBUNGAN	3 758 700 000	
16	2	10	2 1	<u>Komunikasi dan Informatika</u>	17 001 800 000	
	2	10	2 10 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17 001 800 000	
17	2	11	2 11	<u>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</u>	3 459 000 000	
	2	11	2 11 01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3 459 000 000	
18	2	12	2 12	<u>Penanaman Modal</u>	430 020 000	
	2	12	2 12 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	430 020 000	
19	2	13	2 13	<u>Kepemudaan dan Olah Raga</u>	8 145 500 000	
	2	13	3 02 01	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	8 145 500 000	

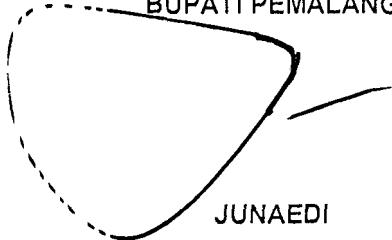
# 57 8

NO	Kode			Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	2			3	4	5
20	2	14	2 14	Statistik	885 200 000	
	2	14	2 10 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	885 200 000	
21	2	15	2 15	Persandian	813 000 000	
	2	15	2 10 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	813 000 000	
22	2	16	2 16	Kebudayaan	3 379 000 000	
	2	16	1 01 01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3 379 000 000	
23	2	17	2 17	Perpustakaan	431 500 000	
	2	17	2 18 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	431 500 000	
24	2	18	2 18	Kearsipan	807 500 000	
	2	18	2 18 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	807 500 000	
25	3	1	3 01	Kelautan dan Perikanan	9 188 576 000	
	3	1	3 01 01	DINAS PERIKANAN	9 188 576 000	
26	3	2	3 02	Pariwisata	27 019 702 500	
	3	2	3 02 01	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	27 019 702 500	
27	3	3	3 03	Pertanian	50 681 000 000	
	3	3	3 03 01	DINAS PERTANIAN	50 681 000 000	
28	3	4	3 04	Kehutanan	0	
29	3	5	3 05	Energi dan Sumberdaya Mineral	0	
30	3	6	3 06	Perdagangan	54 000 000 000	
	3	6	2 11 01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	54 000 000 000	
31	3	7	3 07	Perindustrian	2 835 000 000	
	3	7	2 11 01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2 835 000 000	
32	3	8	3 08	Transmigrasi	555 000 000	
	3	8	2 01 01	DINAS TENAGA KERJA	555 000 000	
33	4	3	4 03	Perencanaan	7 422 560 000	
	4	3	4 03 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7 422 560 000	
34	4	4	4 04	Keuangan	20 105 255 000	
	4	4	4 06 01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12 109 100 000	
	4	4	4 06 02	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7 996 155 000	
35	4	5	4 05	Kepegawaian dan Diklat	11 982 610 753	
	4	5	4 07 05	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11 982 610 753	
36	4	6	4 06	Pengawasan	4 960 650 000	
	4	6	4 06 01	INSPEKTORAT	4 960 650 000	
37	4	7	4 07	Sekretariat DPRD	25 850 000 000	
	4	7	4 07 01	SEKRETARIAT DPRD	25 850 000 000	
38	4	8	4 08	Sekretariat Daerah	23 682 000 000	
	4	8	4 08 01	SEKRETARIAT DAERAH	23 682 000 000	
39	4	9	4 09	BPBD	2 570 000 000	
	4	9	4 09 01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2 570 000 000	
40	4	10	4 1	Kesbangpolinmas	3 114 640 000	
	4	10	4 10 01	KANTOR KESBANGPOLINMAS	3 114 640 000	
41	4	11	4 11	Kecamatan	24 548 812 200	
	4	11	4 11 01	KECAMATAN MOGA	417 675 500	
	4	11	4 11 02	KECAMATAN PULOSARI	1 464 600 000	
	4	11	4 11 03	KECAMATAN BELIK	1 104 636 000	
	4	11	4 11 04	KECAMATAN WATUKUMPUL	1 510 600 000	





# 38

NO	Kode		Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	2		3	4	5
4	11	4 11 05	KECAMATAN BODEH	2 191 000 000	
4	11	4 11 06	KECAMATAN BANTARBOLANG	1 243 000 000	
4	11	4 11 07	KECAMATAN RANDUDONGKAL	480 661 500	
4	11	4 11 08	KECAMATAN PEMALANG	4 645 425 300	
4	11	4 11 09	KECAMATAN TAMAN	1 557 640 900	
4	11	4 11 10	KECAMATAN PETARUKAN	1 602 263 000	
4	11	4 11 11	KECAMATAN AMPELGADING	3 905 000 000	
4	11	4 11 12	KECAMATAN COMAL	2 088 850 000	
4	11	4 11 13	KECAMATAN ULUJAMI	1 831 500 000	
4	11	4 11 14	KECAMATAN WARUNGPRING	505 960 000	
JUMLAH				957 934 852 678	

BUPATI PEMALANG



JUNAEDI

PARAF	Kasubag Kasubid	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Sekda
HIRAPIKI				



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIAT DAERAH  
NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Pemalang  
Lewat Yth : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang  
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang  
Tanggal : 30 Mei 2017  
Nomor : 180/465 /Hk  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018

Yang telah diajukan oleh Bappeda Kabupaten Pemalang

2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA  
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

08 JUN 2017

Paraf

PARAF HIRARKI

Kasubag